



PERLINDUNGAN KARYA CIPTA SENI TARI

**(Studi terhadap Konsep dan Upaya Perlindungan Hak Cipta Seni Tari
di Kalangan Seniman Tari Yogyakarta)**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :
Faza Novrisal, SH
B4A 007 087**

**PEMBIMBING
Dr. Budi Santoso, SH, MS**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2009**

PERLINDUNGAN KARYA CIPTA SENI TARI

**(Studi terhadap Konsep dan Upaya Perlindungan Hak Cipta Seni Tari
di Kalangan Seniman Tari Yogyakarta)**

Disusun Oleh:

Faza Novrisal, S.H.

B4A 007 087

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 8 Juni 2009

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing,	Mengetahui,
	Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. Budi Santoso, SH., MS.
NIP: 131 631 876

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH., MH
NIP: 130 531 702

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, penguasa semesta alam, karena hanya atas rahmat dan ridho-Nya tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam dipanjatkan atas Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang dengan pengorbanan dan upayanya telah menyebarkan Islam di bumi ini sebagai *Rahmatan Lil Alamin*.

Tesis berjudul ” **PERLINDUNGAN KARYA CIPTA SENI TARI (Studi terhadap Konsep dan Upaya Perlindungan Hak Cipta Seni Tari di Kalangan Seniman Tari Yogyakarta)**” disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum (MH) setelah menyelesaikan pendidikan Strata-2 di Universitas Diponegoro, Semarang.

Dengan berbagai keterbatasan dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa masih diperlukan proses penyempurnaan dalam tesis ini sehingga diharapkan adanya kritik, saran, masukan serta koreksi demi kesempurnaan tesis ini di masa mendatang.

Dalam penulisan tesis ini penulis banyak menerima bantuan secara moral maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Untuk itu, perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Menteri Pendidikan Nasional**, yang telah memberikan dukungan pembiayaan melalui Program Beasiswa Unggulan hingga penyelesaian tesis ini berdasarkan DIPA Sekretaris Jendral DEPDIKNAS Tahun Anggaran 2007 sampai dengan tahun 2009.
2. **Bapak Prof. DR. dr. Susilo Wibowo, MS, Med, SP, And** selaku Rektor Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

3. **Bapak Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH. MH.** Selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
4. **Ibu Ani Purwanti, SH. MHum,** selaku Sekretaris Bidang Akademik Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, dan **Ibu Amalia Diamantina, SH, MHum** selaku Sekretaris Bidang Keuangan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
5. **Bapak Dr. Budi Santoso, SH, MS,** selaku Dosen Pembimbing atas kesabaran, pengarahan, bimbingan, dan dukungan serta nasihatnya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. **Ibu Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH,** dan **Ibu Prof. Dr. Etty Susilowati, SH, MS,** selaku Dosen Penguji yang selalu memberikan nasihat-nasihatnya demi kemajuan yang berarti setelah lulus dari Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
7. **Kedua orang tua penulis; Ibu Hidayah dan Bapak Sutadi Dra'uf** di Pekalongan beserta **kakak-kakak dan keponakan-keponakan** di mana pun berada.
8. **Keluarga besar H Zaki Djaisun Askari dan Hj. Herowati** di Semarang dan **Keluarga besar dr. H. Sudibyo Sastro Asmoro, SpOG** di Subang.
9. **Bapak/Ibu pengajar di kelas Unggulan Beasiswa Diknas Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Prof. Dr satjipto Rahardjo, SH,** Maha Guru yang begitu bijak dan Seorang Begawan di bidang Sosiologi Hukum, seluruh dosen pengajar yang selama ini telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis. Tidak lupa ucapan terima kasih penulis sampikan kepada seluruh staff pengajaran dan staff bagian keuangan serta seluruh karyawan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
10. **Bapak Prof. Dr. Y Sumandiyo Hadi, Bapak Kuswarsantya, MHum, Mas Sugita, Ibu Siti Sutiyah, Bapak Sutopo Tedjo Baskoro, Ibu MM. Ngatini, Ibu Ni Nyoman Seriati, Ibu Jiyu**

Wijayanti, Ibu Supriyanti, KRT Juwanjono Suryo Bronto, Mas Widaru Krefiyanto, Mbak Umi, Pak Gandung dan seluruh seniman tari Yogyakarta yang telah penulis wawancarai sehingga dari beliau – beliaulah inilah penulis mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang baru di bidang seni dan budaya. Sehingga menambah khasanah keilmuan penulis dalam menyusun tesis ini.

11. **Keluarga besar HKI '07**, atas waktu-waktu indah selama di Magister Ilmu Hukum UNDIP, Muti, Mbak Ulfa, Mbak Piah, Tyas, Mas Jamal, Zulfa, Rara, Mbak Neni, Hendra, Mbak Nur, Mbak Nisa, Purbo, Maezun, Mas Shohib, Mbak Zul, Mbak Astri, Mbak Dini, Nayla, Rindia, Fanny, Widiarini, Zaki, Oktavianus, Mufti, Mas Kusnoto, Mas Saleh, Terimakasih atas kebersamaan yang mengantarkan kita kepada kemenangan hati, terima kasih penulis sampaikan kepada Rifki Zainal, Yan Asmara Hendy, Mas Wenang, Mas Broto Hastono, Azhar Rivai, Alexander Z, Heri Siregar, serta **rekan-rekan penulis** di mana pun berada.
12. **Komunitas Singosari VII No 3 Semarang** ; Mas Neo, Mas Helmi, Mas Edi, Nyonge (Alfa), Rendi, Ronald, Wawan, Yono (Mulyono), Bosor (Ansor), Franky, yang sudah seperti keluarga tersendiri di hati Penulis.
13. **Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan** dan telah membantu dalam proses penulisan tesis ini.

Semoga Allah SWT membalas atas segala kebaikan dan meridhoi Nya dan tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia, khususnya dalam bidang Hak Cipta, Amiin.

Semarang, Juni 2009

Penulis,

Faza Novrisal

ABSTRAK

Seni tari merupakan suatu karya cipta manusia di bidang kesenian. Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan produk hukum yang memberikan perlindungan dan penghargaan atas kreatifitas manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Seniman tari sebagai pencipta suatu tarian merupakan subjek hukum Hak Cipta yang memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, hak eksklusif tersebut mencakup hak ekonomi dan hak moral. Pemahaman dan kesadaran tentang Hak Cipta ini ternyata kurang menjadi perhatian oleh seniman tari.

Permasalahan dalam penelitian ini meliputi; bagaimana bentuk perlindungan hukum karya cipta seni tari dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bagaimana pendapat seniman tari di Yogyakarta terhadap pengaturan perlindungan hak cipta dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh seniman tari Yogyakarta dalam melindungi karya cipta seni tarinya. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diatur di dalam Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, mendeskripsikan pendapat seniman tari di Yogyakarta terhadap konsep perlindungan karya seni tari dan mengetahui upaya perlindungan yang dilakukan oleh seniman tari Yogyakarta dalam melindungi karya seni tarinya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Empiris, yakni penelitian yang dilakukan terhadap primer terlebih dahulu dan kemudian menganalisa data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa seniman tari Yogyakarta, penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara memilih atau mengambil subjek-subjek yang didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif.

Karya cipta seni tari yang terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu seni tari Klasik Kraton, seni tari Tradisional Kerakyatan dan seni tari Kreasi Baru atau Kontemporer pada prinsipnya keberadaannya dilindungi di dalam Undang – undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, seniman tari di Yogyakarta berpendapat bahwa perlu diberikan sebuah perlindungan terhadap karya cipta seni tari mereka, karena pada prinsipnya mereka (seniman tari) berpendapat bahwa penghargaan dan penghormatan terhadap sebuah kreatifitas dan karya intelektualitas seorang seniman yang menggeluti bidang seni juga perlu dihargai dan dihormati oleh masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh seniman tari Yogyakarta dalam melindungi karya cipta seni tari mereka adalah melakukan pendokumentasian terhadap karya ciptanya itu ke dalam bentuk deskripsi tari dan dalam bentuk kaset serta *compact disk* (cd). Adapun saran dari penulis adalah perlu segera dilakukan upaya sosialisasi tentang UUHC 2002 di kalangan seniman tari di Yogyakarta, mengingat seniman tari sebagai salah satu subjek UUHC 2002 belum mengerti dan memahami tentang hak cipta dan seniman tari hendaknya melakukan pertemuan bersama diantara sesama seniman tari untuk membahas tentang arti pentingnya hak cipta bagi mereka.

Kata Kunci: *Karya Cipta Seni Tari, Seniman Tari Yogyakarta, Perlindungan Hak Cipta.*

ABSTRACT

A dance is a creation of human being in terms of art. Act Number 19 Year 2002 concerning Copyrights is a legal product providing protection and appreciation for human creativity in terms of science, art, and literature. As a creator of a dance, a dance artist is the legal subject of Copyrights, who have exclusive rights to publish or to multiply his or her creations. Those exclusive rights include economic rights and moral rights. This understanding and awareness of Copyrights have not become the interest of many dance artists yet.

The problems in this research cover: how is the form of legal protection of dance creation in Act Number 19 Year 2002 concerning Copyrights, what are the opinions of dance artists in Yogyakarta concerning the regulation of copyright protection, and what are the efforts taken by the dance artists in Yogyakarta in order to protect their creations. This research has the objectives of analyzing the form of legal protection regulated in Act Number 19 Year 2002 concerning Copyrights, describing the opinions of dance artists in Yogyakarta concerning the concept of dance art protection, and finding out the protective efforts conducted by dance artists of Yogyakarta in order to protect their dance creations.

The method of approach used in this research was the juridical-empirical approach, which is, a research conducted on the primary data first and then the secondary data are analyzed. The primary data were collected from interviews with some dance artists of Yogyakarta. This research used the *purposive sampling* method, in which, sample collection is conducted by selecting or taking subjects based on particular purposes. Data analysis was conducted by using the descriptive-qualitative method.

Principally, the existence of dance creation, grouped into 3 (three) categories, which are classical palace dance, traditional-societal dance, and new creation dance or contemporary dance, is protected by Act Number 19 Year 2002 concerning Copyrights. The dance artists in Yogyakarta said their opinions that it is necessary to provide a protection for their dance creations because, principally, they have opinions that appreciation and respect for creativity and intellectual creations of an artist wrestling with arts should also be appreciated and respected by the society. The efforts that have been taken by dance artists of Yogyakarta in order to protect their dance creations are by conducting documentation of their creations into dance descriptions and in form of recording tapes and compact discs. Meanwhile, the suggestion proposed by the writer is that, there is a necessity of socializing 2002 Copyrights Act as soon as possible in the dance artist community in Yogyakarta, considering that the dance artists, as one of subjects of 2002 Copyrights Act, have not realized and comprehended matters concerning copyrights and dance artists should hold collective meetings among fellow dance artists in order to discuss the importance of copyrights for them.

Keywords: *dance creation, dance artists of Yogyakarta, copyright protection*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
<i>ABTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERUMUSAN MASALAH	11
C. TUJUAN PENELITIAN.....	11
D. MANFAAT PENELITIAN	12
E. KERANGKA PEMIKIRAN.....	13
F. METODE PENELITIAN	33
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	43
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	45
A. TINJAUAN MENGENAI KARYA SENI TARI.....	45
A.1. Pengertian dan Ragam Seni.....	45
A.2. Pengertian dan Klasifikasi Tari	52
A.3. Tari Sebagai Karya Cipta.....	69
B. KEBUDAYAAN DAN FOLKLORE.....	72
B.1. Pengertian dan wujud Kebudayaan	72
B.2. Pengertian dan Ruanglingkup <i>Folklore</i>	77
B.3. Konsep Kepemilikan <i>Folklore</i>	83
B.4. Manfaat Perlindungan <i>Folklore</i>	85
C. TINJAUAN TERHADAP HAK CIPTA.....	87

C.1. Hak Cipta Pada Umumnya	87
a. Pengertian dan Sejarah Hak Cipta.....	87
b. Objek Hak Cipta	98
c. Hak Cipta Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual	103
C.2. Ruanglingkup dan Konsep Kepemilikan dalam Hak Cipta	106
a. Ruang Lingkup Hak Cipta	106
b. Konsepi Kepemilikan Hak dalam Hak Cipta	111
D. SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA	116
D.1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	116
D.2. Sistem Perlindungan Hak Cipta	119
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	123
A. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA SENI TARI DI DALAM UNDANG – UNDANG NO 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA	123
A.1. Ragam Dan Proses Penciptaan Tari	123
A.1.1. Prinsip Perlindungan Karya Cipta Menurut Undang – undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	135
A.2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Karya Cipta Seni Tari menurut Undang – undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	154
A.2.1. Perlindungan Hukum Karya Cipta Seni Tari Menurut Undang – undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta	154

B. PENDAPAT SENIMAN TARI DI YOGYAKARTA TERHADAP PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA SENI TARI DI DALAM UNDANG – UNDANG HAK CIPTA NO 19 TAHUN 20002	194
B.1. Pengertian dan Orisinalitas Tari Menurut Seniman Tari Di Yogyakarta	194
B.2. Pendapat Seniman Tari di Yogyakarta Terhadap Pengaturan Perlindungan Hak Cipta Seni Tari di Dalam Undang – undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002	203
C. UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH SENIMAN TARI DI YOGYAKARTA DALAM MELINDUNGI KARYA CIPTA SENI TARI MEREKA	229
C.1. Pengaturan Karya Cipta Seni Tari Menurut Undang – undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta	229
C.2. Upaya Perlindungan Karya Cipta Seni Tari Di Kalangan Seniman Tari di Yogyakarta	241
BAB IV PENUTUP.....	253
A. SIMPULAN.....	253
B. SARAN.....	254
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

TABEL 1. PEMBAGIAN TARI..... 133

TABEL 2. PERLINDUNGAN KARYA CIPTA SENI TARI

BERDASARKAN LINGKUP OBJEK

PERLINDUNGANNYA..... 163

TABEL 3. PERLINDUNGAN KARYA CIPTA SENI TARI

BERDASARKAN JANGKA WAKTU

PERLINDUNGANNYA..... 172

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya, Faza Novrisal, SH. menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, Juni 2009

Penulis

Faza Novrisal, SH
NIM B4A 007 087

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang paling sempurna. Pada diri manusia dilengkapi dengan akal budi yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan lainnya. Dengan akal budi manusia mampu menciptakan berbagai macam kreasi dalam berbagai bidang kehidupan. Bidang kreatifitas tersebut dapat terjadi pada bidang – bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi, bisnis.¹

Karya seni merupakan salah satu perwujudan kreasi manusia melalui akal budinya mengekspresikan sesuatu keindahan yang ia lihat dan rasakan dalam hatinya, dan kemudian diwujudkan dalam bentuk suatu karya nyata, misalnya lagu, puisi, gerakan tubuh (tari) yang indah dan karya cipta yang lainnya. Hasil kreatifitas ini merupakan proses olah budi manusia yang menghasilkan suatu bentuk karya nyata tersebut biasa disebut dengan karya cipta yang didalamnya terdapat hak bagi si pencipta atau pembuatnya, yang sering kita sebut dan kita kenal dengan Hak Cipta.

Seni menghasilkan suatu karya seni dengan melalui proses penciptaan yang disebut juga proses kreatif, yaitu rangkaian kegiatan seorang seniman dalam menciptakan dan melahirkan karya – karya

¹Budi Santoso, *Dekonstruksi Hak Cipta*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008, hal, 19.

seninya sebagai ungkapan gagasan dan keinginannya. Proses penciptaan ini tidak terjadi dan diturunkan dari ruang kosong. Tapi pada hakikatnya hanyalah usaha memodifikasi (mengubah/menyesuaikan) sesuatu yang telah ada sebelumnya.²

Seni tari merupakan hasil kreatifitas manusia melalui olah pikir budinya yang terwujudkan melalui gerakan tubuh yang memiliki makna estetik dengan iringan musik yang menambah keindahan dari sebuah tari tersebut. Seni tari merupakan seni pertunjukan yang biasanya dimainkan oleh banyak orang melalui gerakan tubuh dengan menggunakan kostum atau pakain yang khas merupakan suatu kesatuan yang utuh.

Seni tari sebagai salah satu bentuk kreasi manusia melalui pengalamannya atas sesuatu yang ia lihat tentang keindahan yang ada di alam ini. Tari merupakan kreatifitas universal seseorang dan tari berfungsi sebagai kekuatan sentral dan vital untuk menunjukkan serta membentuk gaya hidup dalam masyarakat tertentu.³

Seni tari telah mengakar lama pada kebudayaan lokal di wilayah yang kini dikenal sebagai Indonesia. Tradisi dan presentasi tubuh yang menari telah muncul di ruang – ruang ritual/sakral, sosial maupun panggung pertunjukan masyarakat sejak lama mulai dari upacara – upacara keagamaan di pura – pura Hindhu di Bali, hajatan

²Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto. *Teori-teori Kebudayaan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007. hal 7

³Arifni Netrirosa, *Tari Kelompok “Berubah”*, <http://library.usu.ac.id>, (diakses tanggal 16 Desember 2008).

perkawinan atau sunatan di unit – unit keluarga lokal hingga pertunjukan ‘modern’ ala *wayang wong* Sriwedari. Tari berkait erat dengan kebudayaan dan identitas etnik yang beragam jumlahnya di Nusantara dengan konteks penciptaan dan pemaknaan yang begitu beragam.⁴

Pada perkembangannya seni tari juga telah banyak mengalami suatu kreasi baru, dan biasanya seni tari kreasi ini berakar pada seni tradisional sebagai patronnya dalam pembuatan seni tari kreasi. Banyak sekali seni tari kreasi yang telah diciptakan oleh para seniman tari di Indonesia, misalnya Tari Mbagong, Tari Kuda – kuda, serta tari – tari lainnya yang diciptakan oleh para seniman tari. Tari – tari kreasi juga merupakan modifikasi dari para seniman yang merupakan suatu langkah dan upaya untuk melestarikan dan mengembangkan kesenian tari itu sendiri.

Kemampuan “mencipta”⁵ inilah yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang berkebudayaan. Manusia yang memiliki kesadaran untuk mengembangkan kebiasaan hidup, saling berhubungan satu sama lain, dan mampu menyimpan pengalaman atau pengetahuannya sehingga dapat diketahui dan dialami oleh

⁴Helly Minarti, *Mencari Tari Modern/ Kontemporer Indonesia*, <http://library.usu.ac.id>, (diakses tanggal 16 Desember 2008).

⁵Mencipta diberi tanda kutip menunjukkan bahwa mencipta hanyalah suatu istilah bagi hal-hal baru yang dibuat oleh manusia karena sesungguhnya manusia hanya menyampaikan/memodifikasi/menemukan apa yang sudah ada di alam ini yang sudah diciptakan oleh Allah SWT

generasi – generasi berikutnya. Termasuk juga pengalaman estetikanya yang dijemakan dalam (ke)seni(an).

Kesenian sebagai hasil proses kreatif manusia terbagi atas beberapa macam bentuk, kita dapat membaginya dalam kesenian tradisional dan kesenian modern, atau seni rupa dengan seni suara dan gerak, atau kita pun dapat membaginya dengan katagori yang kita buat sendiri karena seni itu sangat luas dan saling berkaitan satu sama lain sehingga memungkinkan bagi kita untuk membagi katagori seni dengan katagori yang kita buat sendiri berdasarkan kesamaan dan perbedaan dari hasil keterkaitan itu.

Ciptaan merupakan hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Untuk pencarian ide dalam sebuah karya seni seseorang bisa mendapatkannya dari pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain. Setiap karya seni adalah suatu loncatan imajinasi yang tidak terduga, ia lahir sebagai suatu wawasan yang tidak terikat pada pembatasan apapun.⁶

Hasil kreatifitas intelektual manusia tersebut dalam perkembangannya menumbuhkan kebutuhan lain, yaitu kebutuhan untuk memperoleh perlindungan. Kebutuhan akan adanya perlindungan merupakan hal yang wajar sebagai penghormatan agar

⁶ *Loc Cit.*

hasil kreatifitasnya diakui, dihormati, serta dapat dipertahankan dari pihak lain dari tindakan melawan hak – haknya.⁷

Dalam konteks hukum, karya seni merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI), dan HKI merupakan suatu hak yang timbul akibat adanya tindakan kreatif manusia yang menghasilkan karya – karya inovatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia. Hukum memberikan perlindungan terhadap seniman dan karyanya yang lahir dari sebuah proses penciptaan; daya intelektual, karsa, dan rasa sang seniman.⁸

Di Indonesia pengaturan perlindungan karya cipta seseorang baik di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra di atur di dalam Undang – Undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang – undang Hak Cipta No 19 tahun 2002 ini dimaksudkan untuk bertujuan melindungi karya seni yang diciptakan oleh para seniman, melindungi karya intelektual yang diciptakan oleh ilmuwan. Mengingat bahwa hasil olah pikir dan budi tersebut tidaklah singkat dan menghabiskan tenaga dan energi serta biaya yang tidak sedikit jumlahnya.

Seni tari sebagai hasil kreatifitas manusia dan sebagai salah satu kebudayaan bangsa Indonesia pada dasarnya juga memerlukan suatu perlindungan hukum, mengingat seni tari merupakan hasil kreatifitas seniman tari dan dapat dikatakan sebagai suatu kekayaan intelektual bagi seniman. Dikatakan sebagai kekayaan intelektual

⁷Budi Santoso, *Op Cit*, hal 7.

⁸Andinta Erlinayanti, Jurnal Pemuda Indonesia : *Hak Cipta Karya Seni Milik Siapa?*, www.google.com (diakses tanggal 16 Desember 2008).

karena proses penciptaan sebuah tarian memerlukan tenaga dan pikiran yang mendalam serta menghabiskan biaya yang tidak sedikit .

Tari merupakan salah satu hasil kreatifitas manusia di bidang karya seni, tari merupakan salah satu karya pertunjukan yang di lindungi oleh Undang – undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang terdapat di dalam Pasal 12 dan Pasal 10 ayat (2). Pasal 12 ayat (1) memberikan perlindungan terhadap karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, untuk karya seni tari disebutkan di dalam huruf (e). Sedangkan Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.

Upaya Pemerintah melindungi *folklore* dan hasil kebudayaan rakyat lain, dalam hal ini mencakup juga seni tari yang tidak diketahui penciptanya adalah dalam rangka mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin Negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut.

Seni tari kreasi sebagai hasil kreatifitas seniman dan seni tari tradisional sebagai salah satu bentuk kebudayaan bangsa Indonesia dalam hubungannya dengan kepemilikan hak yang telah diatur di

dalam Undang – undang hak cipta Indonesia merupakan sebagai salah satu bentuk penjaminan hukum terhadap kreatifitas para seniman untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu. Wujud perlindungan ini merupakan kepentingan pemilik hak cipta dalam hal ini adalah hak cipta atas karya seni tari baik secara individual maupun kelompok sebagai subjek hak.

Hak cipta merupakan istilah hukum untuk menyebut atau menamakan hasil kreasi atau karya cipta manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Istilah tersebut adalah terjemahan dari Inggris, yaitu *copyright*, yang padanan dalam bahasa Belanda adalah *auteur recht*. Para pihak yang terkait langsung dengan hak cipta adalah kaum ilmuwan, sastrawan, dan seniman.⁹

Sebagian dari institusi hukum mengenai *hak cipta (copy right)* bertujuan melindungi karya seni yang diciptakan oleh para seniman. Bentuk - bentuk karya seni tersebut meliputi; ciptaan lagu dan musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan dan rekaman suara; drama, tari termasuk karawitan dan rekaman suara, drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomim, karya – karya yang tidak diketahui penciptanya hak ciptanya berada di tangan negara.¹⁰

Suatu karya pada prinsipnya terdiri dari dua unsur, yaitu unsur Pencipta dan Ciptaan atau hasil ciptaan. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama yang atas inspirasinya

⁹Salman Luthan, “*Delik – delik hak Cipta*”, Makalah Diskusi Dosen Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 1989, hal 1

¹⁰*Loc Cit.*

melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Sedangkan ciptaan merupakan hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Pasal 1 ayat 2 Undang – undang hak Cipta No. 19 tahun 2002 mendefinisikan pencipta atau pengarang sebagai seseorang yang memiliki inspirasi dan dengan inspirasi tersebut menghasilkan karya yang berdasarkan kemampuan intelektual, imajinasi, ketrampilan, keahlian mereka dan diwujudkan dalam bentuk karya yang memiliki sifat dasar pribadi mereka.

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku. Hak cipta tersebut melekat pada diri seseorang pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga lahirlah dari hak cipta tersebut hak – hak ekonomi (*economic rights*) dan hak – hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi merupakan hak untuk mengeksploitasi yaitu hak untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan, sedangkan hak moral merupakan hak yang berisi

larangan untuk melakukan perubahan terhadap: isi ciptaan, judul ciptaan, nama pencipta, dan ciptaan itu sendiri.¹¹

Undang – undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002 juga mengakui dimensi moral dari karya itu lahir bukan hanya atas dasar kepentingan ekonomi tetapi merupakan ekspresi dari eksistensi sang seniman sebagai manusia yang dilindungi hak asasi manusianya (HAM) secara universal sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan.

Pada prinsipnya bahwa tujuan hukum hak cipta adalah menyalurkan kreatifitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas. Namun, kenyataannya di Indonesia kreasi para seniman secara hukum belum dihargai sebagaimana mestinya oleh masyarakat maupun kalangan seniman itu sendiri. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain HKI sebagai sebuah institusi hukum dirasakan belum mampu melindungi kepentingan hukum para seniman. Atau boleh jadi seniman itu sendiri merasa tidak "membutuhkan" perlindungan HKI. Dalam hal ini tampaknya sang seniman lebih memandang keberadaan HKI hanya dari aspek kepentingan moralitas dirinya ketimbang keuntungan ekonomis.

Penyebab lain walaupun seorang seniman mengetahui karyanya "digagahi" ataupun dimanfaatkan oleh orang lain, namun ia tidak berdaya untuk mempertahankan haknya karena minimnya

¹¹Edy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, UU Hak Cipta 1997, dan Perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitan*, Bandung: Alumni, 1999, hal 62-63.

pengetahuan para seniman tentang hukum khususnya mengenai hak cipta. Meskipun secara fiksi hukum masyarakat dianggap mengetahui isi Undang – undang Hak Cipta, namun dalam kenyataannya pengaturan tentang hak cipta masih belum memasyarakat. Khususnya di kalangan seniman banyak di antara mereka yang belum memahami hak dan kewajiban yang berkaitan dengan HKI. Masalah yang menyangkut komponen seniman yaitu kendala budaya. Seniman di Indonesia pada umumnya bersikap religius dan tradisional. Mereka menganggap kemampuan kesenian yang dimilikinya merupakan pemberian Tuhan dan merupakan heriditas tradisi yang diturunkan oleh lingkungan budaya kolektivisme.

Berdasarkan keterangan yang telah di uraikan di atas, jelaslah bahwa eksistensi seni tari yang merupakan seni pertunjukan yang merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia dan juga sebagai wujud kreasi dari seseorang dalam hal ini adalah hasil kreasi dari seorang seniman pada hakikatnya mendapatkan perlindungan hukum atas terjadinya peniruan atau plagiat dari orang lain serta pengakuan orang lain yang sebenarnya bukanlah pencipta. Namun dalam perkembangannya ada sikap – sikap dari seniman yang memandang bahwa peniruan suatu hasil kreasi atau hasil ciptaannya itu adalah tidak perlu dirisaukan. Hal demikian merupakan topik yang cukup menarik untuk dikaji lebih mendalam melalui kegiatan penelitian seperti yang penulis laksanakan ini.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka perlu dirumuskan suatu permasalahan yang disusun secara sistematis, sehingga memberikan gambaran yang jelas dari memudahkan pemahaman terhadap masalah yang diteliti. Kerlinger dalam bukunya Burhan Ashofa mendefinisikan masalah sebagai suatu pertanyaan yang dicoba untuk ditemukan jawabannya.¹² Dalam penelitian yang akan dilakukan, masalah – masalah yang akan dibahas dan dicoba ditemukan jawabannya adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum karya cipta seni tari dalam Undang – Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ?
2. Bagaimana pendapat seniman tari di Yogyakarta terhadap pengaturan perlindungan hak cipta seni tari ?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh seniman tari di Yogyakarta dalam melindungi karya cipta seni tari mereka ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang kemudian akan diolah dan dianalisis, sehingga pada akhirnya dapat diusulkan berbagai rekomendasi yang bertujuan untuk:

¹² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Utama, 1996, hal 118.

1. Mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diatur di dalam Undang – undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan pendapat seniman tari di Yogyakarta terhadap konsep perlindungan karya seni tari sebagai karya cipta mereka.
3. Mengetahui bagaimana upaya perlindungan yang dilakukan oleh seniman tari di Yogyakarta dalam melindungi karya seni tari mereka.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara teoritis dan praktis. Manfaat teoritis mengandung arti bahwa penelitian ini bermanfaat bagi pengkajian konseptual disiplin hukum (pengembangan hukum teoritis), sedangkan manfaat praktis mencakup kemanfaatan dari segi perwujudan hukum dalam kenyataan kehidupan yang konkret (pengembangan hukum praktis).

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan simbang ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum Hak Kekayaan Intelektual, dalam hal pemberian perlindungan terhadap karya cipta

b. Manfaat Praktis

Melalui hasil yang diperoleh dari penelitian ini, kita dapat melihat secara nyata bekerjanya hukum di masyarakat, sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi para pihak, baik itu para pencipta seni tari (seniman seni tari), pemerintah dan masyarakat sehingga perlindungan hukum terhadap karya seni terutama seni tari dapat terlindungi secara baik.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Kecerdasan intelektual masyarakat dalam suatu bangsa memang sangat ditentukan oleh seberapa jauh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh individu – individu dalam suatu Negara. Kreativitas manusia untuk melahirkan karya – karya intelektualitas yang bermutu seperti hasil penelitian, karya sastra dan karya seni yang bernilai tinggi serta apresiasi budaya yang memiliki kualitas seni yang tinggi tidak lahir begitu saja. Kelahirannya memerlukan “energi” dan tidak jarang diikuti dengan pengeluaran biaya – biaya yang besar.¹³

Hukum itu diciptakan untuk manusia, kaedah – kaedahnya yang berisi perintah, larangan, dan dikenakan itu ditujukan kepada anggota masyarakat. Selain itu mengatur hubungan antar anggota masyarakat, antar subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat

¹³H.OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2004, hal 56.

memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Pada dasarnya, yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum hanyalah manusia. Manusia oleh hukum diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum atau sebagai penyanggah hak dan kewajiban, apabila meninggal dunia maka hak dan kewajiban tersebut beralih ke ahli warisnya.¹⁴

Pasca Indonesia meratifikasi Persetujuan pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement the Establishing World Trade Organization*) melalui Undang – undang No. 7 Tahun 1994, maka Indonesia harus membentuk dan menyempurnakan hukum nasionalnya serta terikat dengan ketentuan – ketentuan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diatur dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)¹⁵. Salah satu lampiran dari persetujuan GATT tersebut adalah *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai persetujuan tentang Aspek – aspek Dagang Hak atas Kekayaan Intelektual.

Sebagai konsekuensi dari diratifikasinya Undang – undang No. 7 Tahun 1994, Indonesia telah menyempurnakan peraturan perundang – undangan di bidang HKI. Undang – undang No 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta telah diubah dengan Undang – undang No 12 tahun

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hal 52-53.

¹⁵Sebagai Negara peserta (Contracting State), Indonesia terikat seluruh kesepakatan WTO sesuai dengan asas pacta sunt servanda seperti yang terdapat dalam Pasal 26 Konvensi Wina yang berbunyi “*every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*”.

1997, dan pada Tahun 2002 telah diundangkan pula Undang – undang No19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Hukum Hak Cipta bertujuan melindungi ciptaan – ciptaan para Pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programmer computer dan sebagainya. Hak – hak para Pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta Pencipta.¹⁶

Hak cipta merupakan bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan hukum hak kekayaan intelektual (HKI). Istilah HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (selanjutnya disebut IPR) yang dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. IPR sendiri pada prinsipnya merupakan perlindungan hukum atas HKI yang kemudian dikembangkan menjadi suatu lembaga hukum yang disebut “*Intellectual Property Right*”.¹⁷

Konsep mengenai HKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati. Berdasarkan konsep tersebut, maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas karya yang telah dihasilkan

¹⁶Tim Landsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Penerbit Alumni, 2006, hal 96.

¹⁷Andriana Krisnawati dan Gazalba Saleh, *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal 13-14.

berupa perlindungan hukum bagi HKI. Tujuan pemberian perlindungan hukum ini untuk mendorong dan menumbuhkembangkan semangat berkarya dan mencipta.

Untuk mewujudkan iklim kondusif bagi peningkatan semangat gairah untuk menghasilkan kemampuan intelektual manusia, menumbuhkan suatu kebutuhan yaitu perlindungan hukum. Kebutuhan akan perlindungan hukum ini sebenarnya adalah wajar.¹⁸

Undang – undang Hak Cipta merupakan undang – undang yang mengatur tentang bagaimana perlindungan terhadap karya cipta seseorang, baik di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Undang – undang ini dibuat dengan semangat penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini dilakukan mengingat bahwa hasil olah budi dan intelektual manusia adalah sangat berarti dan harus dijunjung tinggi keberadaannya.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Thomas Aquino¹⁹ dalam bukunya *The Human Theologica* secara teoritis membedakan hukum dalam empat macam tipe;

1. Hukum Abadi (*Lex Aeterna*), pada hakikatnya adalah identik dengan akal Tuhan, sebagai pedoman yang abadi tentang kebijaksanaan Tuhan dalam mengatur seluruh ciptaannya.

¹⁸Edy Damian, *Op Cit*, hal 20.

¹⁹G.H Sabine, *History of Political Theory*, Henry Hold and Company, New York, 1954 diterjemahkan: Drs. Spewarno, *Teori – teori Politik I*, Penerbit Bina Cipta, 1977, hal 245-247; Baca juga Disertasi Thoga Hutagalung, *Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Filsafat Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945*, Universitas Padjajaran, 1995, hal 45.

2. Hukum Alam (*Lex Naturalis*) dapat digambarkan sebagai suatu refleksi dari akal Ketuhanan.
3. Hukum Ketuhanan (*Lex Divina*), pada dasarnya hukum Ketuhanan ini dimaksudkan sebagai wahyu dari Tuhan yang dijemakan pada kitab suci umat beragama.
4. Hukum Manusia (*Lex Humana*), yang dibuat oleh akal manusia untuk mengatur kepentingannya, tetapi bersumber dari hukum alam. Hukum manusia ini dapat dibagi atas *ius gentium* dan *ius civile*.

Teori Hukum Alam (*Lex Naturalis*) untuk selanjutnya mendapat tempat dalam konsep pemikiran para sarjana terkemuka yang menganut sistem Hukum Sipil yang mendasari sistem hukum nasional Indonesia dan berpengaruh dalam pengaturan hak cipta.²⁰

Berdasarkan pendapat Thomas Aquinas, maka John Locke, filsuf Inggris terkemuka pada abad XVIII, menjelaskan bahwa hukum hak cipta memberikan hak milik eksklusif kepada karya cipta seorang pencipta, hukum alam meminta individu untuk mengawasi karya – karyanya dan secara adil dikompensasikan untuk kontribusi masyarakat.²¹

Filosofi pentingnya diberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta bukan hanya didasarkan pada teori hukum alam, tetapi juga

²⁰Edy Damian, *Op Cit*, hal 27.

²¹Craig Joyce, William Patry, Marshall Leaffer & Peter Taszi, *Copyright Law Casebook Series*, New York: Fourth Edition, Matthew Bender & Company Incorporated, 1998, hal 58 dalam *ibid*.

dijustificasi oleh penganut utilitarian yang menekankan bahwa kecerdasan prinsip – prinsip ekonomi, maka perlindungan hak cipta sangat dibutuhkan dalam rangka untuk memberikan insentif bagi pencipta untuk menghasilkan karya ciptanya. Adanya semangat untuk mencipta maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²²

Menurut sistem hukum sipil, manusia mempunyai hak kekayaan intelektual yang alamiah yang merupakan produk olah pikir manusia. Ini berarti bahwa manusia mempunyai hak yang sifatnya alamiah atas produk yang materiil maupun immateriil yang berasal dari kerja intelektualnya dan harus diakui kepemilikannya. Jika konsep pemikiran yang demikian ini diterapkan pada hak cipta maka dapat dikatakan, bahwa teori tersebut di atas merupakan landasan yang paling hakiki yang dimiliki seorang pencipta yang karena kerja intelektualnya atau karena olah pikirannya menghasilkan ciptaan – ciptaan.²³

Ciptaan – ciptaan sebagai hasil olah pikir manusia, dan yang melekat secara alamiah sebagai suatu kekayaan si pencipta telah mendapat perlindungan hukum yang memadai, karena merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 27 Deklarasi Universal Hak – hak Asasi Manusia, sebagai berikut:²⁴

²² Marshal Leafer, *Understanding Copyright Law*, Matthew Bender & Company Incorporated, New York, 1998, hal 14.

²³ Edy Damian, *Op Cit*, hal 27-28.

²⁴ Lihat Edy Damian dalam *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, UU Hak Cipta 1997, dan Perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitan*, Bandung: Alumni, 1999, hal 28.

1. setiap orang mempunyai hak kemerdekaan berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakatnya, menikmati seni dan mengambil bagian dari kemajuan ilmu pengetahuan dan menarik manfaatnya.
2. setiap orang mempunyai hak memperoleh perlindungan atas kepentingan – kepentingan moral dan materiil yang merupakan hasil dari ciptaan – ciptaan seorang pencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Dengan adanya pengakuan secara universal ini, sudah tidak diragukan lagi bahwa suatu ciptaan mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia (*life worthy*) dan mempunyai nilai ekonomi sehingga menimbulkan adanya tiga macam konsepsi:²⁵

1. Konsep kekayaan;
2. Konsep hak;
3. Konsep perlindungan hukum.

Hukum memberikan penghargaan dan tempat yang tinggi kepada manusia sebagai makhluk pribadi, termasuk ciptaan – ciptaan yang dihasilkan dalam bentuk kekayaan yang merupakan benda yang tidak berwujud (*intangabel*). Dengan kata lain konsep mengenai penghargaan yang begitu eksklusif yang diberikan kepada seorang individu sebagai makhluk pribadi ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang

²⁵Edy Damian, *Op Cit*, hal 18.

berkemampuan mencipta pada hakikatnya tidaklah terlalu individualistic seperti yang dibayangkan orang.²⁶

Keberadaan dan peran orang – orang secara individual tidaklah dilenyapkan atau diabaikan sama sekali yang terbukti dari diberikannya penghormatan kepada hak – hak orang lain dan penghargaan oleh masyarakat kepada hasil karya seseorang serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.²⁷

Menurut Sunaryati Hartono, ada 4 (empat) prinsip dalam sistem HKI untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, yaitu sebagai berikut.²⁸

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak. Alasan melekatnya hak pada HKI adalah penciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya.

2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

HKI yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya, misalnya dalam bentuk pembayaran royalty terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptaannya.

3. Prinsip Kebudayaan (*the cultural argument*)

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan,

²⁶Edy Damian, *Op Cit*, hal 28.

²⁷Edy Damian, *Op Cit*, hal 29.

²⁸Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Binacipta, 1982, hal 124.

peradaban, dan martabat manusia. Selain itu, akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa maupun Negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dilakukan dalam sistem HKI diharapkan mampu membangkitkan semangat, dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

4. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain sama – sama terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan. Sistem HKI dalam memberikan perlindungan kepada pencipta, tidak boleh diberikan semata – mata untuk memenuhi kepentingan individu atau persekutuan atau kesatuan itu saja, melainkan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi social dan lisensi wajib dalam Undang – undang Hak Cipta Indonesia.

Kerangka dasar pemikiran diberikannya kepada seorang individu perlindungan hukum terhadap ciptaannya bermula dari teori yang tidak lepas dari dominasi pemikiran Mazhab atau Doktrin Hukum Alam yang menekankan pada factor manusia dan penggunaan akal seperti yang dikenal dalam Sistem Hukum Sipil (*Civil Law System*) yang merupakan sistem hukum yang dipakai di Indonesia.²⁹

Di Indonesia yang mewarisi tradisi *Civil Law*, hak cipta dirumuskan sebagai hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu. Di dalam konsep *Civil Law System*, hak cipta merupakan *natural right justification* yang memandang hak cipta sebagai suatu hak – hak dasar yang diberikan kepada si pencipta tanpa melihat konsekuensi ekonomi dan politik yang lebih luas. Tujuan

²⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit: Alumni, 1958, hal 292.

hak cipta adalah memberikan *reward* (penghargaan) bagi si pencipta dan ini merupakan argument moral, merupakan *author's right system*, yaitu penekanan perlindungan personality pencipta melalui ciptaannya lebih dari pada perlindungan terhadap karya cipta itu sendiri.³⁰

Dalam sistem hukum di Indonesia, pengaturan tentang hak cipta ini merupakan bidang hukum perdata, yang termasuk dalam bagian hukum benda. Khusus mengenai hukum benda terdapat pengaturan tentang hak – hak kebendaan. Hak kebendaan itu sendiri terdiri atas hak kebendaan materiil dan hak kebendaan immateriil. Termasuk dalam hak kebendaan immateriil adalah Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*), yang terdiri atas hak cipta (*copyright*) dan hak milik industri (*industrial property right*).

Menurut Budi Santoso bahwa di dalam konsep hak cipta, pengakuan mengenai saat munculnya hak cipta telah ada pada saat selesainya karya cipta dibuat dalam bentuk nyata, sehingga bisa dilihat, didengar, atau dibaca.³¹

Hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang selalu mendasarkan pada Pancasila sebagai dasar Negara, maka dalam pembuatan aturan hukum adalah selalu mendasarkan kepada Pancasila. Pancasila sebagai dasar Negara yang terdiri dari 5 (lima) Pasal sebagai wujud pencerminan kepribadian bangsa Indonesia,

³⁰Rahni Jened, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs*, Surabaya: Yuridika Pres Fak. Hukum Unair Surabaya, 2001, hal 25-26.

³¹Lihat Budi Santoso dalam *Dekonstruksi Hak Cipta*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008, hal, 1.

adapun yang menjadi isi dari Pasal yang terkandung di dalam Pancasila yang salah satu Pasalnya berbunyi: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang merupakan bunyi Pasal kelima dari Pancasila. Dalam perumusan pengamalannya diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disingkat MPR) No. 11/MPR/1978 yang juga dinamakan Ekaprasetya Pancakarsa³² menjabarkan sila yang kelima ini sebagai berikut:

1. Mengembangkan perbuatan – perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong – royongan.
2. Bersikap adil;
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
4. Menghormati hak – hak orang lain;
5. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain;
6. Tidak bergaya hidup mewah;
7. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum;
8. Suka bekerja keras;
9. Menghargai hasil karya orang lain;
10. Bersama – sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Dengan demikian budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kerangka Pancasila sebagai ideology Negara tetap memandang dan menjadikan manusia, yang menurut kodratnya adalah makhluk Tuhan, sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk social.

³²Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Depdikbud, UUD '45-P4-GBHN-Tap – tap MPR 1983, Bahan Penataran dan Refernsi Peraturan, 1984, hal 295-299.

Sikap pandang yang demikian ini bertolak dari kesadaran tentang sifat kodrati manusia sebagai individu dan sekaligus makhluk sosial³³

Keberadaan dan peran orang – orang secara individual tidaklah dilenyapkan atau diabaikan sama sekali yang terbukti dari diberikannya penghormatan kepada hak – hak orang lain dan penghargaan oleh masyarakat kepada hasil karya seseorang serta menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban.³⁴

Menurut Hohfeld dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban diperlukan adanya *justifiable compromise*, yaitu perlu adanya keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara hak cipta seseorang yang perlu di lindungi secara individual dengan kepentingan masyarakat luas atau fungsi sosial hak cipta.³⁵

Menurut teori Hohfeld hak dan kewajiban berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan merupakan hubungan hukum. Dalam konteks pembicaraan kekayaan intelektual, yang dimaksud sebagai hak adalah suatu hak untuk melaksanakan sesuatu, seperti: memperbanyak suatu ciptaan karya tulis dalam wujud buku – buku

³³Filsuf Aristoteles, berfalsafah bahwa manusia sejak dilahirkan sampai wafat, hidup diantara sesama manusia lain, yaitu hidup dalam pergaulan antara manusia yang menjadikannya anggota masyarakat; manusia adalah *zoon politicon*. Falsafah ini dinyatakan secara lebih lugas oleh P.J. Bouman dengan kata – kata: manusia baru menjadi manusia setelah hidup dengan manusia lain. Manusia dan masyarakatnya merupakan suatu dwi tunggal yang tidak dapat dipisahkan. Jika falsafah tentang hubungan individu dengan masyarakat ini dilanjutkan lebih jauh lagi dengan hukum, maka terdapat kecocokan dengan falsafah yang dikemukakan filsuf kenamaan pada zaman Romawi bernama M.T. Cicero yang mengemukakan suatu slogan *ubi societas, ubi ius*.

³⁴Edy Damian, *Loc Cit.*

³⁵Lihat Edy Damian dalam *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, UU Hak Cipta 1997, dan Perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitan*, Bandung: Alumni, 1999, hal 36.

yang diterbitkan, merekam dan memperbanyak untuk dijual secara komersial suatu ciptaan lagu dalam wujud *compact disk* (cd). Hubungan hak – hak semacam ini dengan kewajiban, adalah kewajiban dari orang – orang lain yang bukan pencipta untuk tidak melanggar hak – hak yang dimiliki pencipta. Kewajiban pihak lain yang bukan pencipta, tetap timbul/eksis, apabila pihak lain yang bukan pencipta melakukan pelanggaran, walaupun si pelanggar tidak mengetahui adanya hak yang demikian pada seorang pencipta.³⁶

Si pencipta mempunyai hak – hak atas kekayaan yang dimilikinya, sehingga si pencipta mempunyai hak untuk melakukan perbuatan – perbuatan hukum tertentu atas kekayaan yang dimilikinya, misalnya melisensikan atau menyerahkan kekayaan yang berupa hak cipta ciptaan karya tulis seorang penulis kepada penerbit. Di pihak lain, orang lain mempunyai kewajiban untuk tidak melanggar hak – hak yang dimiliki pencipta. Hubungan hak – hak yang dimiliki pencipta dengan kewajiban yang timbul terhadap orang lain.³⁷

Untuk mewujudkan keseimbangan, keselerasan, dan keserasian antara hak cipta yang sifatnya khusus atau eksklusif (sebagai salah satu ciri individualisme yang banyak berkembang dan dianut dalam pemikiran dunia barat) dengan kepentingan masyarakat atau fungsi

³⁶Edy Damian, *Op Cit*, hal 36.

³⁷Edy Damian, *Op Cit*, hal 35.

sosialnya hak cipta, akan sangat dipengaruhi oleh peran hukum sebagai sarana pembangunan (hukum).³⁸

Tentang pembangunan hukum ini, Mochtar Kusumaatmadja³⁹ mempunyai pendapat dan pemikiran bahwasanya hukum adalah sarana bagi pembangunan dan sarana pembaharuan masyarakat. Pendapatnya yang demikian ini bertolak dari pandangan tentang fungsi hukum dalam masyarakat yang dapat dikembalikan pada pertanyaan dasar: apakah tujuan hukum itu?. Jawaban atas pertanyaan itu adalah bahwa: pada analisis terakhir tujuan pokok daripada hukum, apabila akan direduksi pada suatu hal saja, adalah ketertiban (*order*). Di samping ketertiban, tujuan lain daripada hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda – beda sisi dan ukurannya menurut kehidupan masyarakat dan zamannya. Untuk mencapai ketertiban dalam kehidupan masyarakat, diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antarmanusia dalam masyarakat. Yang penting sekali bukan saja bagi suatu kehidupan masyarakat teratur, tetapi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas – batas saat sekarang.⁴⁰

Selanjutnya Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan

³⁸Lihat Edy Damian dalam *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, UU Hak Cipta 1997, dan Perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitan*, Bandung: Alumni, 1999, hal 30.

³⁹Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep – konsep hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Penerbit PT Alumni, 2006, hal 3.

⁴⁰Mochtar Kusumaatmadja, *Ibid*, hal 4.

olehnya tidak mungkin mengembangkan bakat – bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal di dalam masyarakat tempat ia hidup.

Seni tari yang merupakan hasil kreatifitas manusia melalui olah pikir budinya yang terwujudkan melalui gerakan tubuh yang memiliki makna estetik dengan iringan musik yang menambah keindahan dari sebuah tari tersebut. Seni tari merupakan seni pertunjukan yang biasanya dimainkan oleh banyak orang melalui gerakan tubuh dan jari yang merupakan suatu satu kesatuan yang utuh.

Seni tari telah mengakar lama pada kebudayaan lokal di wilayah yang kini dikenal sebagai Indonesia. Tradisi dan presentasi tubuh yang menari telah muncul di ruang – ruang ritual/sakral, sosial maupun panggung pertunjukan masyarakat sejak lama mulai dari upacara – upacara keagamaan di Pura – Pura Hindhu di Bali, hajatan perkawinan atau sunatan di unit – unit keluarga lokal hingga pertunjukan ‘modern’ ala *wayang wong* Sriwedari. Tari berkait erat dengan kebudayaan dan identitas etnik yang beragam jumlahnya di Nusantara dengan konteks penciptaan dan pemaknaan yang begitu beragam.⁴¹

Kemampuan “mencipta”⁴² inilah yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang berkebudayaan. Yaitu yang memiliki kesadaran untuk mengembangkan kebiasaan hidup, saling berhubungan satu

⁴¹ *Loc. Cit.*

⁴² Mencipta diberi tanda kutip menunjukan bahwa mencipta hanyalah suatu istilah bagi hal-hal baru yang dibuat oleh manusia karena sesungguhnya manusia hanya menyampaikan/memodifikasi/menemukan apa yang sudah ada di alam ini yang sudah diciptakan oleh Allah SWT

sama lain, dan mampu menyimpan pengalaman atau pengetahuannya sehingga dapat diketahui dan dialami oleh generasi-generasi berikutnya. Termasuk juga pengalaman estetikanya yang dijemakan dalam (ke)seni(an).

Ernst Cassirer⁴³, salah seorang filsuf kebudayaan terbesar abad ke-20, maupun Clifford Geertz⁴⁴, salah seorang antropolog kenamaan, keduanya, mempermasalahkan hubungan antara manusia dan kebudayaan. Keduanya memandang manusia merupakan esensi dalam kebudayaan. Cassirer meletakkan kebudayaan sebagai usaha manusiawi untuk memahami diri sendiri dan mengatasi persoalan – persoalan melalui kreasi akal-budi dan penggunaan simbol – simbol. Bentuk – bentuk simbolis yang penting dari kehidupan manusia mendapat tekanan utama, salah satu di antaranya yang dianggap penting ialah seni.

Sedangkan menurut Geertz, untuk mendekati peristiwa sosial, perlulah seorang ilmuwan tidak sekadar mencari hubungan sebab – akibat, melainkan berupaya memahami makna yang dihayati dalam sebuah kebudayaan. Kebudayaan, masih menurut Geertz, adalah anyaman makna – makna, dan manusia adalah binatang yang terperangkap dalam jerat – jerat makna itu. Maka, kebudayaan bersifat semiotik dan kontekstual. Pendek kata, manusia, kemanusiaan,

⁴³Soediro Satoto, *Seni Sebagai Fokus Budaya*, makalah dalam Kongres Kebudayaan V Tahun 2003.

⁴⁴*Loc Cit*

memanusiakan manusia secara manusiawi, humanitas, merupakan tema – tema yang biasa dijadikan fokus garapan dalam berkesenian.

Kemampuan kreatif atau mencipta tersebut sesungguhnya bukanlah sesuatu yang istimewa. Karena pada dasarnya setiap manusia memiliki tiga kemampuan utama, yaitu kemampuan fisik, kemampuan rasio atau akal, dan kemampuan kreatif. Hanya perimbangannya saja yang berbeda – beda antara orang per orang.⁴⁵

Aliran struktural fungsional berpendapat bahwa tindakan seseorang dipengaruhi oleh nilai – nilai yang berlaku dalam masyarakat. Teori ini bertolak dari asumsi bahwa masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian – bagian yang menyatu dalam keseimbangan dan stabilitas. Dalam keadaan yang demikian, manusia tidak berada dalam keadaan yang bebas untuk melakukan tindakannya. Tindakan manusia secara normatif diatur dan dikendalikan oleh nilai – nilai dan standar – standar normatif bersama.⁴⁶ Dalam perspektif teori struktural fungsional, peranan nilai dan norma sangat penting terhadap tindakan seseorang. Oleh karena itu, menurut teori ini semua tindakan selalu berorientasi pada nilai yaitu terkait dengan standar normatif yang mengendalikan pikiran individu – individu⁴⁷.

⁴⁵Toto ST Radik, *Seni, Proses Kreatif, dan Sikap Seniman*, artikel rumahdunia.net, tanggal 21 Mei 2005

⁴⁶Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Terjemahan Robert M. Z. Lawang, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990, hal 99-123.

⁴⁷George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Terjemahan Alimandan, Jakarta: Rajawali Press, 1992, hal 25-30

Asumsi dasar bahwa nilai dan norma dalam masyarakat menentukan pilihan tindakan manusia sebagaimana dianut oleh teori struktural fungsional, dikutip oleh Giddens lewat teori strukturasinya. Menurut Giddens, pilihan tindakan manusia tidak selalu ditentukan oleh struktur sosialnya (nilai, norma, dan kebiasaan) tetapi manusia mempunyai kebiasaan menyimpang dari struktur.⁴⁸ Menurut tindakan ini yang dilakukan seseorang berkaitan dengan kegandaan struktur yang bersifat dualistis dan dialektikal tentang manusia. Bagi teori ini tindakan manusia pada satu sisi lain struktur – struktur masyarakat itu terbentuk karena adanya tindakan manusia.⁴⁹

Hukum menurut Satjipto Rahardjo tidak hanya berfungsi sebagai sarana *social control* tetapi juga hukum berperan untuk melaksanakan peraturan dalam kehidupan masyarakat (*social engineering*). Hukum sebagai sarana *social engineering* dimaksudkan bahwa hukum digunakan secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita – citakan atau untuk melakukan perubahan – perubahan yang diinginkan.⁵⁰

Sasaran yang hendak dicapai dalam proses *social engineering* adalah bagaimana mengarahkan tingkah laku orang atau masyarakat ke arah yang dikehendaki (oleh hukum).

⁴⁸George Ritzer, *Ibid*, hal 369-370.

⁴⁹Anthony Giddens, *Teori Srtukturasi untuk Analisis Sosial*, Terjemahan Adi Loka Sujono, Pasuruan: Pedati, 2003, hal 89.

⁵⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung: Tanpa Tahun

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga unsur⁵¹ yaitu substansi, struktur, dan budaya hukum, dari ketiga unsur tersebut yang paling menentukan dalam sistem hukum akan berjalan atau tidaknya adalah budaya hukumnya dan budaya masyarakatnya mencakup tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap hukum, juga tentang peranannya dalam hukum juga peranan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan hukum merupakan hak dari individu yang harus ditegakkan.

Substansi hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah peraturan – peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan – perbuatan serta hubungan – hubungan hukum, sedangkan komponen struktur merupakan institusi – institusi yang telah ditetapkan oleh substansi ketentuan hukum untuk melaksanakan, menegakkan, mempertahankan, dan menerapkan ketentuan – ketentuan hukum tersebut. Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan – ketentuan formalnya, yaitu memperlihatkan bagaimana pengadilan, perbuatan hukum, dan lain – lain badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh peraturan – peraturan hukum itu dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Sedangkan budaya hukum

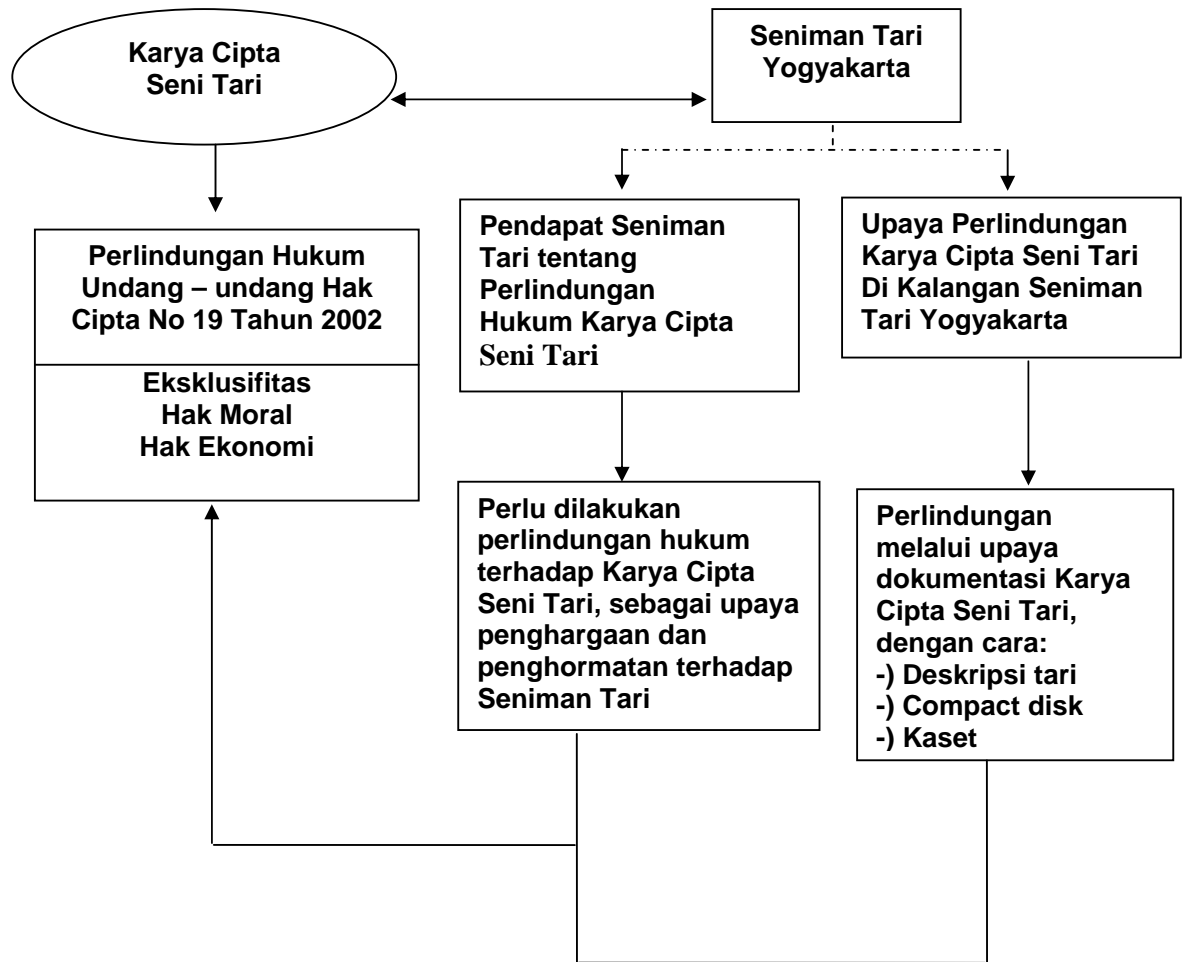
⁵¹Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective* New York. Russel Foundation, 1978, hal. 218-230.

mengacu kepada bagian – bagian dari budaya pada umumnya yang berupa kebiasaan, pendapat, cara – cara berperilaku dan berpikir yang mendukung atau menghindari hukum. Atau dengan kata lain, budaya hukum merupakan sikap dan nilai – nilai dari individu – individu dan kelompok – kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan – kepentingan (*interest*) yang kemudian diproses menjadi tuntutan – tuntutan (*demands*) berkaitan dengan hukum. Kepentingan dan tuntutan tersebut merupakan kekuatan social yang sangat menentukan berjalan atau tidaknya sistem hukum.⁵²

Pendapat Lawrence M. Friedman bahwa peraturan – peraturan hukum bisa tegak tergantung pada budaya hukum dan budaya masyarakat tergantung pada budaya masyarakat anggota – anggotanya, yang dipengaruhi oleh tradisi, latar belakang pendidikan, lingkungan budaya, posisi atau kedudukan dan kepentingan ekonomi. Budaya masyarakat disini adalah keseluruhan dari sikap – sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai yang ada dalam masyarakat akan menentukan bagaimana hukum itu berlaku dalam masyarakat dan hukum yang benar-benar diterima dan diperlukan oleh masyarakat ataupun oleh komunitas tertentu sangat ditentukan oleh budaya masyarakat komunitasnya.

Adapun lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan alur pemikiran, sebagai berikut :

⁵²Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Prespective New York*. Russel Foundation, 1978, hal. 15 dalam Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2005, hal 151.



F. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang berupaya untuk memperoleh pemecahan suatu masalah. Oleh karena itu, penelitian sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan adalah

bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, analisis dan konstuktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁵³

Di dalam penelitian hukum yang berjudul **PERLINDUNGAN KARYA CIPTA SENI TARI (Studi terhadap Konsep dan Upaya Perlindungan Hak Cipta Seni Tari di Kalangan Seniman Tari Yogyakarta)** diperlukan data yang akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian pada hakekatnya adalah merupakan usaha yang dilakukan dengan metode ilmiah. Pada setiap yang dinyatakan sebagai upaya ilmiah, maka pertanyaan dasar yang biasa diajukan sebagai tantangan terhadapnya adalah sistem dan metode yang digunakan.⁵⁴

Fungsi penelitian ini adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti yaitu mengenai bagaimana upaya seniman tari melindungi hak cipta karya seni tari mereka dan bagaimana konsep perlindungan hak cipta di kalangan seniman tari Yogyakarta. Hal – hal yang berkaitan dengan metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Metode penelitian dapat diartikan sebagai ilmu untuk mengungkapkan dan menerangkan gejala – gejala sosial dalam kehidupan manusia, dengan mempergunakan prosedur kerja yang

⁵³Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hal. 44

⁵⁴FX. Soebiyanto, *Perencanaan Riset dan Strateginya (Kursus Penyelenggaraan Metodologi Penelitian bagi Dosen)*, Undip, 1980, hal 2.

sistematis, teratur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, disebabkan penelitian ini bersifat ilmiah.⁵⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa kegiatan penelitian seseorang dari teori ke pemilihan metode, karena dalam proses inilah timbul preferensi seseorang terhadap teori – teori dan metode – metode tertentu. Pada hakekatnya metodologi tersebut memberikan pedoman tentang cara – cara mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan – lingkungan yang dihadapinya, sehingga diharapkan seseorang mampu menemukan, menentukan, dan menganalisa suatu masalah tertentu dan pada akhirnya diharapkan mampu menemukan solusi atas permasalahan tersebut.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan.⁵⁶ Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁵⁷

Aspek yuridis digunakan sebagai acuan dalam menilai atau menganalisa permasalahan berdasarkan aspek hukum yang berlaku yaitu dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum mengenai hak

⁵⁵H. Hadari Nawawi, Tanpa Tahun, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hal. 9.

⁵⁶Soerjono S dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta: 1985, hal. 1.

⁵⁷Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, Hal. 52.

cipta serta peraturan terkait di bawahnya yang mempunyai korelasi dengan penelitian ini.

Sedangkan pendekatan empiris yaitu dengan melakukan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung ke lapangan mengenai segala sesuatu yang terkait dengan bagaimana upaya perlindungan dan konsep hak cipta karya seni tari di kalangan seniman tari Yogyakarta.

Jadi pendekatan yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian dihubungkan dengan data dan perilaku yang hidup di tengah – tengah masyarakat langsung.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor – faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.⁵⁸

Suatu penelitian deskriptif menekankan pada penemuan fakta-fakta yang digambarkan sebagaimana keadaan sebenarnya, dan selanjutnya data maupun fakta tersebut diolah dan ditafsirkan.

⁵⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), Hlm. 35.

Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti, keadaan, atau gejala – gejala lainnya.⁵⁹ Dengan suatu penelitian yang deskriptif, maka hasil – hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai upaya perlindungan dan konsep hak cipta di kalangan seniman tari Yogyakarta. Dikatakan analitis karena terhadap data yang diperoleh selanjutnya akan dilakukan analisis dari aspek yuridis dan sosio ekonomis terhadap upaya yang dilakukan oleh seniman tari dalam upaya untuk melindungi hasil karya ciptanya.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer yang dihasilkan dari penelitian terjun ke lapangan yang diperoleh langsung dari komunitas Seniman Tari Yogyakarta. Adapun komunitas Seniman Tari Yogyakarta yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini adalah Seniman Tari Yogyakarta yang menggeluti seni tari yang bersifat Tradisional Klasik dan Seni tari Kontemporer atau Kreasi Baru berkaitan dengan pandangan seniman tari tentang perlindungan hukum karya seni tari, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan. Melalui studi kepustakaan ini diusahakan pengumpulan data dengan mempelajari buku – buku, majalah, surat kabar, artikel dari internet,

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, Hlm. 10.

serta referensi lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu Undang – undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta serta peraturan terkait di bawahnya dan ketentuan – ketentuan lain yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang akan diteliti.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti buku – buku referensi, hasil – hasil penelitian, karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk atau informasi, penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus bahasa, kamus ilmiah, surat kabar, media informasi dan komunikasi lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Bagaimana memperoleh data adalah persoalan yang khusus membicarakan teknik – teknik pengumpulan data. Apakah seorang peneliti akan menggunakan questioner, interview, observasi bisas, teset, eksperimen, koleksi atau metode lainnya atau kombinasi dari

beberapa metode itu, semuanya harus mempunyai dasar – dasar yang beralasan.⁶⁰

Di dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang sesuai dengan apa yang diharapkan, maka peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

1) Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan ini menghasilkan data sekunder. Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk membandingkan antara teori dan kenyataan di lapangan. Melalui studi kepustakaan ini diusahakan pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, tulisan-tulisan, surat kabar, artikel dari internet, serta referensi lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2) Penelitian Lapangan (*Field research*)

Penelitian lapangan ini menghasilkan data primer. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara (*interview*). Kegiatan wawancara dilakukan sebagai upaya untuk mengumpulkan data guna mendukung dan menunjang data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.⁶¹

⁶⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Research (Jilid I)*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983, hal 67.

⁶¹Rony Hanitijo Soemitro, *Op Cit*, hal 35.

Di dalam teknik pengumpulan data pada penelitian lapangan ada beberapa teknik wawancara, yaitu⁶²:

- a. Wawancara tidak terarah (*non directive interview*).
Disebut juga wawancara tidak terpimpin.
- b. Wawancara terarah (*directive interview*). Disebut juga wawancara terpimpin.
- c. Wawancara yang difokuskan (*focused interview*).
- d. Wawancara mendalam (*depth interview*).
- e. Wawancara yang diulang – ulang (*repeated interview*)

Teknik wawancara yang dipakai dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan – pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi – variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dengan menggunakan kuisioner.

Penelitian lapangan antara lain bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat seniman terhadap perlindungan hak cipta karya seni tari menurut Undang – Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002 dan upaya apa yang dilakukan oleh seniman tari di Yogyakarta dalam rangka melindungi karya cipta mereka.

⁶²Sutrisno Hadi, *Ibid*, hal 59-62.

5. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampling

Lokasi yang dipilih sebagai tempat untuk melakukan penelitian lapangan dalam rangka kajian ini adalah wilayah Yogyakarta. Selain pertimbangan biaya dan waktu, kedudukan Yogyakarta sebagai wilayah yang berkembang pesat di bidang kebudayaan terutama karya seninya, disamping itu kedudukan Yogyakarta sebagai salah satu pusat kesenian dan kebudayaan di Indonesia serta kota yang banyak menghasilkan seniman yang terkenal.

Populasi adalah seluruh objek, seluruh gejala, seluruh unit yang akan diteliti dalam penelitian ini. Oleh karena populasi sangat besar dan sangat luas maka tidak memungkinkan untuk diteliti seluruh populasi tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel untuk memberi gambaran yang tepat dan benar.⁶³ Populasi yang penulis gunakan sebagai sumber dalam penelitian ini adalah Seniman Tari di Yogyakarta sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan spesifikasi; seniman tari tradisional klasik dan seniman tari kontemporer atau kreasi baru.

Dalam penelitian ini pengambilan sampling menggunakan teknik *Non Random Sampling*, dengan metode *Purposive Sampling* yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara memilih atau mengambil subjek – subjek yang didasarkan pada tujuan – tujuan

⁶³Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*, hal. 36.

tertentu.⁶⁴ Adapun sampel yang penulis pergunakan adalah 5 (lima) orang seniman tari tradisional klasik dan 5 (lima) orang seniman tari kontemporer atau kreasi baru.

Teknik ini dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sample yang besar jumlahnya dan jauh letaknya. Disamping itu dengan diadakannya pengambilan sample dalam penelitian ini diharapkan bisa menjawab permasalahan yang sedang penulis teliti. Sedang berdasarkan objek dan subjek penelitian tersebut, maka responden yang ditentukan dalam penelitian ini adalah seniman tari di Yogyakarta dengan spesifikasi yang telah disebutkan di atas..

6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, karena pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis, atau lisan, dan perilaku nyata.⁶⁵

Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶⁶

⁶⁴*Loc.Cit.*

⁶⁵Soerjono Soekanto, *Op Cit.*, hal 32.

⁶⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung: 2004, hal. 3.

Semua data yang dibutuhkan baik data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh baik melalui wawancara maupun inventarisasi data tertulis yang ada, kemudian diolah dan disusun secara sistematis untuk dianalisa secara kualitatif. Sehingga dengan demikian analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang dapat disampaikan dalam bentuk deskriptif.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar segala pembahasan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dapat penulis jabarkan secara jelas dan mudah dipahami, maka dalam penyusunan tesis ini penulis menjabarkannya ke dalam bentuk sistematika penulisan.

Penulisan sistematika tesis tersebut akan disusun ke dalam empat bab yang menggambarkan pemikiran terhadap permasalahan yang menjadi focus tesis. Masing – masing bab terdiri dari beberapa sub bab, sebagai bagian dari pokok pikiran bab. Adapun sistematika tesis tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I, yaitu Pendahuluan, berusaha untuk memberikan gambaran secara umum terhadap permasalahan dan kerangka berpikir yang akan dipergunakan untuk mengkaji permasalahan yang menjadi focus tesis. Oleh karenanya, bagian pendahuluan ini disusun ke dalam urutan sub bab sebagai berikut: Latar belakang, Perumusan Masalah,

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II, yaitu Tinjauan Pustaka, berusaha untuk memberikan gambaran secara lebih mendalam terhadap kajian teoritis yang akan dipergunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari penelitian. Tinjauan Pustaka ini mencakup Tinjauan Mengenai Karya Seni Tari, Kebudayaan dan Folklor, Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Cipta, Sistem Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta.

BAB III, yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan, berusaha untuk melakukan pengkajian secara ilmiah terhadap data – data yang terkumpul selama penelitian dilakukan. Sub bab yang akan dipaparkan pada Bab III ini meliputi Perlindungan hukum terhadap karya seni tari yang di atur di dalam Undang – undang Hak Cipta dan Pendapat seniman tari di Yogyakarta terhadap konsep perlindungan hukum hak cipta karya seni tari mereka, serta upaya yang dilakukan oleh seniman tari di Yogyakarta dalam melindungi seni tari karya ciptanya.

BAB IV, yaitu Penutup, berisikan kesimpulan dan saran – saran, berusaha untuk merumuskan secara singkat dan padat terhadap analisis permasalahan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.

Bagian Akhir, berisi Daftar Pustaka

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN MENGENAI KARYA SENI TARI

A.1. Pengertian dan Ragam Seni

Seni berasal dari kata "*sani*" dalam bahasa sansekerta yang berarti pemujaan, pelayanan, donasi, permintaan atau pencarian dengan hormat dan jujur.⁶⁷ Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa istilah "seni" tersebut diambil dari bahasa Belanda "*genie*" atau jenius. Kedua asal kata itu memberikan gambaran yang jelas tentang aktivitas apa yang sekarang ini dibawakan oleh istilah tersebut, yaitu suatu pemujaan atau dedikasi, pelayanan, ataupun donasi yang dilaksanakan dengan hormat dan jujur yang untuk melakukannya diperlukan bakat dan kejeniusan.

Menurut kajian ilmu di Eropa menyebutnya "*ART*" (*artificial*) yang artinya adalah barang/atau karya dari sebuah kegiatan. Seni merupakan kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi (luar biasa).⁶⁸

Menurut sejarahnya,⁶⁹ seni atau karya seni sudah ada sejak 60.000 tahun yang lampau berdasarkan penelitian ahli sejarah yang menemukan dinding – dinding gua di Perancis Selatan terdapat

⁶⁷I Gusti Bagus Sugriwa, "*Dasar – dasar Kesenian Bali*", *Budaya*, 6/VI, Juni 1975, hal 219-223.

⁶⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hal 1038.

⁶⁹<http://www.senirupa.net/mod.php/mod=publisher&op=viewarticle&cid=6&artid=116>.

artefak dengan lukisan yang berupa torehan – torehan berwarna pada dinding yang menggambarkan kehidupan manusia purba. Artefak ini dapat disetarakan dengan lukisan modern yang penuh ekspresi, dan kebebasan mengubah bentuk. Satu hal yang membedakan antara karya seni manusia purba dengan manusia modern adalah letak pada tujuan penciptannya. Jika manusia purba membuat seni adalah semata – mata hanya untuk kepentingan sosio religi, dimana manusia purba adalah figure yang masih terkungkung oleh kekuatan – kekuatan di sekitarnya.⁷⁰

Sedangkan manusia modern membuat karya seni untuk kepuasan pribadinya dan menggambarkan kondisi lingkungannya. Dengan kata lain manusia modern adalah figure yang ingin menemukan hal – hal yang baru dan mempunyai cakrawala berfikir yang luas. Semua bentuk kesenian pada zaman dahulu selalu ditandai dengan kesadaran magis, karena memang demikian awal kebudayaan manusia. Dari kehidupan yang sederhana yang memuja alam sampai pada kesadaran terhadap keberadaan alam. Dengan demikian karya seni bermanfaat sebagai penanda zaman.⁷¹

Pada zaman dahulu seni diciptakan untuk kepentingan bersama atau milik bersama. Karya – karya seni yang ditinggalkan pada masa pra sejarah di gua – gua tidak pernah menunjukkan identitas pembuatnya. Demikian pula peninggalan – peninggalan dari masa

⁷⁰C.A van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1988, hal 55.

⁷¹C.A van Peursen, *Ibid*, hal 58.

lalu seperti bangunan atau artefak di Mesir kuno, Byzantium, Romawi, India, atau bahkan di Indonesia sendiri. Kalaupun ada penjelasan tertentu pada artefak tersebut hanya penjelasan yang menyatakan benda atau bangunan tersebut dibuat untuk siapa, itupun setelah zaman sejarah yang ditandai dengan mulai dikenalnya tulisan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kesenian pada zaman sebelum modern kesenian tidak beraspek individualis.

Gendhon Humardani mendefinisikan seni sebagai "wujud yang dibentuk atau dibuat dengan memperhatikan garapan mediumnya, tidak ditujukan untuk keperluan praktis, dan jangkauannya meliputi bentuk – bentuk 'pakai' sampai dengan bentuk – bentuk yang semata – mata untuk keperluan penghayatan".⁷² Dalam kesempatan yang lain juga dinyatakan bahwa "karya seni adalah hasil tindakan yang berwujud, yang merupakan ungkapan citra (keinginan, kehendak) ke dalam bentuk fisik yang dapat ditangkap dengan indera."⁷³

Menurut I Made Bandem seni adalah kegiatan yang terjadi oleh proses cipta, rasa dan karsa.⁷⁴ Sedangkan Leo Tolstoy mendefinisikan seni sebagai sarana komunikasi bagi emosi dan kita

⁷²Rustopo, *Gendhon Humardani, 'Sang Gladiator', Arsitek Kehidupan Seni Tradisi Modern*, Yogyakarta: Yayasan Mahavhira, hal 98.

⁷³*Loc Cit.*

⁷⁴I Made Bandem, *Kekhasan Penelitian Bidang Seni*, Ekspresi, Yogyakarta: Jurnal Institut Seni Indonesia Yogyakarta: Penciptaan Seni Ke Aras Hak Intelektual, 2005, vol 15, hal 240.

tahu bahwa komunikasi selalu memerlukan adanya komunikator, si seniman dan komunikan yaitu masyarakat ramai.⁷⁵

Sebagai penampilan ekspresi dari penciptanya, seni dapat digolongkan menjadi 4 (empat) golongan utama sebagai berikut,⁷⁶

1. seni pertunjukkan terdiri atas seni tari, seni karawitan, seni pedalangan, seni musik (barat), seni drama (teater), seni pencak silat, dan seni resitasi.
2. seni rupa terdiri dari seni lukis, seni patung, seni grafis, seni desain (desain interior, eksterior, komunikasi visual), seni instalasi, seni kria (kria kayu, kulit, logam, tekstil, batu, dan keramik).
3. seni media rekam terdiri atas fotografi, video, dan film (sinematografi).
4. seni sastra meliputi seni prosa, seni puisi, dan folklor.

Seni memiliki 2 (dua) aspek yang sangat berbeda. Di satu sisi seni bersifat tradisional, mengacu pada apa yang sudah ada, sedangkan sementara di sisi lain, seni merindukan kreasi dan inovasi⁷⁷, selalu mengejar apa – apa yang belum pernah ada. Sisi

⁷⁵Sodarlo Sp, *Trilogi Seni: Penciptaan Eksistensi dan Kegunaan Seni*, Yogyakarta: Badan Penerbit Institut Seni Indonesia Yogyakarta, 2006, hal 124.

⁷⁶*Loc Cit.*

⁷⁷Ada yang membuat pembedaan antara pemakaian istilah kreasi dan inovasi, yaitu bahwa kreasi adalah penciptaan dalam seni dan sementara inovasi adalah penemuan dalam ilmu pengetahuan. Penulis tidak membedakannya, Lihat Sodarlo Sp, dalam *Trilogi Seni: Penciptaan Eksistensi dan Kegunaan Seni*, Yogyakarta: Badan Penerbit Institut Seni Indonesia Yogyakarta, 2006, hal 71.

seni yang satu ini selalu mendambakan *novelty*, yaitu sesuatu yang baru.

Seni tradisi adalah seni yang stereotip, taat asas, memegang teguh *pakem* atau ketentuan yang ada sehingga kreatifitas hampir – hampir tidak diperlukan, sedang sementara ini seni modern adalah seni yang haus akan perubahan, yang amat menghargai inovasi dan kreasi.⁷⁸ Adapun seni modern adalah jenis seni yang benar – benar berbeda secara diametral dengan seni tradisi, seni modern tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, juga oleh ikatan tradisi (*the spirit of the race*) atau ikatan zaman (*the spirit of the age*), demikian pula oleh ketentuan – ketentuan tentang isi atau temanya.⁷⁹

Para sejarawan berpendapat bahwa fungsi individualistis dari seni mulai tampak sejak memasuki zaman modern. Hal ini terjadi karena mengikuti pola pikir manusia yang ingin mencari kebaruan dan membuat perubahan. Dapat digambarkan, dalam sejarah seni terjadi banyak pergeseran. Sejak *renaisans* atau bahkan sebelumnya, basis – basis ritual dan kultur tari karya seni mulai terancam akibat sekularisasi masyarakat. Situasi keterancaman itu mendorong seni akhirnya mulai mencari otonomi dan mulai bangkit pemujaan sekular atas keindahan itu sendiri. Dengan kata lain fungsi seni menjadi media ekspresi, dan setiap kegiatan berkesenian adalah berupa kegiatan ekspresi kreatif, dan setiap karya seni

⁷⁸ *Loc Cit.*

⁷⁹ Sodarso Sp, *Sejarah Perkembangan Seni Rupa Modern*, Jakarta: CV Delapan puluh Enterprise bekerjasama dengan Badan Penerbit ISI Yogyakarta, 2000, hal 4.

merupakan bentuk yang baru, yang unik dan orisinal. Karena sifatnya yang bebas dan orisinal akhirnya posisi karya seni menjadi individualistis.⁸⁰

Perkembangan seni pada zaman modern mengalami perubahan atau pembagian yakni seni dan seni terapan. Seni terapan merupakan seni desain yang lebih jauh lagi oleh seorang tokoh pemikir kesenian bernama Theodor Adorno di beri nama "seni tinggi" untuk seni murni dan "seni rendah" untuk seni terapan atau desain. Karena menurutnya dalam seni tinggi seorang seniman tidak dipengaruhi oleh faktor – faktor eksternal (kebutuhan pasar/bertujuan komersial) dalam menciptakan sebuah karya seni/murni ekspresi, sedangkan seni rupa rendah adalah seni yang dalam penciptannya dipengaruhi oleh faktor – faktor eksternal. Adorno menganggap seni harus berbeda dengan benda lain (barang); ia harus mempunyai "sesuatu". Sesuatu itu tidak sekedar menjadi sebuah komoditas. Karena sebuah karya atau benda yang sebagai komoditas akan menghancurkan semangat sosial, pola produksi barang yang menjadi komoditas adalah pola yang ditentukan dari atas seorang produsen.

Kemudian pada zaman Post modern/kontemporer, di zaman kontemporer ini bentuk lebih banyak perubahannya baik secara kebendaan atau kajian estetikanya, yang lebih dahsyat lagi landasan logikanya. Sebagai gambaran, di era kontemporer karya seni tidak

⁸⁰C.A van Peursen, *Ibid*, hal 65.

lagi harus menyenangkan atau mempertimbangkan etika sosial, etika agama atau etika lainnya. Adi Wicaksono, seorang kritikus seni dari Yogyakarta berpendapat bahwa kondisi tersebut disebabkan karena seniman sudah jenuh pada beberapa hal:

1. lingkungan atau sesuatu yang telah ada;
2. perlakuan pasar kapitalisme yang terlalu radikal terhadap karya seni. Karya seni senantiasa dinilai dengan nominal. Padahal karya seni tu sebelum dinilai adalah "nol". Selebihnya adalah makna, ide, representasi, rekreasi, acuna etik, dokumentasi "politik" dan "sejarah", perlawanan, luka, kekecewaan, paradigma, atau sekedar main – mian belaka.
3. kritikus, yang mendalam kritiknya memberikan pemaknaan yang menjadikan esensi pesan dari karya seni tidak tersampaikan.

Seni menurut Soedarso Sp dikelompokkan menjadi empat yaitu seni rupa, seni suara, seni pertunjukan atau seni rupa-rungu dan seni sastra. Klasifikasi ini mengandung ketidaktepatan dalam hubungannya dengan dasar indera yang dipakai, yaitu masuknya seni sastra, walaupun dapat juga dikatakan bahwa seni sastra adalah seni rupa (kalau dibaca dalam hati) dan sekaligus seni suara (kalau dibaca keras – keras taau dibacakan). Namun hakikatnya atau fitrah seni sastra memang lain; kalau dibaca dalam hati bukan 'keindahan'

huruf – hurufnya yang dinilai oleh mata tetapi kebolehan isinya (walaupun sekarang ada sajak visual yang memperhitungkan bentuknya), dan kalau dibaca secara keras, apabila tidak didengarkan tetap juga isinya yang berbicara.⁸¹

A.2. Pengertian dan Klasifikasi Tari

Sebelum kita membahas tentang pengertian seni tari, maka akan diterangkan dulu tentang sejarah tari. Belum banyak diketahui sejarah seni tari di tanah air kita. Namun relief – relief candi dan kesusasteraan Jawa kuno abad XI yang mendeskripsikan pertunjukan tari jawa serta sedikit banyak musafir Arab dan Eropa juga menyinggung tari dalam buku perjalanannya. Menurut mitos Jawa, tampak seperti gamelan, diciptakan oleh Batara Guru. Dari sudut bentuk dan perwujudannya perkembangan tari di Indonesia dapat dibagi atas lima tahap, yaitu:⁸²

- 1) Tahap kehidupan terpencil dalam wilayah – wilayah etnik,
- 2) Tahap masuknya pengaruh – pengaruh luar sebagai unsure asing,
- 3) Tahap penemuan secara sengaja batas – batas kesukuan, sehubungan dengan tampilnya nasionalisme Indonesia,
- 4) Tahap gagasan mengenai pengembangan tari untuk taraf nasional, dan

⁸¹Sodarto Sp, *Ibid*, hal 97.

⁸²Lihat Tim Lembaga Research Kebudayaan Nasional (LRKN) LIPI, *Kapita Selekta Manifestasi Budaya Indonesia*, Jakarta: LRKN LIPI, 1984, hal 117.

- 5) Tahap kedewasaan baru yang ditandai oleh pencaharian nilai – nilai di dalam tari itu sendiri.

Ciri khusus tarian Indonesia menurut Claire Holt adalah terikat dengan tanah dan tidak menjauhinya. Posisinya duduk, berlutut, membungkuk ataupun setengah bungkuk. Kaki dan tangan sama pentingnya, bahkan jari – jari tangan pun dianggap penting. Barangkali pentingnya jari – jari ini adalah pengaruh dari India. Selendang juga sering muncul. Biasanya diletakkan di bahu dan dipegang oleh jari tangan. Hal ini tampak dengan jelas pada tarian di Bali, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan.⁸³

Belum pernah ada penghitungan terperinci tentang jumlah dan jenis tari – tari yang terdapat di seluruh tanah air kita. Namun dari sikap masing – masing barangkali klasifikasi yang diperkenalkan oleh Edy Sedyawati dapat dipakai sebagai pegangan untuk keperluan praktis. Secara keseluruhan tari itu dapat dibagi atas tiga kelompok besar, yaitu,⁸⁴ tari sepenuhnya yang dapat dibagi atas dua golongan, yaitu;

- 1) Yang tak mengandung cerita
- 2) Yang mengandung cerita

Tari yang terpadu dengan unsur seni lain

- a) Terpadu dengan dialog

⁸³Tim Lembaga Research Kebudayaan Nasional (LRKN) LIPI, *Kapita Selekta Manifestasi Budaya Indonesia*, Jakarta: LRKN LIPI, 1984, hal 118.

⁸⁴Edy Sedyawati, *Pertumbuhan Seni Pertunjukan*, Jakarta: Sinar harapan, 1998, hal 55.

- b) Terpadu dengan nyanyian
- c) Terpadu dengan dialog dan nyanyian

Tari yang terpadu dengan permainan

- a) Dengan akrobatik
- b) Dengan demonstrasi kekebalan
- c) Dengan sulapan.

Dilihat dari asal perkembangannya dan kelompok sosial yang memeliharanya tari sepenuhnya dapat digolongkan ke dalam tari keraton dan tari rakyat (*folk dance*).⁸⁵

Sebagian besar orang, sekalipun awam dalam hal “tari” secara garis besar mengerti apa yang dimaksud seni tari itu. Apabila ditanya apakah tari itu, mereka akan menjawab bahwa seni tari adalah ciptaan manusia berupa gerak – gerak ritmis yang indah. Itulah rata – rata jawaban singkat yang terlontar dari setiap orang.⁸⁶

Tari secara tekstual sering dipahami sebagai seni plastis dari gerak secara visual tampak sepiantas, akan tetapi didalamnya terkandung suatu ekspresi budaya dari nilai pengetahuan, sikap dan dasar keyakinan seseorang sebagai bagian dari kelompok

⁸⁵Tim Lembaga Research Kebudayaan Nasional (LRKN) LIPI, *Ibid*, hal 119.

⁸⁶Y. Sumandiyo Hadi, *Sosiologi Tari, Sebuah telaah kritis yang mengulas tari dari zaman ke zaman: primitif, tradisional, modern hingga kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka, 2005, hal 13.

masyarakat.⁸⁷ Menurut Soedarsono bahwa tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan dengan gerak – gerak ritmis dan indah.⁸⁸

Seni tari merupakan salah satu bentuk aktivitas kreasi manusia melalui pengalamannya atas sesuatu yang ia lihat tentang keindahan yang ada di alam ini. Tari merupakan kreatifitas universal seseorang dan tari berfungsi sebagai kekuatan sentral dan vital untuk menunjukkan serta membentuk gaya hidup dalam masyarakat tertentu.⁸⁹

Menurut Corrie Hartog, ahli tari dari Belanda mendefinisikan tari sebagai gerak – gerak yang berbentuk ritmis dari badan di dalam ruang. Sedangkan Kamaladevi Chattopadhyaya, ahli tari dari India mendefinisikan tari merupakan gerakan – gerakan luar dan ritimis yang lama kelamaan mengarah pada bentuk – bentuk tertentu.⁹⁰

Definisi lain, tentang tari dapat dijabarkan sebagai sebuah visualisasi, sebuah ekspresi dalam gerak yang berisi pesan – pesan terhadap kenyataan yang tetap tinggal dibenak penonton setelah pertunjukan selesai. Tari dapat dikatakan sebagai ekspresi seni menciptakan image – image gerak yang membuat penonton lebih sensitif terhadap realitas tari akan memberikan pengalaman yang

⁸⁷ Judith Lynn Hanna, *Tari dan Ilmu Sosial Sebuah Titian Eskalasivisi*. Terj. Ben Suharto. Lagaligo, Yogyakarta. 1985, hal 40.

⁸⁸ Soedarsono, *Tari – Tarian Indonesia* Pengembangan Kebudayaan, Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1977, hal 17.

⁸⁹ Arifni Netrirosa, *Tari Kelompok “Berubah”*, <http://library.usu.ac.id>, (diakses tanggal 16 Desember 2008).

⁹⁰ Soedarsono, *Djawa Bali Dua Pusat Perkembangan Drama Tari Tradisional di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1972, hal 4.

berguna untuk memperkaya peranan dan pertumbuhan seseorang baik bagi seniman maupun penikmat.⁹¹

Beberapa pakar seni tari mengatakan pada hakikatnya tari adalah ekspresi perasaan manusia yang diungkapkan lewat gerak ritmis dan indah yang telah mengalami stilisasi maupun distorsi.⁹² Dari definisi itu ada dua hal penting yang perlu digaris bawahi, yaitu unsure “ekspresi manusia”, dan unsure “gerak ritmis dan indah mengalami stilisasi”.⁹³

Tari merupakan suatu bentuk pernyataan imajinatif dari kesatuan symbol gerak, ruang dan waktu serta merupakan pernyataan yang nyata dari kesatuan pola gerak, ruang dan waktu secara kasat mata. Sebagai suatu kesatuan bentuk imajinatif dan kasat mata, maka tari merupakan ekspresi jiwa serta pernyataan rasional manusia. Pernyataan rasio ini terdapat pada penempatan pola gerak, ruang, dan waktu untuk menghadirkan suatu bentuk tari. Dengan kata lain tari itu terbentuk dari imajinasi penata tari, atau dapat dikatakan pula bahwa imajinasi itu mendasari terwujudnya tari.⁹⁴ Seni tari merupakan salah satu bidang seni yang secara langsung menggunakan tubuh manusia sebagai media untuk mengungkapkan nilai – nilai keindahan dan nilai – nilai keluhuran.⁹⁵

⁹¹Sal. Murgiyanto, *Seni MenataTari*, Jakarta: Dewan Kesenian, 1983, hal 4.

⁹²Soedarsono, (ed), *Pengantar Apresiasi Seni*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992, hal 81.

⁹³Y. Sumandiyo Hadi, *Op Cit*, hal 29.

⁹⁴Alusius Agus S, Skripsi: *Analisis Struktur Tari Semarang*, Semarang: Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Semarang, 2001, hal 1.

⁹⁵Alusius Agus S, *Ibid*, hal 2.

Menurut John Martin, seorang penulis dan kritikus dari Amerika Serikat dalam bukunya *"The Modern dance"* menyebutkan bahwa substansi baku dari tari adalah gerak. Gerak adalah penagalaman fisik yang paling elementer dari kehidupan manusia. Namun gerak tidak hanya terdapat pada denyutan – denyutan diseluruh tubuh manusia untuk tetap dapat memungkinkan manusia hidup, tetapi juga terdapat pada ekspresi dari segala pengalaman emosional manusia.

Menurut Sal Murgiyanto bahwa tari dapat dikatakan sebagai ekspresi seni menciptakan image – image gerak yang membuat penonton lebih sensitif terhadap realitas tari akan memberikan pengalaman yang berguna untuk memperkaya peranan dan pertumbuhan seseorang baik bagi seniman maupun penikmat.⁹⁶

Curt Sach, seorang ahli sejarah musik dan sejarah tari dari Jerman, dalam bukunya *"World History of The Dance"* menyebutkan bahwa perkembangan tari sebagai seni yang tinggi telah ada pada zaman Pra sejarah. Tari sendiri bahkan telah mencapai tingkat kesempurnaan yang belum tercapai oleh ilmu pengetahuan lainnya. Disebutkan pula bahwa pada zaman pra sejarah seandainya musik dipisahkan dari tari, musik itu tidak akan memiliki nilai artistik apapun. Bangsa *"non literate"* yang sangat dipengaruhi oleh kekuatan alam dan kekuatan – kekuatan yang tidak tampak, lebih banyak melakukan tarian – tarian sebagai sarana dalam kelangsungan

⁹⁶Loc Cit.

hidupnya. Sehingga ia menamakan suku – suku bangsa “non literate” sebagai suku – suku penari.

Tari adalah seni, meskipun substansi dasarnya adalah gerak, akan tetapi gerak – gerak di dalam tari itu bukan gerak yang realistis, melainkan gerak yang telah diberi bentuk ekspresif. Susanne K. Langer, dalam bukunya “*Problems of arts*” menyebutkan bahwa bentuk ekspresif adalah bentuk yang diungkapkan manusia untuk dinikmati dengan rasa. Gerak – gerak ekspresif adalah gerak – gerak yang indah, yang dapat menggetarkan perasaan manusia. Gerak yang indah aialah gerak yang distilir, yang didalamnya mengandung ritme tertentu.

Menurut Curt Sachs, tari adalah gerak yang ritmis, sedangkan Corrie Hartong dalam bukunya yang berjudul “*Danskunst*” mendefinisikan tari sebagai gerak – gerak yang diberi bentuk dan ritmis dari badan di dalam ruang.⁹⁷ Seorang ahli tari Jawa bernama Pengeran Suryodiningrat dalam bukunya “*Babad Lan Mekaring Djoget Djawi*” mengutarakan bahwa tari adalah gerakan – gerakan dari seluruh bagian tubuh manusia yang disusun selaras dengan irama musik serta mempunyai maksud tertentu⁹⁸.

⁹⁷Soedarsono, *Ibid*, hal 223.

⁹⁸*Loc Cit.*

Jiwa manusia terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu kehendak, akal, dan rasa atau emosi. Berkaitan dengan jiwa manusia tersebut, maka tari terbagi menjadi tari tradisional, tari klasik dan tari modern.⁹⁹

1). Tari tradisional adalah tari yang bersifat magis dan sacral merupakan ekspresi jiwa manusia yang didominasi oleh kehendak. Seperti di Papua, terdapat suku Asmat dengan tari Ndi. Tarian bertujuan untuk penyembuhan kepada roh nenek moyang yang diadakan di hutan dekat wayana. Di bali terdapat tari Pendet dan Gabor yang berfungsi sebagai tari sesaji para dewa, tari Baris yang merupakan tari adat bagi upacara kematian. Tari – tarian tersebut digarap atas dasar kehendak/keyakinan sebagai sarana untuk upacara keagamaan dan adat. Hal ini pun tidak terlepas dari pendapat Kenneth Macgowan dalam bukunya *“The Living Stage: A Story of The World Theater”*, yang menyebutkan bahwa manusia itu mempunyai instink atau naluri untuk meniru. Tari tradisional berdasar atas nilai artistik garapannya terdiri dari:

- a) Tari sederhana, seperti tari Mandau pada masyarakat suku Dayak.
- b) Tari rakyat, seperti tari Kuda Lumping atau Kuda Kepang di Jawa, tari Tayub dari Jawa Tengah, tari Lenso dari Ambon, tari Ronggeng dari Jawa Barat, tari Sanghyang dari Bali.

⁹⁹Soedarsono, *Op Cit*, hal 6.

c) Tari klasik atau tari istana. Tari klasik merupakan tari yang dominan dipengaruhi akal, sehingga hasilnya adalah tari klasik yang tujuannya lebih banyak mengarah ke seni tontonan (*performing art*). Dalam tari klasik terdapat pola dasar yang mengikat, hingga seolah – olah ada peraturan yang mengikat. Jenis tarian ini tidak hanya menilai keindahan pada kemampuan ungkapan gerak untuk memuaskan penonton saja, namun ditentukan pula oleh benar atau tidaknya tari itu dibawakan atas dasar pola yang telah ditentukan. Sebagai gambaran, tari Jawa jenis puteri harus dilakukan dengan posisi kaki tertutup, langkah kaki harus rendah dan pendek, posisi lengan tertutup. Sehingga jika berbeda teknik meskipun memiliki keindahan menurut norma gerak tari yang umum, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan tari puteri klasik Jawa akan menjadi tidak indah karena tidak benar atau tidak sesuai dengan pola tari puteri yang telah ditentukan. Jadi akal berperan penting baik teknik pengungkapannya maupun dalam penilaian terhadap tari klasik.¹⁰⁰

2). Tari Modern merupakan tari yang didominasi emosi atau rasa. Sebagaimana ciri kodrati emosi manusia yang memiliki desakan untuk ingin bebas, maka jenis tari ini lebih mengarah untuk

¹⁰⁰ *Loc Cit.*

bebas dari tradisi. Bebas disini adalah bebas untuk mengungkapkan gerak yang tidak diharuskan oleh pola – pola yang sudah ada. Tari ini bermula dan berkembang di Amerika, sebagai perkembangan tradisi Eropa yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan mereka. Di Negara – negara yang memiliki tradisi kuat seperti India, Vietnam, dan Indonesia, jenis tari ini dalam taraf pertumbuhan. Tari modern menurut Tran van Khe seorang Guru Besar Etnomusikologi dari Vietnam, menyatakan bahwa modern adalah kebebasan dalam cara mengungkapkan teknik gerak di atas pentas. Frances Rust, seorang sosiologi Inggris dalam bukunya *“Dance in Society”*, tahun 1969 yang diterbitkan di London oleh Routledge & Kegan Paul, menyebutkan bahwa tari – tarian pada kebudayaan tradisional memiliki fungsi social (tari – tarian untuk kelahiran, upacara inisiasi, perkawinan, perang, dsb) dan religius magis (tari – tarian untuk penyembuhan, mencari makan atau berburu, menyembuhkan orang sakit, mengeyahkan roh – roh jahat, upacara kematian). Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sedang berkembang mempunyai warisan kebudayaan (*cultural heritage*) yang mengagumkan seperti bidang pewayangan, musik (gamelan) dan tari. J.R. Brandon, seorang guru Besar bidang Teater Universitas Hawaii dalam bukunya *“On Thorns of Gold”: Three Javanese Shadow Plays*”, mengatakan bahwa

wayang kulit purwa dari Jawa Tengah merupakan salah satu bentuk seni teater yang paling indah dan kompleks di seluruh dunia.¹⁰¹

Fungsi tari dalam kehidupan manusia dikelompokkan menjadi:¹⁰²

1. Sebagai sarana dalam upacara – upacara keagamaan seperti di Bali dan daerah – daerah yang masih kuat unsur – unsur kepercayaan kunonya atau yang masih hidup dalam suasana budaya purba;
2. Sarana dalam upacara adat;
3. Sarana untuk mengungkapkan kegembiraan atau pergaulan;
4. Seni tontonan, sering disebut juga seni teatrikal karena mengarah kepada bentuk santapan estetika, yang akan lebih banyak memberi hiburan kepada manusia. Meskipun hiburan ada yang serius (*performance/concert*) dan ringan (*show*), namun menurut John Martin keduanya harus dapat memberi kepuasan kepada perasaan manusia dan berkomunikasi dengan penonton. Susanne K. Langer, ahli filsafat seni berkebangsaan Amerika Serikat secara filosofis berpendapat bahwa tari sebagai seni tontonan merupakan perwujudan lahir dari

¹⁰¹Soedarsono, *Ibid*, hal 13.

¹⁰²Soedarsono, *Ibid*, hal 45.

proses batin manusia untuk dilihat sendiri dan oleh orang lain. Sehingga menurut fungsinya, tari – tarian Indonesia terbagai menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- 1) Tari upacara
- 2) Tari bergembira atau tari pergaulan atau tari social, seperti tari giring – giring dari Kalimantan, tari Serampang Dua Bekas dari Sumatera, tari Gandrung dari Nusa Tenggara Barat.
- 3) Tari teatrikal atau tari tontonan (*theatrical dance*) yang garapannya khusus dipertunjukkan (*performing art*). Jenis tari ini disebut tari teatrikal karena diselenggarakan di tempat pertunjukan tradisional, modern, maupun arena terbuka. Teater jenis ini disebut sebagai *performing art* atau seni pertunjukan, karena jenis tari ini dapat dinikmati dengan dipertunjukan. Pada tari pertunjukan tidak kalah penting adalah komposisi tari, biasa disebut koreografi. Koreografi atau *choreography*, berasal dari bahasa Yunani (*choreia* = tari masal dan *grapho* = catatan), kemudian berkembang menjadi garapan tari atau dance composition. Elemen – elemen komposisi tari sendiri pun terdiri dari gerak tari, desain lantai/*floor design*, desain atas/*air design*, desain musik, desain dramatik, dinamika, koreografi kelompok/*group choreography*, tema, rias,

kostum, pop tari, pementasan/*staging*, tata lampu, penyusunan acara.

Seni tari sebagai salah satu dari seni pertunjukan menurut Soedarsono, bahwa di era zaman teknologi modern fungsi seni tari dalam kehidupan manusia digolongkan menjadi tiga; sebagai sarana upacara, sarana hiburan dan sebagai tontonan.¹⁰³

Sedangkan Edi Sedyawati membagi fungsi seni tari menjadi enam; untuk persembahan kepada yang ghaib, untuk peng Agungan terhadap penguasa duniawi, sarana hiburan, pelengkap upacara adat, sarana pengucapan dorongan batin yang bersifat perorangan, dan sarana perwujudan 'image Indonesia'.¹⁰⁴

Pada dasarnya jika dikaji dan diteliti jelas sekali bahwa unsur – unsur dari seni tari adalah gerak dan ritmis. Adapun yang dimaksud dengan gerak dalam tari adalah bukan gerak sehari – hari akan tetapi gerak disini merupakan gerak yang mengandung arti, gerak – gerak yang telah mendapat pengolahan secara khusus. Lebih jelasnya gerak yang ada pada tari adalah gerak sehari – hari atau natural yang telah distilir/distilasi sehingga menjadi gerak yang memiliki nilai estetika.

¹⁰³Rustopo, *Op Cit*, hal 99.

¹⁰⁴*Loc Cit.*

Menurut Soedarsono bahwa penggarapan gerak tari lazim disebut stilasi¹⁰⁵ atau distorsi. Berdasarkan bentuk geraknya, secara garis besar ada dua jenis tari yaitu tari yang representasional dan tari yang non representasional. Tari yang representasional ialah tari yang menggambarkan sesuatu secara jelas. Sedangkan tari yang non representasional adalah tari yang tidak menggambarkan sesuatu.¹⁰⁶

Tari yang berfungsi sebagai ungkapan dan komunikasi dengan menggunakan tubuh sebagai media, harus mampu menciptakan rangkaian gerak yang dapat membuat penghayat/penonton peka terhadap khayalannya, karena tari merupakan sebuah ungkapan yang diekspresikan melalui gerak yang ritmis dan indah.

Substansi atau sebagai bahan baku dari tari adalah gerak. Unsure – unsure pokok sebagai latar belakang terwujudnya gerak dalam tari adalah unsure – unsure tenaga, ruang dan waktu. Sebab dengan adanya tenaga, gerak dapat terungkap dengan adanya ruang gerak berwujud. Begitu pula gerak yang selalu bertautan atau sambung menyambung dengan gerak seterusnya.¹⁰⁷ Berikut ini akan diuraikan tentang unsur – unsur pokok tari:

¹⁰⁵ Stilisasi adalah pengubahan bentuk – bentuk di alam dalam seni untuk disesuaikan dengan suatu bentuk artistik atau gaya tertentu, seperti yang banyak terdapat dalam seni hias atau ornamenik

¹⁰⁶ Soedarsono, *Ibid*, hal 22.

¹⁰⁷ Lihat Alusius Agus S, Skripsi: *Analisis Struktur Tari Semarang*, Semarang: Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Semarang, 2001, hal 10.

1. Tenaga

Menurut Ellfelat tenaga di dalam tari menggambarkan suatu usaha yang mengawali, mengendalikan dan menghentikan gerak. Faktor – faktor gerak seperti; intensitas aksen dan kualitas hanya dapat dipahami dalam pengertian yang relative. Sebagai contoh, misalnya apa sebenarnya yang dimaksud dengan kuat apakah sebenarnya halus dan tanpa tekanan itu?. Hanya dalam kontras – kontras dinamikalah kita dapat melihat watak – watak gerak khas.¹⁰⁸

2. Ruang

Ruang yang dimaksud adalah ruang gerak dalam tari. Menurut Ellfelat gerak hadir di dalam ruang, yang bagi seorang penari merupakan posisi dan dimensi yang potensial. Posisi meliputi kedudukan tinggi rendah seorang penari terhadap lantai pentas dan terhadap arah kemana ia bergerak. Dimensi mengandung pengertian ukuran atau besar kecilnya gerakan seorang penari. Arah, level/tingkatan dan besar (volume) adalah istilah – istilah yang relatif. Volume gerak berhubungan dengan jangkauan gerak seorang penari, besar kecilnya penambahan volume ini mempunyai implikasi dramatik dari keluasaan dan *scope*, juga tergantung dengan gerak yang

¹⁰⁸ *Loc Cit.*

dilakukan sebelumnya, juga tergantung dari besar kecilnya ruang dimana kita melakukan gerak.¹⁰⁹

3. Waktu

Tari menggunakan tenaga untuk mengisi ruang, tetapi hal ini dapat dilakukan hanya kalau ada waktu. Elemen – elemen waktu meliputi faktor – faktor tempo dan ritme. Waktu yang dimaksud dalam tari adalah kesatuan waktu yang diperlukan selama mengungkapkan bentuk – bentuk gerak dalam ruang tertentu, artinya sejumlah waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu rangkaian gerak anggota tubuh sewaktu menari. Aspek tempo dan ritme memiliki ukuran waktu yang cepat, sedang dan lembut, dan seterusnya. Hal ini tentunya tergantung keadaan gerakan itu sendiri.

Dengan adanya penguasaan unsure gerak yang meliputi unsur tenaga, ruang dan waktu maka pengungkapan bentuk gerak akan dapat memenuhi apa yang dinamakan gerak, irama, dan rasa. Aspek gerak, irama dan rasa di dalam tari merupakan tiga aspek dasar yang selalu ada kaitannya dan tidak dapat dipisahkan, berikut ini adalah penjelasan tentang ketiga aspek itu:

a) Aspek gerak

Merupakan perwujudan gerak yang dilakukan oleh tubuh sebagai instrument ekspresi atau lebih jelasnya merupakan

¹⁰⁹Sal. Murgiyanto, *Ibid*, hal 6.

bentuk fisik tari yang dapat kita amati melalui gerak yang dilakukan oleh penari, misalnya bagaimana bentuk sikap dan gerakannya, tenaga digunakan, sehingga seluruh kesatuan dari penggunaan unsur dan motif gerak dalam tari

b) Aspek irama

Merupakan aspek yang berkaitan dengan iringan (musik) dengan rasa gerak tari. Kepekaan terhadap irama sangat menentukan kualitas tarinya. Dengan demikian gerak harus selalu selaras dengan irama, seperti pada ketukan dan hitungan gerak yang harus disesuaikan dengan irama musik (gending), sehingga kita dapat mengetahui kapan suatu gerakan itu harus jatuh pada saat ketukan – ketukan tertentu (misal jatuh pada kempul atau gong). Dengan demikian ada keseimbangan antara susunan gerak tari dengan musik sebagai iringan.

c) Aspek rasa

Merupakan aspek yang ada kaitannya dengan rasa dinamik atau rasa penghayatan sesuai dengan isi yang terkandung di dalam tari. Peranan rasa harus dapat disatukan dengan aspek gerak dan irama, sehingga dapat terwujud keharmonisan dalam penyajian tari yang diekspresikan.¹¹⁰

¹¹⁰Lihat Alusus Agus S, Skripsi: *Analisis Struktur Tari Semarang*, Semarang: Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Semarang, 2001, hal 12.

A.3. Tari Sebagai Karya Cipta

Penciptaan suatu karya seni membutuhkan proses yang cukup panjang, penciptaan karya terdiri dari beberapa unsur yaitu; ide (gagasan), bentuk (teknik), dan penampilan, ketiga unsur tersebut merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi karya cipta si pencipta.

Seni tari merupakan hasil kreatifitas manusia melalui olah pikir budinya yang terwujudkan melalui gerakan tubuh yang memiliki makna estetik dengan iringan musik yang menambah keindahan dari sebuah tari tersebut. Seni tari merupakan seni pertunjukan yang biasanya dimainkan oleh banyak orang melalui gerakan tubuh dengan menggunakan kostum atau pakain yang khas merupakan suatu kesatuan yang utuh.

Seni tari merupakan salah satu bentuk kreasi manusia melalui pengalamannya atas sesuatu yang ia lihat tentang keindahan yang ada di alam ini. Tari merupakan kreatifitas universal seseorang dan tari berfungsi sebagai kekuatan sentral dan vital untuk menunjukkan serta membentuk gaya hidup dalam masyarakat tertentu.¹¹¹

Penciptaan sebuah karya seni biasanya terbagi dalam beberapa tahap, diantaranya *preparation* (persiapan), tahap *incubation* (inkubasi), tahap *illumination* (iluminasi), dan tahap *verification* (verifikasi). Setiap tahap memiliki teori, sistem, dan metode untuk

¹¹¹ Arifni Netrirosa, *Tari Kelompok "Berubah"*, <http://library.usu.ac.id>, (diakses tanggal 16 Desember 2008).

mencapai tujuan. Seluruh proses itu memerlukan waktu yang cukup panjang guna menghasilkan sebuah karya seni *novelty* atau orisinal dengan berbagai pembaharuan. Karya seni produk yang diciptakan atas dasar tahapan – tahapan di atas, biasanya memiliki tiga unsur yang memastikan, yaitu ide (gagasan), bentuk (teknik), dan penampilan. Ketiga unsur itu dilatarbelakangi oleh penciptanya, individu atau kolektif termasuk latar belakang budaya penciptanya.¹¹²

Pencipta tari/koreografer atau sering pula disebut penata tari, adalah mereka yang dapat menciptakan tarian atau mampu mewujudkan suatu ciptaan tari/koreografi. Dari para koreografer inilah tercipta berbagai macam bentuk tari sebagai hasil karya kreatifitas mereka. Koreografer sebagai pencipta tari dapat juga dikatakan sebagai seniman tari. Seniman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia¹¹³ diartikan sebagai orang yang mempunyai bakat seni dan berhasil menciptakan dan menggelarkan karya seni (pelukis, penyanyi, penyair, dsb)

Koreografer dalam menciptakan suatu tari membutuhkan kemampuan segi kreatifitas ketrampilan, pengetahuan, keberanian, kejujuran, ketahanan dan keteguhan hati, stamina dan lainnya. Karya seni atau kegiatan artistik semacam ini, merupakan sebuah karya yang betul – betul dilakukan tanpa pretensi dalam arti sesungguhnya.

Pencipta tari/koreografer berekspresi atau mengungkapkan ide,

¹¹²Sodarso Sp, *Op Cit*, hal 244.

¹¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi Ketiga, *Loc Cit*.

inspirasi, dan pengalaman serta imajinasinya hanyalah semata – mata untuk mencari sebuah kepuasan batin.¹¹⁴

Kreatifitas menurut Erich From merupakan kemampuan untuk menciptakan karya – karya yang biasa dilihat, didengar oleh orang lain. Menurut I Made Bandem bahwa kriteria suatu kreatifitas biasanya tersusun ke dalam tiga unsur, yaitu ide (gagasan), bentuk (komposisi, struktur, dan teknik), dan penampilan (pergelaran atau pameran).¹¹⁵

Menurut Alma Hawkins dalam bukunya yang berjudul *Creating Through Dance*, bahwa di dalam metode penciptaan seni tari berintikan:

1. Eksplorasi

- a. Menentukan judul/tema/topik ciptaan melalui cerita, ide, dan konsepsi.
- b. Berpikir, imajinasi, merasakan, menanggapi, dan menafsirkan tentang tema yang dipilih.

2. Improvisasi

- a. Percobaan – percobaan, memilih, membedakan, mempertimbangkan, membuat harmonisasi, dan kontras – kontras tertentu.

¹¹⁴Oho Garha, *Seni Tari III*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979, hal 81.

¹¹⁵I Made Bandem dalam “*Tari Sebagai sebuah Simbol Masyarakat Bali*”, Jurnal Seni ISI Yogyakarta, edisi perdana, 1991, lihat dalam I Made Bandem, *Kekhasan Penelitian Bidang Seni, Ekspresi*, Yogyakarta: Jurnal Institut Seni Indonesia Yogyakarta: Penciptaan Seni Ke Aras Hak Intelektual, 2005, vol 15, hal 240.

- b. Menemukan integrasi dan kesatuan terhadap berbagai percobaan yang dilakukan.

3. Pembentukan

- a. Menentukan bentuk ciptaan dengan menggabungkan simbol – simbol yang dihasilkan dari berbagai percobaan yang telah dilakukan.
- b. Menentukan kesatuan dengan parameter yang lain seperti gerak dengan iringan, busana, dan warna.
- c. Memberi bobot seni (kerumitan, kesederhanaan, dan intensitas, dramatisasi dan bobot keragaman).

4. Observasi dan Kritik

Penelitian seni untuk mengkaji karya seni sering disebut sebagai Observasi dan Kritik. Penelitian ini terkait erat dengan taksonomi ilmu – ilmu apresiasi seni. Agar karya seni dapat dinikmati oleh masyarakat, baik secara individual maupun kolektif perlu adanya pengenalan, pengamatan, pemahaman dan apresiasi yang mendalam.¹¹⁶

B. KEBUDAYAAN DAN FOLKLORE

B.1. Pengertian dan wujud Kebudayaan

Kebudayaan = *cultuur* (Bahasa Belanda) = *culture* (Bahasa Inggris) = *tsaqafah* (Bahasa Arab), berasal dari kata Latin “*colere*” yang

¹¹⁶Sodarto Sp, *Op Cit*, hal 254.

artinya mengolah, mengerjakan, menyuburkan dan mengembangkan. Kemudian arti culture berkembang sebagai “segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam”. Ditinjau dari sudut bahasa Indonesia, kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta “*buddhayah*”, yaitu bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi atau akal.¹¹⁷

Menurut ilmu antropologi, kebudayaan adalah : keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar.¹¹⁸

Kata budaya adalah sebagai suatu perkembangan dari kata majemuk, yang berarti daya dan budi. Sehingga terdapat perbedaan arti antara budaya dan kebudayaan. Budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa; dan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa tersebut. Banyak sarjana ilmu sosial mencoba menerangkan mengenai definisi kebudayaan, diantaranya:¹¹⁹

- a. E.B. Taylor dalam bukunya “*Primitive Culture*” merumuskan kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral hukum, adat istiadat dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

¹¹⁷ Joko Tri Prasetyo, dkk, *Ilmu Budaya Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hal 27.

¹¹⁸ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2000, hal 180.

¹¹⁹ Joko Tri Prasetyo, dkk, *Ibid*, hal 28.

- b. C. Kluckhohn dan W. H. Kelly menyatakan bahwa kebudayaan adalah pola untuk hidup yang tercipta dalam sejarah, yang eksplisit, implicit, rasional, irrasional yang terdapat pada setiap waktu sebagai pedoman – pedoman yang potensial bagi tingkah laku manusia.
- c. R. Linton dalam bukunya *“The Cultural Background of Personality”* mengemukakan, bahwa kebudayaan adalah konfigurasi dari tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku, yang unsur – unsur pembentuknya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat tertentu.
- d. Dawson dalam bukunya *“Age of Gods”*, menyatakan bahwa kebudayaan adalah cara hidup bersama (*culture is common way of life*).
- e. Sutan Takdir Alisyahbana, menyatakan bahwa kebudayaan adalah manifestasi dari suatu bangsa.

Dari beberapa definisi tersebut arti kebudayaan adalah amat luas, yang meliputi kelakuan dan hasil kelakuan manusia, yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatkan melalui proses belajar dan telah tersusun dalam kehidupan masyarakat. Namun secara umum, masyarakat umum lebih sering mengartikan kebudayaan sebagai *The General Body of The arts*, yang meliputi seni sastra, seni musik, seni

pahat, seni rupa, pengetahuan dan filsafat atau bagian – bagian yang indah dari kehidupan manusia.¹²⁰

Para ahli ilmu sosial mengartikan konsep kebudayaan dalam arti yang amat luas yaitu seluruh total dari pikiran, karya, dan hasil karya manusia yang tidak barakar kepada nalurinya, dan yang karena itu hanya bisa dicetuskan oleh manusia sesudah suatu proses belajar.¹²¹

Kebudayaan adalah hasil buah budi manusia untuk mencapai kesempurnaan hidup. Dengan akal budi yang dimilikinya, manusia akan selalu berbudaya. Kebudayaan akan selalu mencakup segala kesadaran, sikap dan perilaku hidup manusia.¹²²

Menurut Koentjaraningrat ada 3 (tiga) macam wujud kebudayaan, yaitu¹²³:

1. wujud kebudayaan sebagai kompleks ide – ide, nilai – nilai, norma – norma, peraturan – peraturan dan sebagainya. Sifatnya abstrak, terletak dalam alam pikiran manusia. Wujud ideal kebudayaan hidup dalam masyarakat dan memberi jiwa kepada masyarakat. Gagasan – gagasan itu saling berkaitan menjadi suatu sistem, disebut sistem budaya (*cultural system*) yang dalam bahasa Indonesia disebut adat istiadat.
2. wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktifitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Merupakan

¹²⁰ *Loc Cit.*

¹²¹ Lihat Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta : Pustaka Gramedia, 2004, hal 1.

¹²² Koentjaraningrat, *Ibid*, hal 181.

¹²³ Koentjaraningrat, *Ibid*, hal 2.

tindakan berpola manusia itu sendiri. Bersifat konkrit sehingga dapat diobservasi, difoto, didokumentir, disebut sebagai sistem sosial (*social system*).

3. wujud kebudayaan sebagai benda – benda hasil karya manusia. Disebut sebagai kebudayaan fisik, yaitu seluruh hasil fisik karya manusia dalam masyarakat. Sifatnya sangat konkrit berupa benda – benda yang dapat diraba, difoto dan dilihat.

Ketiga wujud kebudayaan tersebut saling terkait, kebudayaan ideal dan adat istiadat mengatur dan mengarahkan tindakan manusia baik gagasan, tindakan dan karya manusia, menghasilkan benda – benda kebudayaan secara fisik. Sebaiknya kebudayaan fisik membentuk lingkungan hidup tertentu yang makin menjauhkan manusia dari lingkungan alamnya sehingga bisa mempengaruhi pola berfikir dan berbuatya.

Unsur kebudayaan yang bersifat universal yang menjadi isi pokok tiap kebudayaan di dunia adalah:¹²⁴

1. sistem religi dan upacara keagamaan,
2. sistem dan organisasi kemasyarakatan,
3. sistem pengetahuan,
4. bahasa,
5. kesenian,

¹²⁴ *Loc Cit.*

6. sistem mata pencaharian,
7. sistem teknologi dan peralatan.

B.2. Pengertian dan Ruanglingkup *Folklore*

Folklore pertama kali diperkenalkan oleh William Thomas pada tahun 1846. dia menggunakan istilah *folklore* dalam suratnya kepada *The Athenaeum* untuk menggantikan "*popular antiquities*" dan "*popular literature*". *Folklore* yang dimaksud oleh Thomas sendiri adalah kebiasaan, observasi, takhayul, cerita rakyat, dan seterusnya yang dianggap sebagai tradisi masyarakat (*lore of the people*).¹²⁵

Folklore dipahami sebagai cerita rakyat yang disampaikan secara turun menurun dari generasi ke generasi, sedikitnya ada dua generasi yang masih memahami dengan baik *Folklore* tersebut.¹²⁶ Kalau setidaknya ada dua generasi yang memahami *Folklore*, maka *Folklore* tersebut pasti ada dalam suatu tradisi. Tradisi sebagai bagian dari kebudayaan, biasanya diwariskan kepada generasi berikut dalam kelompoknya sendiri.

Menurut draft Peraturan Pemerintah mengenai "Hak Cipta atas *Folklore* yang dipegang negara" yang disebut sebagai *Folklore* dipilih ke dalam :¹²⁷

¹²⁵P.V. Valsala G. Kutty, *National Experiences With The Protection of Expressions of Folklore/Traditional Cultural Expressions: India, Indonesia and Philipines*, 2001, hal. 7.

¹²⁶Ahmad Hakim, *Peranan Folklore Terhadap Etika Lingkungan*, Jurnal Jaringan Pendidikan dan Kebudayaan Bimasuci, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah, 1996, hlm. 67

¹²⁷*Ibid*

- a. ekspresi verbal dan non-verbal dalam bentuk cerita rakyat, puisi rakyat, teka-teki, pepatah, peribahasa, pidato adat, ekspresi verbal dan non-verbal lainnya.
- b. ekspresi lagu atau musik dengan atau tanpa lirik.
- c. ekspresi dalam bentuk gerak seperti tarian tradisional, permainan, dan upacara adat.
- d. karya kesenian dalam bentuk gambar, lukisan, ukiran, patung, keramik, terakota, mosaik, kerajinan kayu, kerajinan perak, kerajinan perhiasan, kerajinan anyam – anyaman, kerajinan sulam – sulaman, kerajinan tekstil, karpet, kostum adat, instrumen musik, dan karya arsitektur, kolose dan karya-karya lainnya yang berkaitan dengan *folklore*.

James Danandjaya mendefinisikan *folklore* sebagian dari kebudayaan Indonesia yang tersebar dan diwariskan turun temurun di antara kolektif macam apa saja, secara tradisional, dalam versi yang berbeda baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai gerak isyarat, atau alat bantu pengingat (*mnemonic device*).¹²⁸ *Folklore* sendiri menurut James Danandjaya dapat dibagi dalam tiga kelompok besar, yang didasarkan pada unsur – unsur kebudayaan yang menjadi ciri khasnya. Kelompok tersebut terdiri dari:¹²⁹

¹²⁸ James Danandjaya, *Perlindungan Hukum terhadap Folklore di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Gramedia, 2002, hal 1.

¹²⁹ *Loc Cit.*

- a. Folklore Lisan, yang terperinci dalam bentuk genre:
 - 1) Ujaran rakyat (seperti logat, rujukan, pangkat tradisional, dan gelar kebangsawanan)
 - 2) Ungkapan tradisional (seperti pepatah, peribahasa dan pemeo)
 - 3) Pertanyaan tradisional (seperti teka teki)
 - 4) Nyanyian rakyat (seperti balada, epos, wira cerita)
- b. Folklore sebagian lisan yaitu adalah permainan rakyat, teater rakyat, makanan dan minuman rakyat, dan kepercayaan dan keyakinan rakyat.
- c. Folklore bukan lisan
 - 1) Material (seperti arsitektur rakyat, seni kriya rakyat, pakaian dan perhiasan tubuh rakyat, dan obat – obatan rakyat)
 - 2) Non-material (seperti gerak isyarat tradisional rakyat dan bunyi – bunyian rakyat).

Menurut Valsa G. Kuty bahwa *folklore* terbagi menjadi empat bentuk, meliputi¹³⁰:

- a. Literatur Tradisional (*Folk Literature*)

Berbagai bentuk cerita rakyat dan dongeng, mite serta tahyul yang populer dalam satu komunitas. Selain itu dapat pula

¹³⁰P.V. Valsala G. Kuty, *Op Cit*, hal 8-9.

berupa anekdot, cerita pendek pepatah, permainan teka teki dan berbagai bentuk lainnya yang populer. Umumnya, literatur tradisional disampaikan lisan, namun ada juga sebagian yang kemudian diabadikan dalam bentuk lisan, dan ada juga sebagian yang sudah ada dalam bentuk tulisan sejak awal.

b. Praktik Tradisional (*Folk Practices*)

Segala bentuk praktik yang menjadi bagian dari kehidupan sehari – hari dalam komunitas tradisional tertentu. Baik berupa kebiasaan, ritual, festival dan berbagai bentuk lainnya.

c. Seni dan Budaya Tradisional (*Folk arts or astistic folklore*)

Termasuk yang bersifat performing art seperti lagu dan tariuan tradisional. Dapat pula bersifat *non-performing arts* seperti lukisan, ukiran, rajutan, pakaian dan sebagainya.

d. Pengetahuan Tradisional (*Folk scince and Technology*)

Berbagai metode dan pengetahuan yang digunakan dalam masyarakat tradisional. Mulai dari metode pengobatan, arsitektur hingga pembuatan barang kerajinan yang bersifat teknologi.

Edy Sedyawati mengungkapkan bahwa meskipun kata “pengetahuan tradisional” sering kali dibedakan dengan sebutan *folklore* (kesenian atau kebudayaan rakyat), namun beliau mengatakan bahwa dalam pengertian ilmu sosial atau budaya, keduanya dianggap

sinonim (sama).¹³¹ Namun demikian, pengetahuan tradisional perlu ditempatkan pada terminologi yang lebih luas daripada *Folklore*, karena *Folklore* sesungguhnya merupakan bagian dari pengetahuan tradisional sebagaimana yang telah diungkapkan dalam *CDB* dan *WIPO*.

Di Indonesia sendiri, *Folklore* telah diatur dalam Undang – undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 khususnya Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa negara memegang hak cipta atas *Folklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, lagu, kerajinan tangan, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya. Sementara itu, dalam penjelasan Undang – undang Hak Cipta Tahun 2002 diungkapkan bahwa yang dimaksud dengan *Folklore* adalah sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai – nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun – temurun termasuk cerita rakyat, puisi, lagu – lagu rakyat, tari – tarian, permainan tradisional, hasil seni berupa lukisan, gambar, ukir – ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.¹³² Sehingga dengan kata lain *Folklore* adalah mengacu pada semua pekerjaan seni dan sastra yang

¹³¹ Miranda Risang Ayu, *Opini : Pikiran Rakyat*, diakses pada Selasa 4 Desember 2007

¹³² Emawati Junus, “*Aspek Hukum Di Bidang Hak Cipta : Perlindungan Hukum HKI, Taditional Knowledge, Folklore*”, disajikan pada PROSIDING Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah – Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis. MA RI bekerja sama dengan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004, hsl. 8-10

umumnya diciptakan oleh pencipta yang tidak diketahui identitasnya tetapi dianggap menjadi milik negara yang berkembang dari bentuk-bentuk karakteristik tradisi.

Adapun sifat dari *Folklore* yang dimaksud adalah :¹³³

1. Merupakan hak kolektif komunal,
2. Merupakan karya seni,
3. Telah digunakan secara turun-temurun,
4. Hasil kebudayaan rakyat,
5. Perlindungan hukum tak terbatas (UU Hak Cipta)
6. Belum berorientasi pasar,
7. Negara pemegang hak cipta atas *Folklore* (UU Hak Cipta)
8. Penciptanya tidak diketahui,
9. Belum dikenal secara luas di dalam forum perdagangan internasional.

Masyarakat Internasional disisi lain juga sering memadankan istilah pengetahuan tradisional dengan *Folklore* yang secara substansial, sebenarnya mengandung arti yang berbeda. Menurut Michael Blakeney *Folklore* lebih banyak didiskusikan dalam hal hak Cipta atau hak cipta plus dengan kata lain *Folklore* adalah bagian wilayah perlindungan dari hukum hak cipta.

¹³³ *Ibid*, hal. 11

B.3. Konsep Kepemilikan *Folklore*

Foklore mencerminkan kebudayaan manusia yang diekspresikan melalui musik, tarian, drama, seni kerajinan tangan, seni pahat, seni lukis, karya sastra dan sarana lain untuk mengekspresikan kreatifitas yang umumnya memerlukan sedikit ketergantungan pada teknologi tinggi.¹³⁴

Karya – karya tradisional diciptakan oleh masyarakat tradisional secara berkelompok sehingga terdapat banyak orang yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran pada produknya. Bahkan yang lebih prinsip adalah banyak masyarakat tradisional yang tidak mengenal konsep hak individu karena harta dianggap berfungsi sosial dan bersifat hak milik umum. Dengan demikian para pencipta dalam masyarakat tradisional tidak berniat untuk mementingkan hak individu atas karya – karya mereka.¹³⁵

World Intellectual Property Organization (selanjutnya disingkat *WIPO*) mendefinisikan pemilik atau pemegang pengetahuan tradisional dalam hal ini termasuk juga di dalamnya adalah *folklore* adalah semua orang yang menciptakan, mengembangkan dan mempraktikan pengetahuan tradisional dan *folklore* dalam aturan dan konsep tradisional. Masyarakat asli, penduduk dan negara adalah pemilik pengetahuan tradisional dan *folklore*. Dengan demikian yang ditekankan dalam perlindungan pengetahuan tradisional dan *folklore*

¹³⁴ Cita Citrawinda Priapantja, *Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan*, Jakarta: badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hal 138.

¹³⁵ Cita Citrawinda Priapantja, *Ibid*, hal 142.

ini adalah kepentingan komunal daripada kepentingan individual. Melindungi kepentingan komunal adalah cara untuk memelihara kehidupan harmonis sehingga ciptaan yang dihasilkan oleh seorang anggota masyarakat tidak menimbulkan kendala bila anggota yang lain juga membuat suatu karya yang identik dengan karya sebelumnya.¹³⁶

Seni tari tradisional yang juga merupakan salah satu hasil kebudayaan tradisional rakyat Indonesia yang telah berlangsung cukup lama dan sudah turun – temurun, sehingga seni tari tradisional telah menjadi milik bersama seluruh masyarakat Indonesia.

Pasal 10 Undang – undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 menentukan bahwa Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan presejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya; dan negara memegang hak cipta atas *foklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligraf, dan karya seni lainnya. Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut, orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi terkait dalam masalah tersebut.¹³⁷

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka negaralah 'yang mewakili' kepentingan rakyatnya (dalam hal ini; masyarakat tradisional Indonesia) sebagai pemegang hak cipta. Apabila pihak asing memanfaatkan karya budaya/pengetahuan tradisional nyata tanpa

¹³⁶ *Loc Cit.*

¹³⁷ Cita Citrawinda Priapantja, *Ibid*, hal 139.

mengindahkan kepentingan Indonesia atau masyarakat tradisional, negara harus mempertahankannya dan menggugatnya.¹³⁸

B.4. Manfaat Perlindungan *Folklore*

Dalam rangka melindungi *folklore* dan hasil kebudayaan rakyat lain. Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa izin Negara Republik Indonesia sebagai pemegang hak cipta. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut. *Folklore* dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat yang menunjukkan identitas sosial dan budaya berdasarkan standar dan nilai – nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun – temurun, termasuk.¹³⁹

- a. Cerita rakyat, puisi rakyat;
- b. Lagu – lagu rakyat dan musik – musik instrument tradisional;
- c. Tari – tarian rakyat, permainan tradisional;
- d. Hasil seni antarlain berupa lukisan, gambar, ukir – ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakain, instrumen musik dan tenunan tradisional.

Adanya perbedaan konsep kepemilikan dalam pengetahuan tradisional dan *folklore* dengan sistem HKI pada umumnya

¹³⁸ Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktri dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hal 60.

¹³⁹ Cita Citrawinda Priapantja, *Ibid*, hal 140.

memberikan konsekuensi tersendiri yakni bahwa pengetahuan tradisional dan *folklore* harus dijaga dan dipelihara oleh setiap generasi secara turun – temurun dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Walaupun pada prinsipnya terdapat perbedaan pemahaman, namun secara keseluruhan alasan utama diberikannya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional (termasuk *folklore*) adalah:¹⁴⁰

- a. Untuk pertimbangan keadilan;
- b. Upaya konservasi;
- c. Memelihara budaya dan praktik hidup tradisional;
- d. Mencegah perampasan oleh pihak – pihak tidak berwenang terhadap komponen – komponen pengetahuan tradisional;
- e. Mengembangkan penggunaan dan kepentingan pengetahuan tradisional.

Berdasarkan tujuan di atas maka terdapat 4 (empat) prinsip yang dimiliki oleh komunitas masyarakat tradisional pada umumnya, yaitu: pengakuan, perlindungan, pembagian keuntungan dan hak beradaptasi dalam pengambilan keputusan *Convention on Biological Diversity* menambahkan satu prinsip yang dapat diterapkan terhadap pengetahuan tradisional yakni berupa hak moral *prior informed concern* (informasi terlebih dahulu).

¹⁴⁰Muhammad Djumhana, *Ibid*, hal 56.

C. TINJAUAN TERHADAP HAK CIPTA

C.1. Hak Cipta Pada Umumnya

a. Pengertian dan Sejarah Hak Cipta

Sejarah Hak Cipta konon dimulai pada sekitar abad ke 6 sampai ke 5 sebelum Masehi, tersebutlah kisah seorang penduduk bangsa Yunani bernama Pehriad. Menurut cerita, Pehriadlah yang pertama kali menemukan di tanda baca, yakni titik (.) dan koma (,). Penemuannya ini kemudian diterap dan dipergunakan dalam sarana bahasa tertulis.¹⁴¹ Penemuan Pehriad yang kini nampaknya bersahaja ini, ternyata dalam perkembangan ilmu pengetahuan mempunyai nilai dan makna yang penting sekali dalam penyempurnaan baca dan tulis. Saat itu pemerintah Yunani meskipun telah memberikan pengakuan terhadap penemuan Pehriad tersebut, ia belumlah memperoleh penghargaan yang layak terhadap jasanya itu.¹⁴²

Barulah kemudian setelah Pehriad meninggal dunia, putranya Apullus sebagai pewaris penemuan itu hijrah dari Yunani kemudian ia bermukim di Roma. Di negeri itu, ternyata ia memperoleh pengakuan, perlindungan dan jaminan dari pemerintah Roma atas hasil karya dan cipta ayahnya itu. Untuk setiap penggunaan, penggandaan dan pengumuman dari penemuan Pehriad itu, Apullus

¹⁴¹Ramdlon Naning, *Perihal Hak Cipta Indonesia Tinjauan Terhadap Auteurswet 1912 dan Undang – undang Hak Cipta 1982*, Yogyakarta: Liberty, 1982, hal 9.

¹⁴²*Loc Cit*

memperoleh penghargaan dan jaminan sebagai pencerminan dari pengakuan terhadap hak tersebut.¹⁴³

Sejarah lain juga mencatat bahwa di tahun 567 Anno Dominum (AD) seorang biarawan Columba secara diam – diam menyalin tanpa izin Kitab Mazmur yang merupakan ciptaan yang dimiliki gurunya Abbot Finian. Ketika raja pada waktu itu, bernama King Diarmid mengetahui hal ini, ia memerintahkan Columba menyerahkan Kitab Mazmur yang disalinnya tanpa izin kepada Abbot Finian dan melarang melakukannya lagi.¹⁴⁴

Hal yang sama juga tercermin dari suatu peristiwa yang terjadi jauh sebelum tahun 567 Anno Dominum (AD), yaitu pada zaman Romawi, ketika seorang penyair Martial, mengecam keras seseorang yang membacakan sajak – sajaknya di muka umum tanpa seizinnya. Martial menamakan perbuatan orang itu sebagai *plagium*. Arti sebenarnya dari *plagium* ini, adalah adanya ide hubungan atau keterkaitan (*bond*) antara pencipta dengan ciptannya.¹⁴⁵

Sedangkan pada kurun waktu masa keemasan peradaban islam pada rentang waktu tahun 750-1250 Masehi (abad ke-7 sampai dengan abad ke-12), memunculkan banyak penemuan dan karya – karya inovatif dari para ilmuwan seperti Ibnu Sina (Avecenna) dengan ensklopedi kedokterannya serta Jabir Ibn Hayyan (Agebra) dengan teori matematikanya. Karya – karya para ilmuwan tersebut

¹⁴³ *Loc Cit.*

¹⁴⁴ Edy Daiman, *Op Cit*, hal 46.

¹⁴⁵ Edy Daiman, *Ibid*, hal 47.

mendapatkan penghargaan tinggi dari Negara melalui mal atau dari yayasan (Badan Wakaf) apabila penemuan tersebut dikembangkan oleh pihak swasta.¹⁴⁶

Istilah hak cipta sebenarnya berasal dari negara yang menganut *Common Law*, yakni copyright, sedangkan di Eropa, seperti Perancis dikenal *droit d'auteur* dan di Jerman sebagai *urheberrecht*. Di Inggris, penggunaan istilah *copyright* dikembangkan untuk melindungi penerbit, bukan untuk melindungi si pencipta. Namun seiring dengan perkembangan hukum dan teknologi, maka perlindungan diberikan kepada pencipta serta cakupan hak cipta diperluas tidak hanya mencakup bidang buku, tetapi juga drama, musik, *artistic work*, fotografi, dan lain - lain¹⁴⁷

Bangsa Indonesia pertama kali mengenal Hak Cipta pada tahun 1912, yaitu pada masa Hindia Belanda. Berdasarkan Pasal 11 dan 163 I.S., hukum yang berlaku di Negeri Belanda yang juga diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi yang terus berlaku hingga saat Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 diikuti dengan dibuatnya UUD 45 tanggal 18 Agustus maka berdasarkan pasal II aturan peralihan UUD 45 maka semua

¹⁴⁶ Agus Triyana, *Hak Milik Intelektual dalam Pandangan Hukum Islam*, dalam Jurnal Hukum No. 17 Vol 8 Juni 2001 hal 33-36. Secara eksplisit Hukum Islam tidak mengenal pengertian Hak Kekayaan Intelektual namun penghargaan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan merupakan hal yang utama yang harus dikembangkan dengan menjaga keseimbangan antara individu sebagai pencipta dan masyarakat sebagai pengguna untuk itu Negara wajib mengambil alih Hak Cipta agar suatu karya dapat dengan mudah disebarluaskan masyarakat tanpa merugikan penciptanya.

¹⁴⁷ Ramdlon Naning, *Op Cit*, hal 2.

peraturan perundangan peninggalan zaman kolonial belanda tetap berlangsung berlaku sepanjang belum dibuat yang baru dan tidak bertentangan dengan UUD 45. tetapi Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karsa bangsa asing tanpa harus membayar royalti.

Sejak Negeri Belanda menandatangani naskah Konvensi Bern pada tanggal 1 April 1913, maka sebagai negara jajahannya, Indonesia diikutsertakan dalam Konvensi tersebut sebagaimana disebutkan dalam *Staatsblad* Tahun 1914 Nomor 797. Ketika Konvensi Bern ditinjau kembali di Roma pada tanggal 2 Juni 1928, peninjauan ini dinyatakan berlaku pula untuk Indonesia (*Staatsblad* Tahun 1931 Nomor 325). Konvensi inilah yang kemudian berlaku di Indonesia sebagai jajahan Belanda dalam hubungannya dengan dunia internasional khususnya mengenai hak pengarang (Hak Cipta).

Dalam rangka menegaskan perlindungan Hak Cipta dan menyempurnakan hukum yang berlaku sesuai dengan perkembangan pembangunan, telah beberapa kali diajukan rancangan undang – undang baru Hak Cipta yaitu pada tahun 1958, 1966, dan 1971, tetapi tidak berhasil menjadi undang – undang. Indonesia baru berhasil menciptakan Undang – undang Hak Cipta sendiri pada tahun 1982 yaitu dengan dikeluarkannya Undang – undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta (selanjutnya

disebut UUHC 1982). Undang – undang ini sekaligus mencabut *Auterswet* 1912 yang dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, menyebarluaskan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni, dan sastra, serta mempercepat pertumbuhan pencerdasan bangsa.

Selanjutnya pada tahun 1987, UUHC 1982 disempurnakan dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta. Penyempurnaan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Penyempurnaan berikutnya adalah pada tahun 1997 dengan berlakunya Undang – undang Nomor 12 Tahun 1997. Penyempurnaan ini diperlukan sehubungan perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat, terutama di bidang perekonomian tingkat nasional dan internasional yang menuntut pemberian perlindungan yang lebih efektif terhadap Hak Cipta. Selain itu juga karena penerimaan dan keikutsertaan Indonesia di dalam Persetujuan *TRIP's* yang merupakan bagian dari *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Akhirnya pada tahun 2002, UUHC yang baru telah diundangkan dengan mencabut dan menggantikan UUHC 1997 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. UUHC 2002 ini memuat perubahan – perubahan yang disesuaikan dengan *TRIP's*

dan penyempurnaan beberapa hal yang perlu untuk memberi perlindungan bagi karya – karya intelektual di bidang Hak Cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tradisional Indonesia.¹⁴⁸

Di Indonesia istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh Prof.St. Moh. Syah, SH pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh Kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurswet Recht*.¹⁴⁹

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan – pembatasan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.¹⁵⁰ Sedangkan pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama – sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang

¹⁴⁸Eddy Damian, dkk (Editor), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Group Pty Ltd bekerja sama dengan Alumni, Bandung, 2002, hlm. 94; bandingkan dengan Huruf a bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

¹⁴⁹Ajip Rosidi, *Undang – undang Hak Cipta 1982 , Pandangan seorang Awam*, Jakarta: Djambatan, 1980, hal 3.

¹⁵⁰Pasal 1 angka 1 Undang – undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

khas dan bersifat pribadi.¹⁵¹ Selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 3 Undang – undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC 2002) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Dengan demikian, hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi para pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama dalam batasan hukum yang berlaku. Yang penting untuk diangkat adalah hak tadi mengizinkan pemegang hak cipta untuk mencegah pihak lain memperbanyak tanpa izin.¹⁵²

Menurut Hutaaruk ada 2 (dua) unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan UUHC 2002 Indonesia, yaitu:

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apa pun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).¹⁵³

¹⁵¹ Pasal 1 angka 2 Undang – undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

¹⁵² Tim Lindsey dkk, *Op Cit*, hal 97.

¹⁵³ M. Hutaaruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta: Erlangga, 2000, hal 11.

Patricia Loughlan memberikan definisi tentang hak cipta sebagai bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesusasteraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan (penerbitan).¹⁵⁴

Hak cipta menurut Budi Santoso adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk:¹⁵⁵

1. Mengumumkan;
2. Memperbanyak ciptanya;
3. Memberikan izin untuk 1 dan 2;
4. Bisa dengan alat atau cara lain sehingga ciptaan tersebut dapat dilihat, didengar, dibaca oleh orang lain.

Menurut Tim Lindsey yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta. Rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan seorang pelaku (*performer*), misalnya

¹⁵⁴Patricia Loughlan, *Intellectual Property: Creative and Marketing Rights*, LBC Information Services, Australia, 1998, hal 3.

¹⁵⁵Budi Santoso, *Pengantar HKI*, Semarang: Pustaka Magister, 2008, hal 81.

seorang penyanyi atau penari di atas panggung, merupakan hak terkait yang dilindungi hak cipta.¹⁵⁶

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights*, menyebutkan bahwa: *'Everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literary, or artistic production of which he or she is the author'* (Setiap orang mempunyai hak untuk mendapat perlindungan bagi kepentingan moral dan material yang berasal dari ciptaan ilmiah, sastra atau seni yang mana dia merupakan penciptanya).¹⁵⁷

Hak cipta¹⁵⁸ diartikan sebagai hak eksklusif yang diberikan pemerintah untuk jangka waktu tertentu kepada pencipta karya sastra atau seni seperti buku, peta, artikel, gambar, foto, komposisi musik, gambar hidup, rekaman, atau program computer.

Sedangkan Husain Audah menyimpulkan bahwa hak cipta sebagai hak eksklusif (*Exclusive Right*), merupakan subjek hukum yang bersifat immateriil yang melindungi hubungan kepentingan antara pencipta dengan keaslian ciptaannya.¹⁵⁹ Hak cipta adalah bentuk perlindungan atas kekayaan intelektual bagi sebuah karya

¹⁵⁶Tim Lindsey dkk, *Op Cit*, hal. 6

¹⁵⁷Husain Audah *Hak Cipta Dan Karya Cipta Musik*, PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2004, hal 67.

¹⁵⁸Istilah Hak Cipta sebagai padanan *Copy Rights*, pertama kali diusulkan oleh St. Moh. Syah pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 sebagai pengganti istilah pengarang (*Auteurs Recht*) yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya selanjutnya lihat H. OK. Saidin, 2004, aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, hal 58-59.

¹⁵⁹Husain Audah, *Ibid*, hal 8.

kreatif. Hal tersebut bukanlah ide – ide, tetapi karya yang terungkap sebagai subjek yang dapat diperbanyak atau digandakan.¹⁶⁰

Hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.¹⁶¹ Menurut M. Anwar Ibrahim bahwa hak cipta adalah merupakan semua hasil ciptaan manusia dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan, maka hak milik tersebut sudah sewajarnya apabila negara menjamin sepenuhnya perlindungan segala macam ciptaan yang merupakan karya intelektual manusia sebagai produk olah pikir.¹⁶²

Pengertian hak cipta yang diberikan oleh *World Intellectual Property Organization* ialah

‘Copyright is a legal form describing right given to creator for their literary and artistic works’

Hak cipta adalah terminology hukum yang menggambarkan hak – hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya – karya mereka dalam bidang seni dan sastra.¹⁶³

Hak cipta merupakan hak untuk menyalin atau mengkopi suatu karya, atas ijin dari pemilik hak, pada hakikatnya merupakan suatu hak eksklusif pemilik untuk mencegah pihak lain untuk mengkopi

¹⁶⁰ *Loc Cit.*

¹⁶¹ Tim Lindsey dkk, *Op Cit*, hal 96.

¹⁶² Edi Sedyawati, *Upaya Perlindungan Hukum (HKI) Terhadap Produk Kerajinan Nasional yang Menjadi Warisan Budaya*, disampaikan dalam Seminar Pekan Kerajinan Nasional, Semarang 18 Oktober 2002

¹⁶³ Husain Audah, *Ibid*, hal 6.

karya mereka tanpa izin. Hak cipta mempunyai kemampuan melahirkan hak yang baru, pengalihan hak dilakukan secara menyeluruh, maupun terpisah – pisah.¹⁶⁴

Menurut L.J. Taylor hak cipta melindungi suatu ekspresi dari sebuah ide, sedangkan ide yang belum diwujudkan belum dilindungi.¹⁶⁵ Lebih lanjut McKeough & Stewart menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta merupakan suatu konsep dimana pencipta (artis, musisi, pembuat film) yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.¹⁶⁶

Hak cipta pada dasarnya berisikan hak eksklusif si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengambil manfaat ekonomi sebuah ciptaan dengan melalui berbagai cara, dilain pihak berisikan hak untuk melarang pihak lain menggunakan ciptaannya (untuk kepentingan komersial) tanpa seijin si pencipta atau pemegang hak cipta. Dua hak tersebut merupakan hak yang paling asasi dalam hak cipta.¹⁶⁷

¹⁶⁴Trisno Raharjo, *Kebijakan Legislatif Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dengan Sarana Penal*, Yogyakarta: Pensil Komunika, 2006, hal 11

¹⁶⁵L.J. Taylor, *Copyright for Librarians*, cetakan pertama, East Sussex: Tamarisk Books Hasting, 1980, lihat dalam Muhammad Djumhana dan R. Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hal 57.

¹⁶⁶Patricia Loghlan, *Op Cit*, hal 119.

¹⁶⁷Budi Santoso, *Op Cit*, hal 84.

b. Objek Hak Cipta

Pada dasarnya yang dilindungi oleh Undang – undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002 adalah pencipta yang inspirasinya menghasilkan setiap karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlu adanya keahlian pencipta untuk dapat melakukan karya cipta yang dilindungi hak cipta. Ciptaan yang lahir harus mempunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi pencipta. Artinya, ciptaan harus mempunyai unsur refleksi pribadi (alter-ego) pencipta. Tanpa adanya pencipta dengan alter egonya tidak akan lahir suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta :¹⁶⁸

Bidang-bidang yang dilindungi hak cipta berdasarkan ketentuan Pasa1 12 Ayat (1) UUHC 2002 adalah:

Ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri dari:

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.

¹⁶⁸Eddy Damian, *Op Cit*, hal.131-132

- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, perwayangan, dan pantomim.
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambi seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan.
- g. Arsitektur.
- h. Peta.
- i. Seni batik.
- j. Fotografi.
- k. Sinematografi.
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, kar lain dari hasil pengalihwujudan."

Di samping ciptaan di atas yang dilindungi ada beberapa ciptaan yang dilindungi oleh Undang – undang No 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:

- (1). Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- (2). Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadikan milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

Untuk ciptaan yang ada dalam ketentuan Pasal 12 UUHC 2002 ciptaan ini dilindungi dalam wilayah dalam negeri maupun luar negeri, sementara itu untuk ciptaan yang terdapat pada ketentuan Pasal 10 UUHC 2002 sifat perlindungannya hanya berlaku ketika ciptaan itu digunakan oleh orang asing.¹⁶⁹

Di dalam kerangka ciptaan yang mendapatkan hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip – prinsip dasar hak cipta, yakni:¹⁷⁰

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli.

Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya buku, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip dasar ini telah melahirkan 2 (dua) subprinsip, yaitu:

- a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak – hak yang diberikan undang – undang keaslian, sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
- b. Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau

¹⁶⁹Budi Agus Riswandi dan M Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hal 11.

¹⁷⁰Eddy Damian, *Op Cit*, hal 99-106.

bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita – cita belum merupakan suatu ciptaan.

2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)

Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud yang dapat berupa buku. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public/openbaarmaken*) dan dapat diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta.

3. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta

4. Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/unpublished work*) kedua – duanya dapat memperoleh hak cipta.

5. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

6. Hak cipta bukan hak mutlak (*absolute*)

Hak cipta bukan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly*. Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga

mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu.

Adapun standar agar dapat dinilai sebagai hak cipta (*standart of copyright ability*) atas karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yaitu:

1. Perwujudan (*fixation*), yaitu suatu karya diwujudkan dalam suatu media ekspresi yang berwujud manakala pembuatannya ke dalam perbanyakan atau rekaman suara oleh atau berdasarkan kewenangan pencipta, secara permanent atau stabil untuk dilihat, direproduksi atau dikomunikasikan dengan cara lain, selama suatu jangka waktu yang cukup lama;
2. Keaslian (*originality*), yaitu karya cipta tersebut bukan berarti harus betul – betul baru atau unik, mungkin telah menjadi milik umum akan tetapi masih juga asli; dan
3. Kreatifitas (*creativity*), yaitu karya cipta tersebut membutuhkan penilaian kreatif mandiri dari pencipta dalam karyanya, yaitu kreatifitas tersebut menunjukkan karya asli.¹⁷¹

¹⁷¹Earl W. Kinter dan Jack Lahr, *An Intellectual Property Law Primer*, New York: Clark Broadman, 1983, hal 346-349 dalam Budi Agus Riswandi dan M Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hal 198.

c. Hak Cipta Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual

Istilah tentang HKI (Hak Kekayaan Intelektual) merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (selanjutnya disebut *IPR*) . Pengertian *IPR* tersebut adalah yang mengatur segala karya – karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia. Dengan demikian *IPR* merupakan pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*).¹⁷²

Hak Kekayaan Intelektual¹⁷³ adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak,¹⁷⁴ hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar.¹⁷⁵ Hasil kerjanya itu berupa benda immateriil. Benda tidak berwujud. Kita ambil misalnya karya cipta tari, untuk menciptakan gerakan, iringan musik dan kostum dalam suatu tarian diperlukan pekerjaan otak.

¹⁷² Etty Susilowati, *Kontrak Alih Teknologi pada Industri Manufaktur*, Genta Press, 2007, hal 113..

¹⁷³ Penggunaan istilah Hak Kekayaan Intelektual diawali dengan dikukuhkannya dalam Keputusan Menteri Hukum dan Perundang – undangan RI No.M.03.PR.07.10/tahun 2000 dan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.24/M/PAN/1/2000 tentang Bagan Organisasi Departemen Hukum dan Perundang – undangan. Khusus untuk hal – hal yang berkaitan dengan Hak kekayaan Intelektual tertuang dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No.K-01.PR.10 tahun 2001 tentang struktur Organisasi Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.

¹⁷⁴ Otak dimaksudkan bukanlah otak yang kita lihat seperti tumpukan daging yang enak digulai, yang beratnya 2% dari total berat tubuh, tetapi otak yang berperan sebagai pusat pengaturan segala kegiatan fisik dan psikologis, yang terbagi menjadi dua belahan; kiri dan kanan.

¹⁷⁵ Kata "menalar" ini penting, sebab menurut penelitian pakar antropologi fisik di Jepang seekor monyet juga berpikir, tetapi pikirannya tidak menalar. Ia tidak dapat menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya.

Jika ditelusuri lebih jauh, Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immateriil). HKI tidak lain adalah bagian dari hak milik, hak milik itu pada dasarnya dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:¹⁷⁶

- a. *Real Property*, yaitu hak atas benda berwujud (misalnya berupa hak atas tanah, gedung, kendaraan)
- b. *Intellectual Property*, yaitu hak atas benda – benda tidak berwujud misalnya; hak kekayaan intelektual. Dalam hal ini seseorang harus melakukan kreatifitas tertentu agar dapat memiliki hak. Misalnya membuat buku, lagu, program komputer dsb.

IPR (Intellectual Properti Right) ini terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:¹⁷⁷

1. Hak cipta (*copy rights*)
2. Hak milik industri (*industrial property rights*)

Dalam rangka upaya peningkatan perlindungan HKI, maka Indonesia saat ini telah memiliki beberapa perundang – undangan di bidang HKI yaitu :

1. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten ;
2. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek ;
3. Undang – Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Cipta ;

¹⁷⁶Budi Santoso, *Op Cit*, hal 1.

¹⁷⁷O.K. Saidin, *Op Cit*, hal 53.

4. Undang – Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman ;
5. Undang – Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang ;
6. Undang – Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri ;
7. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu .

Oleh karena itu, HKI merupakan hak yang muncul karena hasil kreatifitas intelektual seseorang, dengan syarat harus dituangkan dalam bentuk nyata (ada dimensi fisiknya), ada kreatifitas, sehingga tidak boleh sekedar ide, gagasan, konsep, fakta tertentu yang tidak mempunyai dimensi fisik. Dengan demikian HKI hanyalah melindungi ekspresi ide, gagasan, konsep atau fakta tertentu dan bukan memberikan perlindungan pada ide, gagasan, konsepnya.¹⁷⁸

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan – pembatasan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku. Termasuk dalam cakupan hak cipta adalah karya ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusastraan. Satu hal yang perlu

¹⁷⁸ *Loc Cit.*

dicermati adalah, bahwa yang dilindungi dalam hak cipta adalah haknya, bukan benda yang merupakan perwujudan dari hak tersebut. Jadi jelaslah bahwa yang dilindungi dalam hak cipta adalah benda immateriil (benda tidak berwujud) yaitu dalam bentuk hak.

C.2. Ruang Lingkup dan Konsep Kepemilikan dalam Hak Cipta

a. Ruang Lingkup Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan – pembatasan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, adapun yang termasuk dalam cakupan hak cipta adalah karya ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusastraan.

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Pengumuman dan Perbanyakkan merupakan ruang lingkup di dalam hak cipta, definisi dari pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Sedangkan perbanyakkan

merupakan penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan – bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan secara permanen atau temporer.

Termasuk kategori mengumumkan adalah pembacaan, pengedaran, penyiaran, penayangan, penyebaran ciptaan, pameran. Termasuk kategori memperbanyak ciptaan adalah menambah jumlah suatu ciptaan termasuk didalamnya adalah mengalih wujudkan suatu ciptaan, misalnya: ciptaan lagu difilmkan, novel dibuat sinetron atau lukisan dibuat fotografi dan sebagainya.

Dasar filosofis berlakunya hak cipta adalah sesuai dengan konsepsi hak milik yang bersifat immateriil yang merupakan hak kebendaan. Hak kebendaan mempunyai sifat *Droit de suit* yaitu senantiasa mengikuti dimana benda tersebut berada, sehingga pemilik boleh melakukan tindakan hukum apa saja terhadap haknya. Adapun pembatasan waktu pemilikan hak cipta dalam jangka waktu selama hidup ditambah 50 (lima puluh) tahun, untuk tujuan agar hak cipta tidak tertahan lama pada tangan seorang pencipta sebagai pemiliknya, sehingga setelah si pencipta meninggal dunia dan ditambah dengan 50 (lima puluh) tahun, selanjutnya hak tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat luas secara bebas sebagai milik umum (*public domain*), artinya masyarakat boleh mengumumkan

atau memperbanyak tanpa harus meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak dan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Undang – undang hak cipta membedakan jangka waktu perlindungan bagi ciptaan pencipta yang dilindungi oleh hak cipta. Bagi ciptaan: buku, pamflet dan semua karya tulis lain; drama atau drama musikal, tari, koreografi; segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat dan seni patung; seni batik; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; arsitektur; ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain; alat peraga; peta; terjemahan; tafsiran; saduran dan bunga rampai, berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Sementara untuk ciptaan yang telah disebutkan di atas yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

Sedangkan hak cipta atas ciptaan; program komputer, sinematografi; fotografi; database dan karya hasil pengalihwujudan diberikan perlindungan selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Hak cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan diberikan perlindungan selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Seluruh karya cipta yang dilindungi oleh Undang – undang Hak Cipta Tahun 2002 yang dimiliki dan dipegang

oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Selama jangka waktu perlindungan hak cipta, pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. Namun demikian hak eksklusif ini tidak bersifat mutlak karena UUHC Tahun 2002 membenarkan adanya penggunaan secara wajar (*fair dealing*) sehingga tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak cipta. Penggunaan secara wajar antara lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan dan lain sebagainya.

Pada dasarnya penggunaan secara wajar (*fair dealing*) untuk menyeimbangkan antara kepentingan pencipta dengan kepentingan umum (masyarakat). Meskipun sebenarnya merupakan pelanggaran, namun selama tidak bertentangan dengan pemanfaatan komersial dari pemegang hak cipta. Penggunaan hak cipta secara wajar ini juga diakui negara lain seperti Australia.

Suatu ciptaan dapat didaftarkan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini berarti bahwa apabila dari pihak pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengajukan permohonan maka pendaftaran tidak akan diselenggarakan oleh departemen Hukum dan HAM, jadi pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau

pemegang hak cipta dan timbulnya perlindungan atas suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti bahwa suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi (*automatic protection*). Pasal 36 UUHC Tahun 2002 menyebutkan bahwa pendaftaran ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan. Pendaftaran atas suatu ciptaan ditujukan untuk kemudahan pembuktian kepemilikan hak atas suatu ciptaan.

Pendaftaran atas suatu ciptaan dapat dilakukan oleh seorang pencipta atau pemegang hak cipta, dua orang atau lebih dan dapat pula diajukan oleh badan hukum. Persyaratan mengenai pendaftaran ciptaan diatur di dalam UUHC Tahun 2002 yang diatur di dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 43.

Kekuatan dari suatu pendaftaran ciptaan hapus karena adanya penghapusan atas permohonan orang lain atau suatu badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta atau pemegang hak cipta atau dapat juga disebabkan karena telah lampau waktu atau karena dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Prinsip – prinsip dasar yang terdapat pada hak cipta yaitu:¹⁷⁹

¹⁷⁹ Eddy Damian, *Op Cit*, hal. 99

1) Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli.

Dari prinsip ini ditentukan beberapa prinsip, yaitu :

- a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak – hak yang diberikan undang – undang.
- b. Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain.
- c. Karena hak cipta adalah hak khusus maka tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta.

2) Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).

3) Suatu ciptaan tidak selalu harus diumumkan untuk memperoleh hak cipta.

4) Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui oleh hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

5) Hak cipta bukan hak mutlak (*absolute*)

b. Konsepi Kepemilikan Hak dalam Hak Cipta

Kecerdasan intelektual masyarakat dalam suatu bangsa memang sangat ditentukan oleh seberapa jauh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh individu – individu dalam suatu Negara. Kreatifitas manusia untuk melahirkan karya – karya intelektualitas yang bermutu seperti hasil penelitian, karya sastra dan

karya seni yang bernilai tinggi serta apresiasi budaya yang memiliki kualitas seni yang tinggi tidak lahir begitu saja. Kelahirannya memerlukan “energi” dan tidak jarang diikuti dengan pengeluaran biaya – biaya yang besar.¹⁸⁰

Karya cipta sebagai hasil kreatifitas manusia dengan akal budinya tidak serta merta tercipta begitu saja, dengan tenaga dan biaya yang dikeluarkan, pada prinsipnya juga membutuhkan suatu adanya perlindungan dan penghargaan terhadap karya cipta mereka. Secara umum, berdasarkan teori, dibagi dalam 4 (empat) macam.¹⁸¹

Pertama: Teori Reward, yang menyatakan bahwa kepada para penemu dan pencipta diberikan suatu penghargaan dan pengakuan.

Kedua, Teori Insentif, yang menyatakan bahwa insentif diberikan kepada para penemu dan pencipta yang telah berhasil melahirkan karya intelektualnya itu guna merangsang upaya atau kreatifitas menemukan dan mencipta lebih lanjut.

Ketiga, Teori Risk, yang menyatakan bahwa pada dasarnya karya intelektual manusia itu bersifat rintisan, sehingga ada resiko oleh pihak lain untuk me-*refers* atau mengembangkan lebih lanjut dari karya intelektual tersebut.

Keempat, Teori Public Benefit, atau *Teori Economic Growth Stimulus*, atau *Teori More Things Will Happens*, yang menyatakan

¹⁸⁰O. K. Saidin, *Op Cit*, hal 56.

¹⁸¹Rooseno Harjowidigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman*. Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), 2005, hal. 34

bahwa karya intelektual manusia itu merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi.

Berbeda dengan hak kekayaan perindustrian pada umumnya, dalam hak cipta terkandung pula hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*) dari pemegang hak cipta. Adapun yang dimaksud dengan hak ekonomi (*economic right*) adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas hak cipta. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan hak ciptanya tersebut oleh dirinya sendiri, atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi.¹⁸² Ada 8 (delapan) jenis hak ekonomi yang melekat pada hak cipta, yaitu:¹⁸³

- a. Hak reproduksi (*reproduction right*), yaitu hak untuk menggandakan ciptaan. UUHC 2002 menggunakan istilah perbanyakan.
- b. Hak adaptasi (*adaptation right*), yaitu hak untuk mengadakan adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada. Hak ini diatur dalam *Bern Convention*.
- c. Hak distribusi (*distribution right*), yaitu hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam

¹⁸²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hal 19.

¹⁸³Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori Dan Prakteknya Diindonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hal 65-72

bentuk penjualan atau penyewaan. Dalam UUHC 2002, hal ini dimasukkan dalam hak mengumumkan.

- d. Hak pertunjukan (*performance right*), yaitu hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukan atau penampilan oleh pemusik, dramawan, seniman, peragawati. Hak ini diatur dalam *Bern Convention*.
- e. Hak penyiaran (*broadcasting right*), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi dan transmisi ulang. Dalam UUHC, hak ini dimasukkan dalam hak mengumumkan.
- f. Hak program kabel (*cablecasting right*), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel. Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran, tetapi tidak melalui transmisi melainkan kabel.
- g. *Droit de suite*, yaitu hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan.
- h. Hak pinjam masyarakat (*public lending right*), yaitu hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat. Hak ini berlaku di Inggris dan diatur dalam *Public Lending Right Act 1979, The Public Lending Right Scheme 1982*.

Selanjutnya yang dimaksud dengan hak moral (*moral right*) adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta atau penemu. Hak moral melekat pada pribadi pencipta.

Hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan, dan integritas yang hanya dimiliki pencipta. Kekal artinya melekat pada pencipta selama hidup bahkan setelah meninggal dunia. Termasuk dalam hak moral adalah hak – hak yang berikut ini:¹⁸⁴

1. Hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya namanya tetap dicantumkan pada ciptaannya.
2. Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan tanp; persetujuan pencipta atau ahli warisnya.
3. Hak pencipta untuk mengadakan perubahan pada ciptaan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.

Hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian dengan cara:¹⁸⁵

1. Pewarisan

Proses pengalihan hak cipta terjadi apabila pencipta meninggal dunia maka secara otomatis kepemilikan berpindah kepada garis lurus ke bawah (anak). Apabila keturunan garis lurus tidak ada maka kepemilikan beralih kepada saudara

¹⁸⁴ Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hal 21-22.

¹⁸⁵ Etty Susilowati, *"Bunga Rampai Hak Kekayaan Inetelektual"*, Sentra Pendidikan Manajemen HKI Undip Semarang, hal 13

sekandung. Jika pencipta hidup seorang diri maka kepemilikan kepada negara.

2. Hibah

Pemilik hak cipta menghibahkan ciptaannya kepada seseorang atas dasar perjanjian dengan akta notaris maupun dengan akta di bawah tangan. Kepemilikan dapat beralih sebagian atau secara keseluruhan sesuai dengan perjanjian kepada orang yang diberi hibah.

3. Wasiat

Surat wasiat dengan akta notaris dapat juga dibuat oleh pemilik sendiri untuk diwariskan kepada pihak lain yang dikehendakinya, setelah surat wasiat berlaku maka kepemilikan berpindah kepada pihak yang diberi wasiat.

4. Perjanjian tertulis.

Proses pengalihan ini terjadi dengan dibuatnya suatu perjanjian sesuai kesepakatan antara pemilik dengan pihak lain tentang ciptaan tertentu baik sebagian atau secara keseluruhan.

D. SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA

D.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum di dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan – kepentingan

yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan – benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil – kecilnya. Perlindungan terhadap kepentingan – kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan lain pihak. Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum.

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), ditemukan tentang adanya perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, untuk itu setiap yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi – aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹⁸⁶ Sedangkan menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan

¹⁸⁶Satjipto rahardjo, *Sisi – sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta; Penerbit Kompas, 2003, hal 121.

perlindungan hukum kepada pihak – pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹⁸⁷

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek – subjek hukum melalui peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:¹⁸⁸

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang – undangan dengan maksud untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha serta memberikan rambu – rambu atau batasan – batasan kepada pelaku usaha dalam melakukan kewajibannya.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa tanggungjawab perusahaan, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau pelaku usaha melakukan pelanggaran.

¹⁸⁷Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor Fidusia*, (<http://Jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>, 2004, hal 1.

¹⁸⁸Musrihah, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta, Magister Ilmu Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2000), hal 20.

Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

Perlindungan hukum dapat dilakukan secara publik maupun secara privat. Perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas perlindungan hukum yang disediakan oleh ketentuan – ketentuan yang bersifat publik.

D.2. Sistem Perlindungan Hak Cipta

Auteurswet 1912 yang merupakan UUHC Belanda yang diberlakukan di Indonesia merupakan Undang – undang hak cipta Belanda yang berdasarkan pada ketentuan Konvensi Internasional di bidang hak cipta, yaitu *Bern Convention* 1886, yang terakhir diperbaharui di Perancis tahun 1971. Sebagaimana diketahui bahwa *Bern Convention* dibuat atas dasar tiga prinsip utama yaitu *National Treatment* atau prinsip *Assimilation*, prinsip *Automatic Protection*, dan prinsip *Independence of Protection*.¹⁸⁹

Prinsip *Automatic Protection* menyebutkan bahwa perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis tanpa didasarkan pada formalitas tertentu, seperti halnya pendaftaran ciptaan ataupun penggunaan *copyright notice*. Prinsip inilah yang mendasari perundangan hak cipta di berbagai negara di penjuru dunia yang pada umumnya memberikan

¹⁸⁹Budi Santoso, *Op Cit*, hal 174.

pengakuan bahwa hak cipta muncul secara otomatis setelah selesainya karya dibuat dalam bentuk tertentu (*tangible form*), tanpa diperlukan adanya tindakan seperti halnya pendaftaran.¹⁹⁰

Bern Convention sangat berpengaruh dalam pengaturan prinsip dasar hak cipta di banyak negara di dunia, yang memberikan pengakuan *Automatic Protection* tanpa diperlukan tindakan formalitas tertentu, seperti halnya pendaftaran ciptaan. Prinsip tersebut nampak jelas dalam *Auteurswet* 1912 baik yang berlaku di Belanda maupun yang diberlakukan di Indonesia. Namun demikian dalam UUHC nasional yang pertama kali dibuat, yaitu Undang – undang No 6 Tahun 1982 diatur mengenai pendaftaran ciptaan mendampingi prinsip dasar *Automatic Protection* yang dijadikan dasar pengakuan hak cipta.

Undang – undang Hak Cipta tahun 1982 tentang hak cipta telah beberapa kali diubah terakhir dicabut dengan Undang – undang No 19 Tahun 2002. namun demikian substansi yang mengatur pendaftaran hak cipta tidak banyak dilakukan perubahan, artinya UUHC Tahun 2002 juga mengatur mengenai pendaftaran ciptaan. Perbedaan yang tampak hanya pada persoalan yang berkaitan dengan pembatalan ciptaan terdaftar. Pada UUHC Tahun 1982 harus dilakukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan UUHC Tahun 2002 gugatan pembatalan dilakukan melalui Pengadilan Niaga setempat.

¹⁹⁰Budi Santoso, *Loc Cit.*

Berkaitan dengan adanya ide pendaftaran terhadap hak cipta bermula dari usulan untuk diadakannya pendaftaran ciptaan dalam beberapa pasal dalam RUU Hak Cipta LPHN (Lembaga Pembinaan Hukum Nasional) tahun 1966. Dalam penjelasan umumnya dijelaskan antara lain.....untuk memudahkan pembuktian dalam hal sengketa mengenai hak cipta, dalam undang – undang ini diadakan ketentuan – ketentuan mengenai pendaftaran ciptaan. Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaranpun hak cipta dilindungi. Hanya mengenai hak cipta yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan akan lebih memakan waktu pembuktian hak ciptanya daripada hak cipta yang didaftarkan oleh sebab pendaftaran yang pertama.¹⁹¹

Hak cipta pada prinsipnya melindungi ekspresi dari ide atau gagasan, bukan memberikan perlindungan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keahlian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Rasionalisasi bagi perlindungan hak cipta tidaklah sama dengan paten dan secara historis pertimbangan pemberian imbalan yang lebih besar telah diberikan atas hak – hak yang melekat pada artis –

¹⁹¹Budi Santoso, *Op Cit*, hal 175.

artis dan seniman yang kreatif untuk menerima upah secara wajar atas karya – karyanya daripada untuk memberikan insentif.¹⁹²

Sistem pendaftaran yang dilakukan terhadap hak cipta sendiri dikenal dengan 2 (dua) sistem yaitu, sistem *Stelsel Deklaratif* dan *Stelsel Konstitutif*. *Stelsel Konstitutif* letak titik beratnya ada tidaknya hak cipta tergantung pada pendaftarannya, jika didaftarkan (dengan sistem konstitutif) hak cipta itu diakui keberadaannya secara *de jure* dan *de facto* sedangkan pada *stelsel deklaratif* titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan, sampai orang dapat membuktikan sebaliknya. Dengan rumusan lain, pada sistem deklaratif sekalipun hak cipta itu didaftarkan undang – undang hanya mengakui seolah – olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara *de jure* harus dibuktikan lagi, jika ada orang lain yang menyangkal hak tersebut.¹⁹³

Sistem pendaftaran hak cipta menurut perundang – undangan Hak Cipta Indonesia yaitu Undang – undang No 19 tahun 2002 disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali sudah jelas

¹⁹²Cita Citrawinda Priapantja, *Op Cit*, hal 73.

¹⁹³O.K. Saidin, *Op Cit*, hal 89.

ada pelanggaran hak cipta.¹⁹⁴ Sikap pasif inilah yang membuktikan bahwa UUHC 2002 Indonesia menganut sistem pendaftaran deklaratif.¹⁹⁵

Hal ini dikuatkan pula oleh Pasal 36 UUHC 2002 yang menentukan *"pandaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan"*. Sedangkan ketentuan yang berkaitan dengan pendaftaran ciptaan terdapat di dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 44.

Ketentuan lain yang membuktikan UUHC 2002 menganut sistem pendaftaran deklaratif dapat dilihat dari bunyi Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa *"kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan, pada Ditjend HKI atau orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan"*.¹⁹⁶

Pada prinsipnya hak cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi dalam hal terjadi sengketa di pengadilan mengenai ciptaan yang

¹⁹⁴Republik Indonesia, tentang hak Cipta, Penjelasan umum berdasarkan UU No 6 Tahun 1982 jo UU No 7 tahun 1987. Dengan sikap pasif ini bukan berarti diperkenankan untuk mendaftarkan hak cipta orang lain yang sudah didaftarkan terlebih dahulu, jika kantor Hak Cipta menemukan hal semacam itu, pendaftaran hak cipta itu tetap ditolak. Dengan system deklaratif, tidaklah menjadi keharusan juridis pengakuan ada tidaknya hak cipta itu melalui pendaftaran. Tanpa didaftarkanpun hak cipta itu tetap diakui secara juridis, namun kelak jika ada yang menuntut kebalikannya, pembuktian secara faktual menjadi syarat mutlak. Dalam keadaan seperti ini sertifikat hak cipta yang telah diterbitkan dapat saja dibatalkan.

¹⁹⁵O.K. Saidin, *Op Cit*, hal 90.

¹⁹⁶O.K. Saidin, *Op Cit*, hal 91.

terdaftar dan yang tidak terdaftar, dan apabila pihak – pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian di persidangan.

Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaran hak cipta dilindungi, ketentuan tentang tidak mutlaknya suatu pendaftaran suatu ciptaan terkandung di dalam Pasal 35 ayat (4) yang berbunyi: Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu dalam pembuktiannya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA SENI TARI DI DALAM UNDANG – UNDANG NO 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

A.1. Ragam Dan Proses Penciptaan Tari

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna, dengan akal fikiran dan budinya itulah yang menjadi pembeda dengan makhluk yang lainnya. Akal fikiran dan budi manusia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, maka manusia dapat berfikir dan menciptakan sesuatu hal yang berwujud, selain itu juga manusia berkreasi dengan akal dan budinya dalam melihat dan memaknai tentang sesuatu hal yang ia lihat dan rasakan di dunia ini.

Manusia di dalam mencapai pola tingkatan perilakunya lebih tinggi apabila dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dari hasil pemanfaatan melalui ingatannya dan kemungkinan dari hasil ungkapan secara verbal (lisan) ataupun tulisan, dari pengalaman – pengalamannya ini manusia mampu mengingat dan mengumpulkan semua yang pernah ia lihat dan rasakan yang terwujudkan dalam berbagai macam bentuk atau bermacam wujud ekspresinya.

Sebagai makhluk yang berakal dan berbudi, manusia mampu menciptakan dan menkreasikan sesuatu di dalam berbagai bidang

kehidupan, diantaranya adalah bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi dan bidang – bidang lainnya.

Karya seni merupakan salah satu perwujudan kreasi manusia melalui akal budinya untuk mengekspresikan sesuatu keindahan yang ia lihat dan rasakan dalam hatinya, dan kemudian diwujudkan dalam bentuk suatu karya nyata, misalnya lagu, puisi, gerakan tubuh (tari) yang indah dan karya cipta yang lainnya. Hasil kreatifitas ini merupakan proses olah budi manusia yang menghasilkan suatu bentuk karya nyata tersebut biasa disebut dengan karya cipta.

Seni menurut Gendhon Humardani merupakan "wujud yang dibentuk atau dibuat dengan memperhatikan garapan mediumnya, tidak ditujukan untuk keperluan praktis, dan jangkauannya meliputi bentuk – bentuk 'pakai' sampai dengan bentuk – bentuk yang semata – mata untuk keperluan penghayatan".¹⁹⁷ Ditambahkan oleh Gendhon bahwa "karya seni adalah hasil tindakan yang berwujud, yang merupakan ungkapan citra (keinginan, kehendak) ke dalam bentuk fisik yang dapat ditangkap dengan indera."¹⁹⁸

Kesenian sebagai hasil proses kreatif manusia terbagi atas beberapa macam bentuk, kita dapat membaginya dalam kesenian tradisional dan kesenian modern, atau seni rupa dengan seni suara dan gerak, atau kita pun dapat membaginya dengan katagori yang kita buat sendiri karena seni itu sangat luas dan saling berkaitan satu sama

¹⁹⁷Rustopo, *Gendhon Humardani, 'Sang Gladiator', Arsitek Kehidupan Seni Tradisi Modern*, Yogyakarta: Yayasan Mahavhira, hal 98.

¹⁹⁸*Loc Cit.*

lain sehingga memungkinkan bagi kita untuk membagi katagori seni dengan katagori yang kita buat sendiri berdasarkan kesamaan dan perbedaan dari hasil keterkaitan itu.

Seni tari merupakan hasil kreatifitas manusia melalui olah fikir budinya yang terwujudkan melalui gerakan tubuh yang memiliki makna estetik dengan iringan musik yang menambah keindahan dari sebuah tari tersebut. Seni tari merupakan seni pertunjukan yang biasanya dimainkan oleh banyak orang melalui gerakan tubuh dengan menggunakan kostum atau pakain yang khas merupakan suatu satu kesatuan yang utuh.

Tari sebagai suatu cabang kesenian pada dasarnya substansi pokoknya merupakan gerak dan ritme, gerak dalam pandangan John Martin merupakan pengalaman fisik yang paling elementer dari kehidupan manusia. Gerak tidak hanya terdapat pada denyutan – denyutan di seluruh tubuh manusia untuk tetap dapat memungkinkan manusia hidup, tetapi gerak juga terdapat pada ekspresi dari segala emosional manusia.¹⁹⁹

Apabila diperinci ada beberapa elemen – elemen komposisi tari yang harus diketahui, yaitu; gerak tari, desain lantai atau *floor design*, desain atas atau *air design*, desain musik, desain dramatik, dinamika, koreografi kelompok atau *group choreography*, tema tata rias dan

¹⁹⁹ John Martin, *The Modern Dance*, New York: Dance Horizons, Inc, 1965, hal 8.

kostum, pop tari, pementasan atau staging, tata lampu dan penyusunan acara.²⁰⁰

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Yogyakarta, maka secara umum pada intinya tari dikelompokkan atau di bagi ke dalam 3 (tiga) besar, yaitu:²⁰¹

1) Tari Tradisional Klasik

Merupakan tari yang berasal dan berkembang di Kraton yang biasanya dilakukan oleh raja dan bangsawan, tari klasik ini biasanya memiliki pakemnya (aturan atau ketentuan baku) memiliki nilai estetis yang tinggi dan bersifat magis dan disakralkan. Karena dalam penciptaannya biasanya dilakukan dengan tahapan – tahapan yang dilakukan secara magis dan bersifat sakral di dalam lingkungan Kraton. Tari klasik ini memiliki maksud dan sejarah tersendiri di dalam proses penciptaannya, artinya di dalam penciptaan tari ini merupakan ciptaan dari raja – raja terdahulu yang berasal dari empu²⁰² di lingkungan Kraton yang merupakan warisan dari keraton dan harus dilestarikan. Tari Klasik Kraton ini biasanya memiliki durasi waktu yang lama dan masih menggunakan peralatan musik yang tradisional (masih menggunakan gamelan).

²⁰⁰ Soedarsono, *Tari – Tarian Indonesia* Pengembangan Kebudayaan, Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1977, hal 41

²⁰¹ Hasil wawancara dari beberapa seniman tari di Yogyakarta.

²⁰² Empu merupakan penyebutan nama bagi abdi dalem keraton yang menciptakan sebuah tarian di lingkungan keraton.

2) Tari Tradisional Kerakyatan

Tari Tradisional Kerakyatan biasanya hidup dan berkembang di dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu yang biasanya berpijak dari unsur – unsur budaya masyarakat setempat. Tari kerakyatan ini bersifat spesifik artinya tarian ini merupakan perwujudan dari jati diri dan kebiasaan – kebiasaan yang biasa dilakukan oleh suatu masyarakat tertentu, tentu saja tari kerakyatan ini juga memiliki dan menggambarkan tentang sesuatu yang merupakan ungkapan kehidupan di dalam masyarakat itu. Tari kerakyatan ini biasanya bersifat anonim atau tidak diketahui siapa penciptanya, tari ini juga merupakan warisan budaya dari leluhur mereka sehingga ada kewajiban dari masyarakat setempat untuk tetap melestarikan dan mempertahankannya sebagai identitas budaya dari masyarakat setempat. Tari Tradisional Kerakyatan ini biasanya memiliki durasi waktu yang lama dan masih menggunakan peralatan musik yang tradisional (masih menggunakan gamelan).

3) Tari Kreasi Baru atau Kontemporer

Tari kreasi baru merupakan suatu tarian yang tidak mengikuti pakem yang ada pada tari tradisional atau dengan kata lain bahwa tari ini sudah lepas dari aturan – aturan baku yang ada pada tari tradisional. Tari ini merupakan perwujudan ekspresi dari si pencipta tari yang diungkapkan dalam wujud

gerak tubuh, biasanya penciptaan tari ini merupakan perwujudan dari penciptanya terhadap apa yang ia lihat dan rasakan, dan biasanya durasi waktunya tidak begitu lama dan menggunakan perlatan musik yang modern (tidak lagi menggunakan gamelan). Meskipun demikian bahwa tari kreasi baru atau disebut juga tari modern ini ada yang masih berpijakan dari pakem pada tari tradisional, dan tidak sedikit juga tari kreasi baru ini merupakan salah satu bentuk kreasi terhadap tari – tari klasik dan kerakyatan, biasanya para seniman tari melakukan pengubahan terhadap durasi waktunya, kostum dan gerakannya.

Tari kreasi baru atau tari modern yang muncul pada tahun lima puluhan sebagai refleksi dari kebebasan manusia dalam segala bidang. Pada intinya tari kreasi baru atau modern merupakan suatu bentuk kreasi dari seniman tari yang ingin mencoba untuk keluar dari tari tradisional yang menurut mereka sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman, karena tari tradisional memiliki durasi pertunjukan yang cukup lama, dan cukup menjemukan bagi penonton sehingga perlu diadakan perubahan. Tokoh dari tari kreasi ini adalah Bagong Kussudiardja dan RM Wisnoe Wardhana, biasanya Tari Kreasi ini merupakan penciptaan dari seorang pencipta tari atau koreografer yang berasal dari idenya terhadap sesuatu hal yang

ia lihat dan rasakan dan diwujudkan dalam bentuk gerakan tubuh.

Tari kreasi baru pada umumnya merupakan suatu garapan tari yang didasari pemikiran yang disesuaikan dengan tuntutan masa kini, atau dengan kata lain tari yang digarap untuk mencari nilai – nilai baru dalam arti pengolahan gerak tari serta unsur – unsur seni lainnya sebagai penunjang dipilih berdasarkan relevansi terhadap kondisi kemanusiaan. Menurut Sugita²⁰³ Tari Kreasi Baru itu sendiri dapatlah dibagi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu Tari Kreasi Baru yang merupakan perkembangan dari tari tradisional atau sebuah tari yang komposisinya masih menggunakan pola dasar tari tradisional dan ada pula yang merupakan komposisi tari kreasi baru yang lepas sama sekali dari ikatan serta penggunaan materi – materi dari tradisi/tari kontemporer.²⁰⁴

Seni tradisi adalah seni yang stereotip, taat asas, memegang teguh *pakem* atau ketentuan yang ada sehingga kreatifitas hampir – hampir tidak diperlukan, sedang sementara ini seni modern adalah seni yang haus akan perubahan, yang amat

²⁰³ **Sugita** adalah seniman tari atau koreografer Yogyakarta, pengelola LPK Tari Satya Laksita Didik Nini Thowok, LPK ini merupakan salah satu sanggar tari yang banyak menghasilkan tari kreasi baru. **Sugita** telah banyak menciptakan tarian sebagai hasil kreasinya, diantaranya Tari Kelinci.

²⁰⁴ Wawancara dengan **Sugita** pada hari Senin tanggal 2 Maret 2008 jam 10.30 WIB di ruang latihan tari sanggar LPK Tari Satya Laksita Didik Nini Thowok, JL Raya Godean Yogyakarta

menghargai inovasi dan kreasi.²⁰⁵ Adapun seni modern adalah jenis seni yang benar – benar berbeda secara diametral dengan seni tradisi, seni modern tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, juga oleh ikatan tradisi (*the spirit of the race*) atau ikatan zaman (*the spirit of the age*), demikian pula oleh ketentuan – ketentuan tentang isi atau temanya.²⁰⁶

Dari pemaparan di atas tentang pembagian tari, maka dapat di jelaskan dalam wujud tabel berikut ini:

²⁰⁵Soedarso Sp, *Trilogi Seni: Penciptaan Eksistensi dan Kegunaan Seni*, Yogyakarta: Badan Penerbit Institut Seni Indonesia Yogyakarta, 2006, hal 124.

²⁰⁶Soedarso Sp, *Sejarah Perkembangan Seni Rupa Modern*, Jakarta: CV Delapan puluh Enterprise bekerjasama dengan Badan Penerbit ISI Yogyakarta, 2000, hal 4.

Tabel 1.
Pembagian Tari

No	Jenis Tari	Sifat Tari	Iringan Musik	Durasi Waktu	Pencipta
1	Tari Klasik Kraton	Mistis, sakral, estetis tinggi, upacara Kraton	Gamlen, peralatan musik Jawa	Lebih dari 1 jam	Raja dan atau Empu tari zaman dahulu serta abdi dalem Kraton
2	Tari Kerakyatan	Mistis, upacara kerakyatan, estetis sederhana	Gamelan, peralatan musik Jawa	Lebih dari 1 jam	Tidak diketahui penciptanya, bersifat <i>folklore</i>
3	Tari Kreasi Baru atau Kontemporer	Estetis, hiburan	Musik modern	Kurang lebih 1 jam	Seniman tari atau Koreografer

(Sumber : Hasil wawancara dengan beberapa seniman tari di Yogyakarta)

Di Yogyakarta tempat dimana penulis melakukan penelitian terdapat juga 3 (tiga) besar pembagian tari tersebut, *pertama* tari tradisional klasik yang berasal dari keraton diantaranya adalah tari Bedaya, tari Lawung, tari Wayang Wong, tari Jaka Tarub, tari Bedaya Semang, tari Menak, Tari Serimpi Renggowati dan tari – tari keraton lainnya yang dilestarikan dan dipelihara di Kraton Yogyakarta sebagai warisan budaya Kraton Yogyakarta. *Kedua* tari tradisional kerakyatan yaitu tari Badui yang berasal dari desa Semampir Kecamatan Sleman dan berkembang di daerah Tempel Yogyakarta, tari Kuda Lumping, tari Angguk dan tari Jathilan yang hidup dan berkembang di daerah Yogyakarta yaitu desa Dlingo Kecamatan Bantul. *Ketiga* tari kreasi baru yang berasal dari penciptaan individual seorang pencipta tari atau koreografer diantaranya tari Hanoman, tari Layang – layang, tari Batik, tari Kelinci, dan tari – tari lainnya yang merupakan karya cipta sebagai hasil kreasi dari seniman tari atau koreografer Yogyakarta.

Y Sumandiyo Hadi²⁰⁷ menjelaskan bahwa dalam pembabakan (pembagian) tari tersebut, pada dasarnya setiap tarian memiliki karakter – karakter tersendiri, artinya bahwa dalam setiap rezim tari itu tidak dapat dilepaskan dari karakteristik masyarakat pendukungnya sebagai komunitas yang melestarikan dan mencipta tarian itu. Sejalan dengan itu Kuswarsantya juga menjelaskan bahwa di dalam setiap rejim dari pembagian tari tersebut harus dihargai di dalam semua

²⁰⁷ **Y Sumandiyo Hadi** adalah Guru Besar pada jurusan tari di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, beliau juga seorang seniman tari di Yogyakarta, beliau juga pernah mencipta beberapa tari.

bentuk perwujudan atau pencerminan dari kreasi masyarakat setempat sebagai basis sosial pendukungnya.²⁰⁸

Menurut Kuswarsantya²⁰⁹ bahwa setiap rezim tari memiliki sifat yang selalu menjadi identitas dan kekhasannya dari suatu penciptaan tari, menurutnya di dalam tari tradisonal klasik dan kerakyatan biasanya lebih bersifat komunal, sedangkan untuk tari kreasi baru atau tari modern biasanya cenderung individualistik.²¹⁰

A.1.1. Prinsip Perlindungan Karya Cipta Menurut Undang – undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Hak cipta merupakan istilah hukum untuk menyebut atau menamakan hasil kreasi atau karya cipta manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Istilah tersebut adalah terjemahan dari Inggris, yaitu *copyright*, yang padanan dalam bahasa Belanda adalah *auteur recht*. Para pihak yang terkait langsung dengan hak cipta adalah kaum ilmuwan, sastrawan, dan seniman. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan – pembatasan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sedangkan ciptaan merupakan

²⁰⁸Wawancara dengan **Y Sumandiyo Hadi** pada Selasa tanggal 3 Maret 2009 jam 17.00 WIB.

²⁰⁹**Kuswarsantya, MHum** adalah dosen seni tari di Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau adalah salah satu abdi dalem Keraton Yogyakarta dengan nama **KRT Condrowaseso**, disamping sebagai dosen beliau juga aktif dalam bidang kesenian terutama seni tari. **Kuswarsantya, MHum** juga sebagai pengelola sanggar tari Irama Citra yang merupakan salah satu sanggar tari tradisonal klasik Keraton Yogyakarta.

²¹⁰Wawancara dengan **Kuswarsantya, MHum** pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2009 jam 11.00 WIB di rumah beliau yang beralamat di Kadipaten Kidul (KP) I No 355 Taman sari Yogyakarta.

hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.

Hak cipta pada prinsipnya melindungi ekspresi ide atau gagasan, bukan memberikan perlindungan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.²¹¹

Konvensi Bern merupakan konvensi yang khusus memberikan perlindungan bagi karya cipta seni dan sastra. Konvensi ini diadakan pada tahun 1886 dan diselenggarakan oleh Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia/WIPO. Indonesia menjadi anggota Konvensi Bern pada tahun 1997. Adapun ciptaan – ciptaan yang dilindungi di dalam konvensi tersebut antara lain; karya tertulis seperti buku dan laporan, musik, karya – karya drama seperti sandiwara dan koreografi (tari), karya seni seperti lukisan, gambar dan foto, karya – karya arsitektur; dan karya sinematografi seperti film dan video.

Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar. Hal ini berarti berarti bahwa hak cipta

²¹¹Cita Citrawinda Priapantja, *Op Cit*, hal 73.

lahir setelah selesainya suatu karya cipta sebagai ciptaan si pencipta dalam bentuk yang nyata atau telah berwujud.

Hak cipta merupakan bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan hukum hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut HKI). Istilah HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (selanjutnya disebut IPR) yang dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. IPR sendiri pada prinsipnya merupakan perlindungan hukum atas HKI yang kemudian dikembangkan menjadi suatu lembaga hukum yang disebut "*Intellectual Property Right*".

Konsep mengenai HKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati. Berdasarkan konsep tersebut, maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi HKI. Tujuan pemberian perlindungan hukum ini untuk mendorong dan menumbuhkembangkan semangat berkarya dan mencipta.

Kerangka dasar pemikiran diberikan kepada seorang individu sebuah perlindungan hukum terhadap ciptaannya bermula dari teori yang tidak lepas dari dominasi pemikiran Mazhab atau Doktrin Hukum Alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal

seperti yang dikenal dalam Sistem Hukum Sipil (*Civil Law System*) yang merupakan sistem hukum yang dipakai di Indonesia. Filosofi pentingnya diberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta didasarkan pada teori hukum alam, dan juga dijustifikasi oleh penganut utilitarian yang menekankan bahwa kecerdasan prinsip – prinsip ekonomi, maka perlindungan hak cipta sangat dibutuhkan dalam rangka untuk memberikan insentif bagi pencipta untuk menghasilkan karya ciptanya. Adanya semangat untuk mencipta dari si pencipta maka sebenarnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut sistem hukum sipil, manusia mempunyai hak kekayaan intelektual yang alamiah yang merupakan produk olah pikir manusia. Ini berarti bahwa manusia mempunyai hak yang sifatnya alamiah atas produk yang materiil maupun immateriil yang berasal dari kerja intelektualnya dan harus diakui kepemilikannya. Jika konsep pemikiran yang demikian ini diterapkan pada hak cipta maka dapat dikatakan, bahwa teori tersebut di atas merupakan landasan yang paling hakiki yang dimiliki seorang pencipta yang karena kerja.

Menurut Budi Santoso bahwa di dalam konsep hak cipta, pengakuan mengenai saat munculnya hak cipta telah ada pada saat selesainya karya cipta dibuat dalam bentuk nyata, sehingga bisa

dilihat, didengar, atau dibaca.²¹² Hak cipta merupakan hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk:²¹³

- 1) Mengumumkan;
- 2) Memperbanyak ciptaannya;
- 3) Memberikan izin untuk 1 dan 2;
- 4) Bisa dengan alat atau cara lain sehingga ciptaan tersebut dapat dilihat, didengar, dibaca, oleh orang lain.

Undang – undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC 2002) merupakan produk hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap semua hasil kreatifitas dan intelektualitas manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, sebagai suatu institusi hukum yang melindungi karya seni yang diciptakan oleh seniman dan sastrawan serta karya intelektualitas seorang ilmuwan. Maka UUHC 2002 ini memberikan perlindungan hukum terhadap setiap kreatifitas manusia untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya, mengingat di dalam proses penciptaan karya cipta itu tidaklah mudah dan memerlukan pemikiran, dan biaya yang tidak sedikit maka sudah sewajarnya untuk dilindungi karya cipta setiap orang di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

²¹²Budi Santoso, *Op Cit*, hal 1.

²¹³*Loc Cit.*

Di dalam kerangka ciptaan yang mendapatkan hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip – prinsip dasar hak cipta, yakni:²¹⁴

- 1) Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli
- 2) Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)
- 3) Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta
- 4) Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/unpublished work*) kedua – duanya dapat memperoleh hak cipta.
- 5) Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
- 6) Hak cipta bukan hak mutlak (*absolute*)

Dari prinsip dasar ini telah melahirkan 2 (dua) sub prinsip, yaitu:

- a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak – hak yang diberikan undang – undang keaslian, sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
- b. Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau

²¹⁴Budi Agus Riswandi dan M Syamsudin, *Op Cit*, hal 11.

bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita – cita belum merupakan suatu ciptaan.

Adapun standar agar dapat dinilai sebagai hak cipta (*standart of copyright ability*) atas karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yaitu:

1. Perwujudan (*fixation*), yaitu suatu karya diwujudkan dalam suatu media ekspresi yang berwujud manakala pembuatannya ke dalam perbanyakan atau rekaman suara oleh atau berdasarkan kewenangan pencipta, secara permanent atau stabil untuk dilihat, direproduksi atau dikomunikasikan dengan cara lain, selama suatu jangka waktu yang cukup lama;
2. Keaslian (*originality*), yaitu karya cipta tersebut bukan berarti harus betul – betul baru atau unik, mungkin telah menjadi milik umum akan tetapi masih juga asli; dan
3. Kreatifitas (*creativity*), yaitu karya cipta tersebut membutuhkan penilaian kreatif mandiri dari pencipta dalam karyanya, yaitu kreatifitas tersebut menunjukkan karya asli.

Di dalam pembahasan mengenai hak cipta tentunya tidak lepas dari peristilahan pencipta dan ciptaan, di dalam Pasal 1 point 2 UUHC 2002 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pencipta adalah

seorang atau beberapa orang secara bersama – sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Sedangkan ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Di dalam hak cipta dibedakan antara pencipta dengan pemegang hak cipta, pemegang hak cipta merupakan pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta untuk melakukan pengumuman dan memperbanyak terhadap karya ciptanya, yang dimaksud dengan pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Sedangkan memperbanyak merupakan penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan – bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan secara permanen atau temporer.

Undang – undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan beberapa bentuk hukum perlindungan terhadap hasil kreatifitas manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, berikut ini akan dipaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan perlindungan tersebut:

1. Objek Perlindungan Hak Cipta

Adapun yang menjadi objek dari hak cipta sesuai dengan Pasal 12 Undang – undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri dari:

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, perwayangan, dan pantomim.
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan.

- g. Arsitektur.
- h. Peta.
- i. Seni batik.
- j. Fotografi.
- k. Sinematografi.
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Di samping ciptaan di atas yang dilindungi ada beberapa ciptaan yang dilindungi oleh Undang – undang No 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 10 yang menyatakan:

- (1).Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- (2).Negara memegang hak cipta atas *folklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadikan milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
- (3).Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.

Sedangkan di dalam Pasal 11 diterangkan tentang perlindungan terhadap karya cipta yang tidak diketahui

penciptanya atau pencipta yang memakai nama samaran dalam hal ciptaan itu belum diterbitkan maupun telah diterbitkan. Adapun lebih jelasnya bunyi Pasal 11 adalah sebagai berikut; Pasal 11 ayat (1)

Jika suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan, negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya.

Pasal 11 ayat (2)

Jika suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya, penerbit memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya.

Pasal 11 ayat (3)

Jika suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya dan/atau penerbitnya, negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya.

2. Lingkup Hak Cipta

Adapun yang menjadi ruang lingkup hak cipta adalah berkaitan dengan Pengumuman dan Perbanyakan, disebutkan di dalam Pasal 1 point 5 dan 6, definisi dari *pengumuman* adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau

melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Sedangkan *perbanyakan* merupakan penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan – bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan secara permanen atau temporer.

3. Jangka Waktu Perlindungan

UUHC 2002 mengatur tentang jangka waktu perlindungan terhadap semua hasil kreatifitas manusia, pengaturan tentang jangka waktu perlindungan tersebut diatur di dalam beberapa pasal, pasal – pasal tersebut antara lain Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34. Ada 2 (dua) hal yang menjadi inti dari pasal – pasal tersebut, *pertama* bahwa jangka waktu perlindungan berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, *kedua* bahwa hak cipta yang dikuasai oleh Negara dan hak moral atas suatu ciptaan seseorang berlaku tanpa batas.

4. Hak yang terdapat di dalam Hak Cipta

Berbeda dengan hak kekayaan perindustrian pada umumnya, dalam hak cipta terkandung pula hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*) dari pemegang

hak cipta, hak moral ini diatur di dalam Pasal 24 UUHC 2002. Adapun yang dimaksud dengan hak ekonomi (*economic right*) adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas hak cipta, hak ekonomi ini disebutkan di dalam Pasal 49 UUHC 2002. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan hak ciptanya tersebut oleh dirinya sendiri, atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi.²¹⁵ Ada 8 (delapan) jenis hak ekonomi yang melekat pada hak cipta, yaitu:²¹⁶

- i. Hak reproduksi (*reproduction right*), yaitu hak untuk menggandakan ciptaan. Dalam UUHC 2002 menggunakan istilah perbanyakan.
- j. Hak adaptasi (*adaptation right*), yaitu hak untuk mengadakan adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada. Hak ini diatur dalam *Bern Convention*.
- k. Hak distribusi (*distribution right*), yaitu hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan. Dalam UUHC 2002, hal ini dimasukkan dalam hak mengumumkan.
- l. Hak pertunjukan (*performance right*), yaitu hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukan

²¹⁵ *Loc Cit.*

²¹⁶ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hal 65-72

atau penampilan oleh pemusik, dramawan, seniman, peragawati. Hak ini diatur dalam *Bern Convention*.

- m. Hak penyiaran (*broadcasting right*), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi dan transmisi ulang. Dalam UUHC, hak ini dimasukkan dalam hal mengumumkan.
- n. Hak program kabel (*cablecasting right*), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel. Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran, tetapi tidak melalui transmisi melainkan kabel.
- o. *Droit de suit*, yaitu hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan.
- p. Hak pinjam masyarakat (*public lending right*), yaitu hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat. Hak ini berlaku di Inggris dan diatur dalam *Public Lending Right Act 1979, The Public Lending Right Scheme 1982*.

Selanjutnya yang dimaksud dengan hak moral (*moral right*) adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta atau penemu. Hak moral melekat pada pribadi pencipta. Hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas

yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan, dan integritas yang hanya dimiliki pencipta. Kekal artinya melekat pada pencipta selama hidup bahkan setelah meninggal dunia. Termasuk dalam hak moral adalah hak – hak yang berikut ini:²¹⁷

1. Hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya namanya tetap dicantumkan pada ciptaannya.
2. Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan tanpa persetujuan pencipta atau ahli warisnya.
3. Hak pencipta untuk mengadakan perubahan pada ciptaan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.

Hak Moral itu sendiri terbagi ke dalam 2 (dua) hal, yaitu;²¹⁸

a. Integrity Right

Merupakan hak untuk tetap dijaga keutuhan suatu ciptaan, pengubahan suatu ciptaan harus mendapat izin atau persetujuan pencipta atau ahli warisnya (mutilasi karya sastra/lagu)

b. Paternity Right

Hak untuk tetap dicantumkan nama si pencipta dimanapun ciptaan itu berada.

²¹⁷ *Loc Cit.*

²¹⁸ Budi Santoso, Hand Out Mata Kuliah Hak Cipta: Pengenalan Royalti Ciptaan Lagu/Musik, Magister Hukum Undip Kelas HET-HKI, tahun 2008.

5. Pengecualian di dalam Hak Cipta

UUHC 2002 memberikan beberapa pembatasan terhadap pemanfaatan hak cipta, beberapa pembatasan terhadap pemanfaatan tersebut diatur di dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18.

Adapun yang menjadi rumusan pembatasan – pembatasan hak cipta sebagaimana yang diatur menurut UUHC 2002 Pasal 14 sampai dengan pasal 18 adalah berkisar terhadap hal – hal sebagai berikut:²¹⁹

a. Mengenai substansinya

Bahwa yang dianggap bukan pelanggaran hak cipta adalah; lambang Negara atau lagu kebangsaan, segala sesuatu yang diperbanyak atau diumumkan pemerintah, berita aktual, program komputer, ciptaan di bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra dalam huruf braille.

b. Mengenai cara – cara yang lazim dilakukan

Adapun yang dianggap bukan sebagai pelanggaran terhadap hak cipta dengan cara – cara yang lazim digunakan adalah berupa; reproduksi atau perbanyakan, pengumuman atau publikasi, pengambilan ciptaan, perubahan ciptaan, pembuatan salinan, penerjemahan ciptaan.

²¹⁹ *Loc Cit.*

c. Mengenai tujuan – tujuan tertentu yang dibolehkan.

Bukan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak cipta adalah berkaitan dengan; untuk kepentingan pendidikan, kepentingan penelitian, kepentingan penulisan karya ilmiah, kepentingan penyusunan laporan, kepentingan penulisan kritik, kepentingan peninjauan suatu masalah, kepentingan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan, kepentingan ceramah, kepentingan pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran, kepentingan aktivitasnya bagi perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan, pusat dokumentasi, kepentingan pembuatan salinan atau cadangan program komputer oleh pemilik program, kepentingan non komersial, kepentingan nasional.

6. Pengalihan Hak Cipta

Di dalam UUHC 2002 bahwa ketentuan yang berkaitan tentang pengalihan hak cipta diatur di dalam Pasal 3 dan Pasal 4. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUHC 2002 disebutkan bahwa; *“Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena: Pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab – sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang – undangan”*. Sedangkan Pasal 4 UUHC terbagi ke dalam 2 (dua) ayat, Pasal 4 ayat (1) berbunyi: *“Hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, yang setelah penciptanya*

meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan hak cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh melawan hukum". Sedangkan Pasal 4 ayat (2) berbunyi: "Hak cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan hak cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh melawan hukum".

7. Pendaftaran Hak Cipta

Di dalam UUHC 2002 pengaturan tentang pendaftaran diatur di dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, 42, Pasal 43 dan Pasal 44. Sistem pendaftaran hak cipta menurut perundang – undangan Hak Cipta Indonesia yaitu Undang – undang No 19 tahun 2002 disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak cipta. Sikap pasif inilah yang membuktikan bahwa UUHC 2002 Indonesia menganut sistem pendafatarn deklaratif.

Sistem pendaftaran deklaratif titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan, sampai orang dapat membuktikan sebaliknya. Dengan rumusan

lain, pada sistem deklaratif sekalipun hak cipta itu didaftarkan undang – undang hanya mengakui seolah – olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara *de jure* harus dibuktikan lagi, jika ada orang lain yang menyangkal hak tersebut.

Pada prinsipnya hak cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi dalam hal terjadi sengketa di pengadilan mengenai ciptaan yang terdaftar dan yang tidak terdaftar, dan apabila pihak – pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian di persidangan. Namun patut diingat bahwa pada prinsipnya di dalam hak cipta berdasarkan Konvensi Bern 1986 mengandung prinsip *Automatic Protection* disebutkan bahwa perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis tanpa didasarkan pada formalitas tertentu, seperti halnya pendaftaran ciptaan ataupun penggunaan *copyright notice*. Prinsip inilah yang mendasari perundangan hak cipta di berbagai negara di penjuru dunia yang pada umumnya memberikan pengakuan bahwa hak cipta muncul secara otomatis setelah selesainya karya dibuat dalam bentuk tertentu (*tangible form*), tanpa diperlukan adanya tindakan seperti halnya pendaftaran.

Di dalam penjelasan Pasal 35 ayat (4) juga disebutkan bahwa: ” *Pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan*

bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran". Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi.

A.2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Karya Cipta Seni Tari menurut Undang – undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

A.2.1. Perlindungan Karya Cipta Seni Tari Menurut Undang – undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang – undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan produk hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap semua hasil kreatifitas dan intelektualitas manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, sebagai institusi hukum yang melindungi karya seni yang diciptakan oleh seniman dan sastrawan serta karya intelektualitas seorang ilmuwan. Maka UUHC 2002 ini memberikan perlindungan hukum terhadap setiap kreatifitas manusia untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya, mengingat di dalam proses penciptaan karya cipta itu tidaklah mudah dan memerlukan pemikiran, dan biaya yang tidak sedikit maka sudah sewajarnya untuk melindungi karya cipta setiap orang di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Kehadiran hukum di dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan – kepentingan

yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan – benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil – kecilnya. Perlindungan terhadap kepentingan – kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan lain pihak.

Undang – undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan beberapa perlindungan terhadap hasil kreatifitas manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, tari sebagai hasil kreatifitas manusia yang dapat disebut juga sebagai karya cipta juga diberikan perlindungan sebagaimana yang telah ditentukan oleh UUHC 2002. Berikut ini akan dipaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan perlindungan karya cipta seni tari tersebut jika berdasarkan kepada UUHC 2002:

1. Berkaitan dengan Objek Perlindungan Hak Cipta

Berkaitan dengan karya cipta seni tari sebagai salah satu objek perlindungan hak cipta sebagaimana yang telah ditentukan di dalam UUHC 2002, maka berdasarkan pada pengelompokan tari secara garis besar yang telah penulis sebutkan di atas, maka penulis mengidentifikasi perlindungan hukum terhadap 3 (tiga) macam jenis tari tersebut sebagai berikut:

a) Tari Tradisional Klasik Kraton

Untuk tari Klasik Kraton Yogyakarta maka dapat diidentifikasi ada 2 (dua) macam bentuk perlindungan terhadap

tarian, *pertama* untuk tari klasik Kraton yang tidak diketahui penciptanya dan tari klasik Kraton yang sudah diketahui penciptanya, dan penciptanya itu telah meninggal dunia serta telah berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah si pencipta itu meninggal dunia, maka bentuk perlindungannya masuk ke dalam kategori perlindungan Pasal 10 ayat (2) UUHC 2002, maka berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Negara adalah pemegang atas hak cipta tersebut. Adapun bunyi Pasal 10 ayat (2) adalah *"Negara memegang hak cipta atas folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya"*. Sehingga dapat dirumuskan bahwa tari Klasik Kraton yang tidak diketahui penciptanya dan tari Klasik Kraton yang sudah diketahui penciptanya, dan penciptanya itu telah meninggal dunia serta telah berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah si pencipta itu meninggal dunia yang sudah, maka menjadi milik umum, dan berlaku jugalah ketentuan Pasal 10 yat (3) yang menyebutkan bahwa: "Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut pada ayat (2), orang asing yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.

Kedua untuk karya cipta tari klasik Kraton yang diciptakan oleh penciptanya yang sudah meninggal dunia tetapi belum berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun, dan tari klasik Kraton Yogyakarta yang penciptaannya merupakan wujud persembahan dan pengabdian abdi dalem Kraton terhadap Sultan serta tari klasik Kraton Yogyakarta yang telah diadakan gubahan atau kreasi atas perintah dan ijin Sultan yang masih baru, maka tari klasik Kraton tersebut perlindungan hukumnya dikategorikan sebagai suatu karya cipta yang masuk ke dalam Pasal 12 UUHC 2002. Sehingga tari klasik Kraton yang masuk kategori di dalam pasal tersebut, maka pencipta (dalam hal ini adalah *empu tari* zaman dahulu dan abdi dalem) adalah sebagai pemegang atas hak cipta tersebut.

Sebagai catatan, menurut pendapat penulis bahwa untuk tari klasik Kraton yang merupakan hasil cipta *empu tari* pada zaman dahulu dan hasil cipta *abdi dalem* yang ide dasarnya berasal dari *empu* dan *abdi dalem*²²⁰ ini, jika kita merujuk pada UUHC 2002 yang menyebutkan tentang pengertian pencipta dan pemegang hak cipta. Maka jika mendasarkan pada proses penciptaan suatu tari klasik Kraton di Yogyakarta seperti hal yang tersebut di atas, menurut penulis bahwa Sultan adalah sebagai Pemegang hak cipta atas karya cipta tari yang diciptakan oleh *empu* dan *abdi*

²²⁰ Abdi dalem adalah orang yang dipercaya mengabdikan pada Kraton, atas keinginan pribadi untuk mengabdikan tanpa pamrih.

dalemnya, jika proses penciptannya itu murni yang ide dasarnya berasal dari si empu dan *abdi dalem* Kraton sehingga Pencipta tetap ada pada empu dan *abdi dalem* tersebut.

Namun adalah suatu pengecualian atas hak cipta yang jika ide dasarnya sebuah tari itu berasal dari Sultan, dan proses pembuatan atau penciptaan tari dilakukan oleh empu dan *abdi dalemnya* sebagai pegawainya maka karya cipta tari tersebut adalah milik Sultan. Mengingat bahwa Sultan adalah pimpinan atau raja di dalam Kraton sedangkan para empu dan *abdi dalem* adalah bawahannya atau dapat juga dikatakan sebagai bawahannya, sehingga jika kita merujuk pada UUHC 2002 di dalam Pasal 7 yang menyebutkan bahwa:

“Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu”.

Maka pencipta atas tari tersebut adalah raja atau Sultan sebagai pemilik hak atas ciptaan tari itu.

b) Tari Tradisional Kerakyatan

Tari ini biasanya hidup dan berkembang di dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu yang biasanya berpijak dari unsur – unsur budaya masyarakat setempat, dan penciptanya tidak diketahui, sudah menjadi warisan masyarakat setempat yang

diajarkan secara turun temurun serta di lestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat setempat. Sehingga bentuk perlindungannya masuk ke dalam kategori perlindungan Pasal 10 ayat (2) UUHC 2002.

Menurut penulis bahwa tari tradisional kerakyatan ini dapat disebut sebagai *folklore*. Sehingga jika kita merujuk pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) UUHC 2002, maka Negara adalah sebagai pemegang hak cipta atas tari tersebut. Adapaun redaksi Pasal 10 ayat (2) adalah sebagai berikut:

“ Negara memegang hak cipta atas folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya ”.

Folklore biasanya disampaikan secara turun temurun dari generasi ke generasi di dalam sebuah komunitas suatu masyarakat tertentu yang bisa dianggap sebagai suatu identitas dan tradisi masyarakat tersebut. *Folklore* dapat juga dikatakan sebagai semua pekerjaan seni dan sastra yang umumnya diciptakan oleh pencipta yang tidak diketahui identitasnya dan dianggap sebagai milik negara. *Folklore* sebagai suatu kebiasaan yang hidup dan berkembang di dalam suatu komunitas masyarakat biasanya memiliki sifat – sifat seperti berikut ini:

- a) Merupakan hak kolektif komunal,

- b) Merupakan karya seni,
- c) Telah digunakan secara turun temurun,
- d) Merupakan hasil kebudayaan rakyat,
- e) Belum berorientasi pasar,
- f) Negara pemegang hak cipta atas *folklore*
- g) Penciptanya tidak diketahui,
- h) Belum dikenal secara luas di dalam forum perdagangan internasional.

Sehingga dapat dikatakan bahwa tari Tradisional Kerakyatan ini perlindungan hukumnya dapat dimasukkan ke dalam Pasal 10 ayat (2) UUHC 2002. Sehingga jika kita merujuk kepada ketentuan Pasal 10 ayat (3) UUHC 2002, maka setiap orang bisa menggunakan tarian kerakyatan tersebut. Namun patut dicatat bahwa tari Tradisional Kerakyatan yang termasuk *folklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang hak ciptanya dipegang oleh Negara sebagai maksud untuk mencegah terjadinya praktik monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial oleh orang – orang tertentu, dan upaya ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tradisional Indonesia.

c) Tari Kreasi Baru atau Kontemporer

Tari ini hidup dan berkembang di zaman modern sekarang ini, biasanya merupakan tari yang sudah tidak mengikuti pakemnya atau sudah meninggalkan ketentuan yang menjadi aturan baku dalam tari terdahulu. Tari ini merupakan murni ide pemikiran dari seorang seniman tari yang hendak mengekspresikan sesuatu lewat bahasa gerak tubuh atas sesuatu yang ia lihat, rasakan dan proses perenungan terhadap sesuatu hal. Tidak dipungkiri bahwa tari kreasi baru ini ternyata ada juga yang merupakan hasil kreasi terhadap tari tradisional baik klasik maupun kerakyatan dan masih mengikuti pakemnya (aturan yang ada) namun dilakukan kreasi terhadap waktu, kostum dan iringan musiknya.

Karya cipta seni tari ini adalah suatu hasil kreatifitas dari seorang seniman tari yang murni hasil pemikirannya dan telah berwujud nyata yang kemudian diekspresikan dalam bentuk gerakan tubuh, dan tidak semua orang bisa mencipta atau membuatnya. Sebagai suatu karya cipta manusia di bidang seni, maka tari kreasi baru atau kontemporer ini keberadaannya di atur di dalam UUHC 2002. Adapun wujud perlindungannya disebutkan di dalam Pasal 12 ayat 1 point (e) UUHC 2002.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka untuk mempermudah pembacaannya, maka akan di buat tabel perlindungan karya cipta seni tari berdasarkan lingkup objek perlindungannya adalah seperti berikut ini:

Tabel 2.
Perlindungan karya cipta seni tari berdasarkan lingkup objek
perlindungannya

No	Jenis Tari	Bentuk Perlindungannya Menurut Undang – undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
1	<p>Tari Tradisional Klasik Kraton Yogyakarta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tari Klasik Kraton yang tidak diketahui penciptanya dan tari klasik Kraton yang sudah diketahui penciptanya dan penciptanya itu telah meninggal dunia serta telah berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah si pencipta itu meninggal dunia ➤ Tari Klasik Kraton yang diciptakan oleh penciptanya yang sudah meninggal dunia tetapi belum berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun, dan tari klasik Kraton yang penciptaannya merupakan wujud persembahan dan pengabdian abdi dalem Kraton terhadap Sultan serta tari klasik Kraton Yogyakarta yang telah diadakan gubahan atau kreasi atas perintah dan ijin Sultan yang masih baru 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal 10 ayat (2) (Negara sebagai pemegang hak cipta atas foklore dan kebudayaan rakyat) ➤ Pasal 12 (Seorang pencipta (tari) sebagai pemilik hak cipta atas karya ciptanya)
2	Tari Tradisional Kerakyatan, biasanya penciptanya tidak diketahui, dan merupakan <i>folklore</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal 10 ayat (2) (Negara sebagai pemegang hak cipta atas foklore dan kebudayaan rakyat)
3	Tari Kreasi Baru atau Kontemporer, merupakan murni ide pemikiran dari seorang seniman tari yang hendak mengekspresikan sesuatu lewat bahasa gerak tubuh atas sesuatu yang ia lihat, rasakan dan proses perenungan terhadap sesuatu hal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal 12 (Seorang pencipta (tari) sebagai pemilik hak cipta atas karya ciptanya)

(Sumber : Diolah dari hasil wawancara terhadap beberapa seniman tari di Yogyakarta)

2. Lingkup Hak Cipta

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa lingkup hak cipta itu meliputi pengumuman dan perbanyakan. Maka berdasarkan pengelompokan 3 (tiga) besar seni tari, maka menurut penulis berkaitan dengan adanya lingkup hak cipta yang meliputi pengumuman dan perbanyakan. Maka di dalam karya cipta seni tari pun terkait dengan ketentuan hal tersebut, maka dapatlah dijelaskan seperti berikut:

a) Tari Tradisional Klasik Kraton

Tari Klasik Kraton yang sudah penulis identifikasi ke dalam 2 (dua) kelompok berdasarkan UUHC 2002, yaitu Tari Kalsik Kraton yang masuk ke dalam kategori perlindungan Pasal 10 ayat (2) dan Tari Klasik Kraton yang masuk dalam perlindungan Pasal 12. Maka jika dikaitkan dengan adanya lingkup hak menurut UUHC 2002 yang berkaitan dengan adanya hak untuk melakukan pengumuman dan perbanyakan, maka untuk tari Klasik Kraton yang masuk ke dalam objek perlindungan Pasal 10 ayat (2) UUHC 2002 karena sudah menjadi milik umum atau *public domain* dan kepemilikannya sudah menjadi milik negara, sehingga setiap orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia berhak untuk melakukan pengumuman dan perbanyakan terhadap tari Klasik Kraton dengan tetap memperhatikan hal – hal yang ditentukan dalam tari Klasik Kraton

tersebut dan tetap menyebutkan siapa penciptanya hal ini berkaitan dengan adanya hak moral dalam suatu karya cipta. Disamping itu juga berlaku Pasal 10 ayat (3) UUHC 2002 yang menyebutkan: *“Untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara.Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dengan masalah tersebut”*. Sedangkan untuk tari Klasik Kraton yang masuk ke dalam kategori perlindungan di dalam Pasal 12 UUHC 2002, maka untuk yang berkaitan dengan pengumuman dan perbanyakannya sudah barang tentu bahwa pencipta atau pemegang hak cipta karena adanya hak eksklusif (berkaitan dengan pengumuman dan perbanyak) maka pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk melakukan pengumuman dan perbanyak sesuai yang diatur di dalam UUHC 2002 sehingga jika ada orang yang akan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengumuman dan perbanyak itu maka mereka harus mendapatkan izin dari si pencipta. Hal ini sejalan dengan ketentuan UUHC 2002 di dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 yang berkaitan dengan Lisensi atau pemberian izin.

b) Tari Tradisional Kerakyatan

Tari Tradisional Kerakyatan ini biasanya tidak diketahui siapa penciptanya dan biasanya hidup dan berkembang di dalam

suatu lingkungan masyarakat tertentu yang biasanya berpijak dari unsur – unsur budaya masyarakat setempat, maka dapat dikategorikan sebagai *folklore*. UUHC 2002 di dalam penjelasan Pasal 10 ayat (2) dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai – nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk:

- a. Cerita rakyat, puisi rakyat;
- b. Lagu – lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
- c. Tari – tarian rakyat, permainan tradisional;
- d. Hasil seni antarlain berupa: lukisan, gambar, ukir – ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

Maka jika dikaitkan dengan adanya lingkup hak menurut UUHC 2002 yang berkaitan dengan adanya hak untuk melakukan pengumuman dan perbanyakan, maka untuk tari Tradisional Kerakyatan yang masuk ke dalam objek perlindungan Pasal 10 ayat (2) UUHC 2002 karena sudah menjadi milik umum atau *public domain* dan kepemilikannya sudah menjadi milik negara, sehingga setiap orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia berhak untuk melakukan pengumuman dan

perbanyak terhadap tari Tradisional Kerakyatan dengan tetap memperhatikan hal – hal yang ditentukan dalam tari Tradisional Kerakyatan tersebut. Disamping itu juga berlaku Pasal 10 ayat (3) UUHC 2002 yang menyebutkan: *“Untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara.Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dengan masalah tersebut”*.

c) Tari Kreasi Baru atau Kontemporer

Tari Kreasi Baru atau kontemporer yang bentuk perlindungannya masuk ke dalam Pasal 12 point (e) UUHC 2002. Karena tari ini murni hasil kreatifitas seorang seniman yang telah berwujud nyata yang diekspresikan lewat gerak tubuh, dan tidak semua orang bisa membuatnya. Maka jika dikaitkan dengan lingkup hak cipta yang berkaitan dengan adanya pengumuman dan perbanyak, seorang pencipta tari atau koreografer yang biasanya adalah seniman tari, atau seorang pemegang hak cipta dengan hak eksklusifnya bisa melakukan kegiatan pengumuman dan perbanyak terhadap karya cipta seni tarinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan di dalam UUHC 2002. Sehingga jika ada orang yang akan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengumuman dan perbanyak itu maka mereka harus mendapatkan izin dari si pencipta. Hal ini sejalan dengan ketentuan UUHC 2002 di dalam

Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 yang berkaitan dengan Lisensi atau pemberian izin.

3. Jangka Waktu Perlindungan

UUHC 2002 mengatur tentang jangka waktu perlindungan terhadap semua hasil kreatifitas manusia, pengaturan tentang jangka waktu perlindungan tersebut diatur di dalam beberapa pasal, pasal – pasal tersebut antara lain Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34. Berikut ini akan di jelaskan jangka waktu perlindungan karya cipta seni tari berdasarkan 3 (tiga) kelompok besar seni tari:

a) Tari Tradisional Klasik Kraton

Tari Klasik Kraton yang sudah penulis identifikasi ke dalam 2 (dua) kelompok berdasarkan UUHC 2002, yaitu Tari Klasik Kraton yang masuk ke dalam kategori perlindungan Pasal 10 ayat (2) dan Tari Klasik Kraton yang masuk dalam perlindungan Pasal 12. Maka jika dikaitkan dengan adanya jangka waktu perlindungan yang ditentukan oleh UUHC 2002, dapatlah disebutkan sebagai berikut.

Untuk tari Klasik Kraton yang masuk dalam Pasal 10 ayat (2) UUHC 2002, maka berdasarkan Pasal 31 ayat (1) point a UUHC 2002 jangka waktu perlindungannya adalah tanpa batas waktu. Adapun bunyi Pasal 31 ayat (1) point a menyebutkan bahwa: *“hak cipta atas ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara*

berdasarkan: a. Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu”.

Sedangkan untuk tari Klasik Kraton yang masuk ke dalam Pasal 12 UUHC 2002, maka berdasarkan Pasal 29 UUHC 2002 jangka waktu perlindungannya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Sehingga selama jangka waktu perlindungan tersebut pemegang hak cipta karya seni tari Klasik Kraton yang masuk di dalam kategori Pasal 12, maka ia memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak lain mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, atau memberi izin kepada orang lain untuk melakukan pengumuman²²¹ dan perbanyakan²²² ciptaan yang dipunyai tanpa mengurangi pembatasan – pembatasan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

b) Tari Tradisional Kerakyatan

Tari Tradisional Kerakyatan yang termasuk ke dalam kategori Pasal 10 ayat (2) UUHC 2002, maka berdasarkan Pasal 31 ayat (1) point a UUHC 2002 jangka waktu perlindungannya adalah tanpa batas waktu. Adapun bunyi Pasal 31 ayat (1) point a menyebutkan bahwa: *“hak cipta atas ciptaan*

²²¹ Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Lihat Pasal 1 point 5 UUHC 2002 tentang Hak Cipta.

²²² Perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan – bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan secara permanen atau temporer. Lihat Pasal 1 point 6 UUHC 2002 tentang Hak Cipta.

yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan: a. Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu. Negara sebagai pemilik hak cipta atas tari Tradisional Kerakyatan, memberikan sebuah perlindungan dalam yang tanpa batas waktu pada prinsipnya adalah ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menggunakan dan memanfaatkan serta memajukan tari ini untuk kepentingan – kepentingan nasional. Perlindungan terhadap tari Tradisional Kerakyatan yang tanpa batas waktu ini dilakukan dalam rangka untuk mencegah adanya penggunaan dan pemanfaatan tari Tradisional Kerakyatan yang dikategorikan sebagai *folklore*, adalah untuk mengantisipasi adanya penggunaan dan pemanfaatan untuk mencegah adanya praktik monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial oleh orang – orang tertentu, dan upaya ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tradisional Indonesia.²²³

c) Tari Kreasi Baru atau Kontemporer

Tari Kreasi Baru atau kontemporer yang bentuk perlindungannya masuk ke dalam Pasal 12 point (e) UUHC 2002, maka berdasarkan Pasal 29 UUHC 2002 jangka waktu perlindungannya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta

²²³Lihat Penjelasan Pasal 10 ayat (2) UUHC 2002.

meninggal dunia. Sehingga selama jangka waktu perlindungan tersebut pemegang hak cipta karya seni tari Klasik Kraton yang masuk di dalam kategori Pasal 12, maka si pencipta tari memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak lain mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, atau memberi izin kepada orang lain untuk melakukan pengumuman dan perbanyak ciptaan yang dipunyai tanpa mengurangi pembatasan – pembatasan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka untuk mempermudah pembacaannya, maka akan di buat tabel perlindungan karya cipta seni tari berdasarkan jangka waktu perlindungannya adalah seperti berikut ini.

Tabel 3.
Perlindungan karya cipta seni tari berdasarkan jangka waktu
perlindungannya

No	Jenis Tari	Jangka Waktu Perlindungan Menurut Undang – undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
1	<p>Tari Tradisional Klasik Kraton Yogyakarta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tari Klasik Kraton yang tidak diketahui penciptanya dan tari klasik Kraton yang sudah diketahui penciptanya dan penciptanya itu telah meninggal dunia serta telah berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah si pencipta itu meninggal dunia ➤ Tari Klasik Kraton yang diciptakan oleh penciptanya yang sudah meninggal dunia tetapi belum berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun, dan tari klasik Kraton yang penciptaannya merupakan wujud persembahan dan pengabdian abdi dalem Kraton terhadap Sultan serta tari klasik Kraton Yogyakarta yang telah diadakan gubahan atau kreasi atas perintah dan ijin Sultan yang masih baru 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tanpa Batas Waktu Pasal 31 ayat (1) ➤ Berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Pasal 29 ayat (1)
2	Tari Tradisional Kerakyatan, biasanya penciptanya tidak diketahui, dan merupakan <i>folklore</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tanpa Batas Waktu Pasal 31 ayat (1) point a
3	Tari Kreasi Baru atau Kontemporer, merupakan murni ide pemikiran dari seorang seniman tari yang hendak mengekspresikan sesuatu lewat bahasa gerak tubuh atas sesuatu yang ia lihat, rasakan dan proses perenungan terhadap sesuatu hal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Pasal 29 ayat (1)

(Sumber : Diolah dari hasil wawancara terhadap beberapa seniman tari di Yogyakarta)

4. Hak yang terdapat di dalam Hak Cipta

Berkaitan dengan adanya 2 (dua) hak yang terdapat di dalam UUHC 2002 yaitu; hak moral dan hak ekonomi, maka dapatlah disebutkan bahwa hak – hak tersebut juga berlaku terhadap karya cipta seni tari. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a) Tari Tradisional Klasik Kraton

Karena tari Klsik Kraton yang terbagai ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu tari yang masuk ke dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 12 UUHC 2002, sehingga jika dikaitkan dengan adanya hak moral dan hak ekonomi maka dapat dijelaskan bahwa untuk tari Klasik kraton yang masuk ke dalam Pasal 10 ayat (2) yang sudah menjadi milik Negara dan menjadi milik umum atau *public domain*, maka setiap orang bisa memanfaatkan secara ekonomis terhadap tari Klasik Kraton ini, namun berkaitan dengan adanya hak moral²²⁴ maka setiap orang yang menampilkan atau menggunakan seni tari Klasik Kraton yang masuk ke dalam kategori pasal 10 ayat (2) ini haruslah tetap mencantumkan nama si penciptanya, dan jika akan melakukan kreasi atau perubahan terhadap tari ini haruslah mendapatkan izin dari ahli waris penciptanya. Selain itu juga berlaku Pasal 10 ayat (3) UUHC

²²⁴Hak moral (*moral right*) adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta atau penemu. Hak moral melekat pada pribadi pencipta. Lihat Pasal 24 UUHC 2002.

2002.²²⁵ Termasuk dalam hak moral adalah hak – hak yang berkaitan dengan:

1. Hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya namanya tetap dicantumkan pada ciptaannya.
2. Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan tanpa persetujuan pencipta atau ahli warisnya.
3. Hak pencipta untuk mengadakan perubahan pada ciptaan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.

Sedangkan untuk tari Klasik kraton yang termasuk ke dalam kategori perlindungan di dalam Pasal 12 UUHC 2002 maka si pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak moral dan hak ekonomi²²⁶ atas tari ini. Pencipta karena adanya hak ekonomi tersebut maka ia bisa memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan hak ciptanya tersebut oleh dirinya sendiri, atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Ada 8 (delapan) jenis hak ekonomi yang melekat pada hak cipta, yaitu:

²²⁵Adapun bunyi Pasal 10 ayat (3) UUHC 2002 yang menyebutkan: *“Untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara.Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dengan masalah tersebut”*.

²²⁶Hak ekonomi (*economi right*) adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas hak cipta, hak ekonomi ini disebutkan di dalam Pasal 49 UUHC 2002.

1. Hak reproduksi (*reproduction right*), yaitu hak untuk menggandakan ciptaan. Dalam UUHC 2002 menggunakan istilah perbanyakan.
2. Hak adaptasi (*adaptation right*), yaitu hak untuk mengadakan adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada. Hak ini diatur dalam *Bern Convention*.
3. Hak distribusi (*distribution right*), yaitu hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan. Dalam UUHC 2002, hak ini dimasukkan dalam hak mengumumkan.
4. Hak pertunjukan (*performance right*), yaitu hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukan atau penampilan oleh pemusik, dramawan, seniman, peragawati. Hak ini diatur dalam *Bern Convention*.
5. Hak penyiaran (*broadcasting right*), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi dan transmisi ulang. Dalam UUHC, hak ini dimasukkan dalam hak mengumumkan.
6. Hak program kabel (*cablecasting right*), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel. Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran, tetapi tidak melalui transmisi melainkan kabel.

7. *Droit de suite*, yaitu hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan.
8. Hak pinjam masyarakat (*public lending right*), yaitu hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat. Hak ini berlaku di Inggris dan diatur dalam *Public Lending Right Act 1979, The Public Lending Right Scheme 1982*.

Berkaitan dengan adanya hak moral²²⁷ maka setiap orang yang menampilkan atau menggunakan seni tari Klasik Kraton yang masuk ke dalam kategori Pasal 12 ini haruslah tetap mencantumkan nama si penciptanya, dan jika akan melakukan kreasi atau perubahan terhadap tari ini haruslah mendapatkan izin dari ahli waris penciptanya. Ketentuan ini diatur di dalam UUHC 2002 yang disebutkan dalam Pasal 24.

Menurut Kuswarsantya, bahwa tari klasik Kraton baik yang masuk ke dalam kategori Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 12 UUHC 2002 maka sejatinya jika akan dilakukan suatu kreasi atau gubahan oleh seorang seniman tari di Yogyakarta maka ia harus mendapatkan izin dari Sultan terlebih dahulu sebagai pemegang hak cipta dan sekaligus penciptanya. Dan menurutnya jika tari Klasik Kraton ini akan dikreasikan atau digubah, maka hendaknya

²²⁷ Hak moral (*moral right*) adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta atau penemu. Hak moral melekat pada pribadi pencipta. Lihat Pasal 24 UUHC 2002.

penyebutan tarian tersebut harus berbeda dari tari klasik Kraton yang aslinya, artinya bahwa penyebutan tarian itu ditambahkan namanya, dicontohkan oleh Kuswarsantya: jika ada seorang seniman tari akan menkreasikan tarian klasik Kraton, misalnya tari Bedhaya dari Kraton Yogyakarta dilakukan kreasi atau gubahan oleh abdi dalem Kraton Yogyakarta maupun oleh seorang seniman tari yang telah mendapatkan ijin dari pihak Kraton Yogyakarta, maka si penggubah atau seniman yang menkreasikan tari Bedhaya itu harus menambahkan nama dibelakang tarian itu sehingga menjadi tari Bedhaya A.²²⁸

b) Tari Tradisional Kerakyatan

Tari Tradisional Kerakyatan ini termasuk ke dalam kategori Perlindungan di dalam Pasal 10 ayat (2) UUHC 2002 yang sudah menjadi milik Negara dan menjadi milik umum atau *public domain*, maka jika dikaitkan dengan adanya hak moral dan hak ekonomi konsekuensinya maka setiap orang bisa memanfaatkan secara ekonomis terhadap tari Tradisional Kerakyatan ini dan berlaku juga ketentuan Pasal Pasal 10 ayat (3) UUHC 2002, berkaitan dengan adanya hak moral maka menurut penulis maka setiap orang yang akan melakukan kreasi atau merubah terhadap tari Tradisional ini haruslah mendapatkan izin dari pimpinan adat dari masyarakat setempat atau mendapatkan izin dari masyarakat

²²⁸Kuswarsantya, *Loc Cit.*

setempat selaku pemilik tari Tradisioanal Kerakyatan yang sudah diwariskan secara turun temurun dan dilestarikan oleh masyarakat setempat.

Padepokan Bagong Kussudiardja merupakan padepokan tari yang pernah melakukan kreasi terhadap tari Tradisional Kerakyatan di desa Semampir Kecamatan Sleman, sebelum melakukan kreasi terhadap tari tersebut (tari Tradisional Kerakyatan) maka Padepokan Bagong Kussudiardja terlebih dahulu meminta izin kepada kepala desa atau kepala adat masyarakat setempat atau pimpinan paguyuban tari Kerakyatan. Salah satu tari Kerakyatan yang dikreasikan oleh Padepokan Bagong Kussudiardja adalah tari Kerakyatan Badui.²²⁹ Dan dari kreasi terhadap tari ini kemudian oleh Padepokan Bagong Kussudiardja tari tersebut dinamakan dengan tari Badui Kembar, dalam melakukan kreasi tari Tradisional Kerakyatan Badui ini, padepokan tersebut telah mendapatkan izin dari pimpinan group tari Kerakyatan Badui itu.

Menurut Sutopo Tedjo Baskoro bahwa di dalam suatu pengubahan atau kreasi terhadap tari Tradisional Kerakyatan Badui yang berasal dari desa Semampir Kecamatan Sleman tersebut saat ditampilkan atau saat dipertunjukan juga disebutkan bahwa tari Badui Kembar merupakan tari kreasi yang berasal

²²⁹Sutopo, *Loc Cit*

atau diilhami dari tari Tradisional Kerakyatan Badui dari desa Semampir.

Menurut Kuswarsantya, berkaitan dengan adanya hak ekonomi di dalam UUHC 2002 maka jika ada pihak – pihak atau orang – orang yang menggunakan atau menampilkan tari Tradisional Kerakyatan ini sejatinya bahwa mereka yang memanfaatkan tari tersebut, haruslah memberikan imbalan terhadap masyarakat pemilik tarian itu. Ada hal yang menarik berkaitan dengan tari Tradisional Kerakyatan ini, untuk daerah Yogyakarta sendiri pada setiap hari Ahad Wage Pemerintah Kabupaten Sleman menampilkan tari Tradisional Kerakyatan Badui daerah Semampir ini untuk pertunjukan wisata, maka rombongan dari desa Semampir yang menampilkan tari Tradisional Kerakyatan Badui ini mereka diberikan uang Pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap penduduk desa Semampir.²³⁰

c) Tari Kreasi Baru atau Kontemporer

Tari Kreasi Baru atau Kontemporer bentuk perlindungannya yang masuk ke dalam pasal 12 UUHC 2002, maka berkaitan dengan adanya pengaturan tentang hak moral dan hak ekonomi menurut UUHC 2002 seorang pencipta atau pemegang hak cipta

²³⁰Kuswarsantya, *Loc Cit.*

memiliki hak untuk: *pertama* berkaitan dengan adanya hak moral maka si pencipta mempunyai hak untuk tetap dicantumkan nama si pencipta dimanapun ciptaan itu berada (*Paternity Right*),²³¹ dan hak untuk tetap dijaga keutuhan suatu ciptaan, pengubahan suatu ciptaan harus mendapat izin atau persetujuan pencipta atau ahli warisnya termasuk dalam hal mutilasi karya seni tari (*Integrity Right*).²³²

Sehingga jika ada seseorang yang akan melakukan kreasi ataupun pengubahan terhadap karya cipta seni tari hasil karya cipta seorang seniman tari atau koreografer, maka sudah menjadi kewajiban orang yang akan melakukan kreasi terhadap tarian karya cipta si A, maka mereka harus meminta izin dan mendapatkan izin terlebih dahulu dari si Penciptanya atau jika si pencipta telah meninggal dunia maka harus mendapatkan izin dari ahli waris si pencipta, hal ini sesuai dengan ketentuan menurut UUHC 2002 Pasal 24 ayat (2).

Menurut penulis jika seseorang yang telah mendapatkan izin dari pencipta atau ahli warisnya untuk melakukan kreasi atau mengubah suatu karya cipta seni tari hasil karya cipta si pencipta A, maka nama tari hasil kreasinya tersebut harus ditambahkan sebutan nama baru terhadap tari hasil karya ciptanya itu atau dengan kata lain ada perbedaan penyebutan nama tarinya itu

²³¹ *Paternity Right* ini sama dengan ketentuan di dalam Pasal 24 ayat (1) UUHC 2002.

²³² *Integrity Right* ini sama dengan ketentuan di dalam Pasal 24 ayat (2) UUHC 2002.

dengan tari aslinya. Misalnya tari Kera hasil ciptaan si pencipta A, jika akan dikreasikan atau diadakan perubahan terhadap tari tersebut oleh seseorang bernama B maka penyebutan tari Kera hasil ciptaan si B tersebut bernama tari Kera B, sebagai catatan bahwa di dalam kreasi atau gubahan tersebut harus sudah mendapat izin dari si pencipta atau ahli warisnya.

Kedua berkaitan dengan adanya hak ekonomi maka seorang pencipta tari mempunyai hak untuk melakukan hal – hal yang berkaitan dengan hak reproduksi (*reproduction right*), hak adaptasi (*adaptation right*), hak distribusi (*distribution right*), hak pertunjukan (*performance right*), hak penyiaran (*broadcasting right*), hak program kabel (*cablecasting right*), hak pinjam masyarakat (*public lending right*), hak penyebaran (*distribution right*).

Berkaitan dengan adanya hak ekonomi tersebut, menurut penulis bahwa seorang seniman tari atau pencipta tari (koreografer) dapat melakukan atau menggunakan hak ekonominya yang berupa hak pertunjukan (*performing right*) yang merupakan hak untuk mempertunjukkan atau mempertontonkan karya cipta tari mereka untuk kepentingan komersial, disamping itu juga seniman tari atau pencipta tari (koreografer) hak reproduksi (*reproduction right*) yang berupa pengalihwujudan

karya cipta tari mereka dalam bentuk *compact disk* (cd), kaset atau bentuk lainnya secara mekanik.

5. Pengecualian di dalam Hak Cipta

Hak cipta pada dasarnya berisikan hak eksklusif si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengambil manfaat ekonomi sebuah ciptaan melalui berbagai cara, di lain pihak berisikan hak untuk melarang pihak lain menggunakan ciptaannya (untuk kepentingan komersial) tanpa ijin si pencipta atau pemegang hak cipta. Dua hak tersebut merupakan hak yang paling asasi dalam hak cipta, namun demikian dalam beberapa kondisi, penggunaan ciptaan tanpa persetujuan si pencipta atau pemegang hak cipta pada situasi seperti inilah kita sering menyebutnya bahwa hak cipta mempunyai fungsi sosial.²³³

Di dalam UUHC 2002 disebutkan adanya beberapa pasal yang dianggap bukan merupakan pelanggaran terhadap hak cipta yang berupa pembatasan terhadap hak cipta, pasal yang mengatur tentang hal tersebut diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 UUC 2002.

Maka ketentuan yang disebutkan di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 UUHC 2002 juga berlaku terhadap karya cipta seni tari, dalam hal ini adalah 3 (tiga) macam pembagian seni tari yaitu seni tari Tradisional Klasik Kraton, tari tradisional Kerakyatan

²³³Budi santoso, *Op Cit*, hal 84.

dan tari Kreasi Baru atau Kontemporer. Menurut penulis hal yang berkaitan dengan pembatasan terhadap karya cipta seni tari ini berkaitan dengan hal – hal yang berhubungan dengan pembatasan yang telah disebutkan pada penjelasan di atas, yaitu berkaitan dengan; cara – cara yang dilakukan dan tujuan – tujuan yang dibolehkan seperti yang telah disebutkan dalam pembahasan di atas. Atau berhubungan dengan bunyi ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 UUHC 2002.

6. Pengalihan Hak Cipta

Hak cipta sebagai benda bergerak²³⁴ yang immateriil merupakan bagian dari kekayaan seseorang, maka hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian. Beralihnya atau dialihkannya hak tersebut dapat melalui cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian. Di Indonesia pengaturan tentang pengalihan hak cipta telah ditentukan di dalam UUHC 2002 Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4.

Proses peralihan di dalam hak cipta diterangkan oleh Etty Susilowati sebagai berikut:²³⁵

1) Pewarisan

Proses pengalihan hak cipta terjadi apabila pencipta meninggal dunia maka secara otomatis kepemilikan berpindah kepada

²³⁴Lihat Pasal 3 ayat (1) UUHC 2002.

²³⁵Etty Susilowati, *"Bunga Rampai Hak Kekayaan Intelektual"*, Sentra Pendidikan Manajemen HKI Undip Semarang, hal 13

garis lurus ke bawah (anak). Apabila keturunan garis lurus tidak ada maka kepemilikan beralih kepada saudara sekandung. Jika pencipta hidup seorang diri maka kepemilikan kepada negara.

2) Hibah

Pemilik hak cipta menghibahkan ciptaannya kepada seseorang atas dasar perjanjian dengan akta notaris maupun dengan akta di bawah tangan. Kepemilikan dapat beralih sebagian atau secara keseluruhan sesuai dengan perjanjian kepada orang yang diberi hibah.

3) Wasiat

Surat wasiat dengan akta notaris dapat juga dibuat oleh pemilik sendiri untuk diwariskan kepada pihak lain yang dikehendakinya, setelah surat wasiat berlaku maka kepemilikan berpindah kepada pihak yang diberi wasiat.

4) Perjanjian tertulis.

Proses pengalihan ini terjadi dengan dibuatnya suatu perjanjian sesuai kesepakatan antara pemilik dengan pihak lain tentang ciptaan tertentu baik sebagian atau secara keseluruhan.

Berdasarkan ketentuan UUHC 2002 di dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tersebut, maka jika dihubungkan dengan pembagian seni tari yang terbagi ke dalam 3 (tiga) kelompok tersebut sehingga dapat diidentifikasi seperti berikut :

a) Tari Tradisional Klasik Kraton

Tari Klasik Kraton yang sudah penulis identifikasi ke dalam 2 (dua) kelompok berdasarkan UUHC 2002, yaitu Tari Klasik Kraton yang masuk ke dalam kategori perlindungan Pasal 10 ayat (2) dan Tari Klasik Kraton yang masuk dalam perlindungan Pasal 12. Maka jika dikaitkan dengan adanya pengalihan hak cipta yang ditentukan oleh UUHC 2002, dapatlah disebutkan sebagai berikut.

Untuk tari Klasik Kraton yang masuk dalam Pasal 10 ayat (2) UUHC 2002 sehingga menjadi milik bersama atau *public domain*, maka berdasarkan pada Pasal 3 ayat (2) pada point e yang berbunyi: "*Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena sebab – sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang – undangan*", maka Negara adalah penentunya. Sedangkan untuk tari Klasik Kraton yang terlindungi ke dalam Pasal 12 UUHC 2002, maka berlaku Pasal 3 dan Pasal 4 UUHC 2002.

b) Tari Tradisional Kerakyatan

Tari Tradisional Kerakyatan yang terlindungi ke dalam Pasal 10 ayat (2) UUHC 2002 sehingga menjadi milik bersama atau *public domain*, maka berdasarkan pada Pasal 3 ayat (2) pada point e yang berbunyi: "*Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena sebab – sebab lain*

yang dibenarkan oleh peraturan perundang – undangan”, maka Negara adalah penentunya.

c) Tari Kreasi Baru atau Kontemporer

Tari Kreasi Baru atau Kontemporer bentuk perlindungannya yang masuk ke dalam pasal 12 UUHC 2002, maka berlaku Pasal 3 dan Pasal 4 UUHC 2002. Sebagai catatan bahwa proses pengalihan hak cipta tersebut hendaknya merujuk kepada penjelasan Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: *“Beralih atau dialihkannya hak cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notariil”*. Hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan terhadap pengalihan hak cipta tersebut.

7. Pendaftaran Hak Cipta

Pada prinsipnya bahwa hak cipta ada secara otomatis ketika suatu karya ciptaan itu lahir dari seorang pencipta. Dengan demikian bahwa pendafataran hak cipta tidak merupakan suatu keharusan, karena tanpa adanya suatu pendaftaran pun hak cipta telah dilindungi. Pendaftaran hak cipta ini dilakukan dalam rangka untuk melakukan kemudahan untuk adanya pembuktian jika terjadi sengketa. Bahkan Konvensi Bern yang merupakan dasar perlindungan hak cipta secara internasional sendiri menganut sistem *Automatic Protection* yang maksudnya adalah bahwa

perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis tanpa didasarkan pada formalitas tertentu.

Bahkan di dalam penjelasan Pasal 35 ayat (4) menyebutkan bahwa: *“Pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran”*. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap terlindungi.

Sehingga ketentuan tentang prinsip *Automatic Protection* ini berlaku juga untuk semua karya cipta seni tari baik itu tari Tradisional Klasik, tari Tradisional Kerakyatan maupun tari Kreasi Baru atau Kontemporer yang tidak terdaftar atau belum terdaftar tetap terlindungi, mengingat bahwa hak cipta ada secara otomatis ketika suatu karya cipta itu lahir dari seorang seniman tari atau koreografer yang telah tampak dan berwujud nyata yang dapat dilihat, didengar dan dibaca.

Kehadiran hukum di dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan – kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan – benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil – kecilnya. Perlindungan terhadap kepentingan – kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan

dengan cara membatasi kepentingan lain pihak. Dalam konteks hukum, karya seni merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) yang perlindungannya terakomodir di dalam Undang – undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak cipta sendiri merupakan suatu hak yang timbul akibat adanya tindakan kreatif manusia yang menghasilkan karya – karya inovatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia. Hukum memberikan perlindungan terhadap seniman dan karyanya yang lahir dari sebuah proses penciptaan; daya intelektual, karsa, dan rasa sang seniman.

Seni tari sebagai hasil kreatifitas manusia dan sebagai salah satu kebudayaan bangsa Indonesia pada dasarnya juga memerlukan suatu perlindungan hukum, mengingat seni tari merupakan hasil kreatifitas seniman tari dan dapat dikatakan sebagai suatu kekayaan intelektual bagi seniman. Dikatakan sebagai kekayaan intelektual karena proses penciptaan sebuah tarian memerlukan tenaga dan pikiran yang mendalam serta menghabiskan biaya yang tidak sedikit.

Undang – undang Hak Cipta merupakan sebagai salah satu bentuk bentuk produk undang – undang yang memberikan penjaminan hukum terhadap kreatifitas para seniman untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu. Wujud perlindungan ini merupakan kepentingan pemilik hak cipta dalam hal ini adalah hak cipta atas karya seni tari baik secara individual maupun kelompok sebagai subjek hak. Undang – undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002

juga mengakui dimensi moral dari karya itu lahir bukan hanya atas dasar kepentingan ekonomi tetapi merupakan ekspresi dari eksistensi sang seniman sebagai manusia yang dilindungi hak asasi manusianya (HAM) secara universal sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan.

Berkaitan dengan adanya pengaturan tentang perlindungan terhadap karya cipta seorang seniman tari hal ini sejalan dengan pendapat Edy Damian yang menyatakan bahwa keberadaan dan peran orang – orang secara individual tidaklah dilenyapkan atau diabaikan sama sekali yang terbukti dari diberikannya penghormatan kepada hak – hak orang lain dan penghargaan oleh masyarakat kepada hasil karya seseorang serta menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban.²³⁶ Ini artinya bahwa karya cipta seorang seniman harus diberikan penghargaan dan pengakuan oleh orang lain, karena seorang seniman yang telah berhasil menciptakan suatu karya cipta tidaklah mudah dan sederhana. Mereka telah menghabiskan banyak waktu, pikiran dan tenaga serta biaya yang tidak sedikit untuk mencipta dan ataupun berkreasi sehingga menghasilkan suatu karya cipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Sehingga hal ini juga berlaku terhadap seorang seniman tari yang telah berhasil menciptakan dan atau berkreasi sehingga menghasilkan sebuah karya cipta seni tari.

²³⁶Edy Damian, *Op Cit*, hal 28.

Karya cipta yang dihasilkan oleh seseorang baik itu dalam lingkup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang terwujud dalam berbagai hal, misalnya karya cipta seni tari, musik dan sebagainya. Ternyata tidaklah mudah di dalam sebuah penciptaannya dan perwujudannya, menurut penulis karya cipta yang dihasilkan oleh seseorang baik itu sastrawan, ilmuwan maupun seniman merupakan sebuah kekayaan intelektual milik sang pencipta itu, sehingga dibutuhkan adanya sebuah penghargaan dari orang lain. Penghargaan itu bisa berupa dihormatinya hak – hak yang timbul dari karya cipta itu, dan munculnya kewajiban dari orang lain dan masyarakat luas untuk tidak memanfaatkan karya cipta itu dengan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada si pemilik karya cipta itu.

Berkaitan dengan adanya hak dan kewajiban ini, menurut Hohfeld bahwa dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban diperlukan adanya *justifiable compromise*, yaitu perlu adanya keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara hak cipta seseorang yang perlu dilindungi secara individual dengan kepentingan masyarakat luas atau fungsi sosial hak cipta.²³⁷

Dalam konteks pembicaraan kekayaan intelektual, yang dimaksud sebagai hak adalah suatu hak untuk melaksanakan sesuatu, seperti: memperbanyak suatu ciptaan karya tulis dalam wujud buku – buku yang diterbitkan, merekam dan memperbanyak untuk dijual secara

²³⁷Edy Damian, *Op Cit* hal 36.

komersial suatu ciptaan lagu dalam wujud *compact disk* (CD). Hubungan hak – hak semacam ini dengan kewajiban, adalah kewajiban dari orang – orang lain yang bukan pencipta untuk tidak melanggar hak – hak yang dimiliki pencipta. Kewajiban pihak lain yang bukan pencipta, tetap timbul/eksis, apabila pihak lain yang bukan pencipta melakukan pelanggaran, walaupun si pelanggar tidak mengetahui adanya hak yang demikian pada seorang pencipta.²³⁸

Apabila kita berbicara dalam konteks ke Indonesiaan, dengan Pancasila sebagai pandangan hidup dan jiwa kepribadian bangsa tentunya kita tidak bisa lepas dari kelima sila yang terkandung di dalam. Pancasila sebagai kerangka ideologi Negara tetap memandang dan menjadikan manusia, yang menurut kodratnya adalah makhluk Tuhan, sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Sikap pandang yang demikian ini bertolak dari kesadaran tentang sifat kodrati manusia sebagai individu dan sekaligus makhluk sosial.

Berkaitan dengan adanya penghargaan terhadap manusia sebagai makhluk Tuhan yang berakal dan berbudi pekerti mulia yang dengan kemampuannya itu mereka telah menciptakan sesuatu hal sehingga melekatlah adanya suatu hak bagi seorang pencipta terhadap sebuah karyanya itu. Tentunya kita akan sepakat dengan

²³⁸Edy Damian, *Loc Cit.*

ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 27 Deklarasi Universal Hak – hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa:²³⁹

1. setiap orang mempunyai hak kemerdekaan berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakatnya, menikmati seni dan mengambil bagian dari kemajuan ilmu pengetahuan dan menarik manfaatnya.
2. setiap orang mempunyai hak memperoleh perlindungan atas kepentingan – kepentingan moral dan materiil yang merupakan hasil dari ciptaan – ciptaan seorang pencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Seorang seniman tari atau pencipta tari sebagai subjek hukum hak cipta mempunyai hak – hak atas kekayaan yang dimilikinya, sehingga seorang seniman tari mempunyai hak untuk melakukan perbuatan – perbuatan hukum tertentu atas kekayaan yang dimilikinya, misalnya melisensikan atau menyerahkan kekayaan yang berupa hak cipta ciptaan karya tulis seorang penulis kepada penerbit. Di pihak lain, orang lain mempunyai kewajiban untuk tidak melanggar hak – hak yang dimiliki pencipta.

Untuk mewujudkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara hak cipta yang sifatnya khusus atau eksklusif (sebagai salah

²³⁹Lihat Edy Damian dalam *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, UU Hak Cipta 1997, dan Perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitan*, Bandung: Alumni, 1999, hal 28.

satu ciri individualisme yang banyak berkembang dan dianut dalam pemikiran dunia barat) dengan kepentingan masyarakat atau fungsi sosialnya hak cipta, akan sangat dipengaruhi oleh peran hukum sebagai sarana pembangunan (hukum). Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan sebuah pemikiran dari Mochtar Kusumaatmadja yang pada pokoknya mengungkapkan bahwa tujuan daripada hukum adalah sebuah ketertiban untuk menciptakan sebuah keadilan, dan bagi Mochtar Kusumaatmadja di dalam penciptaan sebuah keadilan adalah berbeda – beda ukurannya menurut kehidupan masyarakat dan zamannya. Sehingga menurut Mochtar Kusumaatmadja untuk sebuah pencapaian ketertiban dalam kehidupan masyarakat, diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.²⁴⁰

Menurut Margareth Barret, keberadaan hukum hak cipta adalah untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan pencipta, untuk itu hak cipta hanya membatasi diri secara khusus pada metoda ekspresi dari suatu ide (*method of expressing an idea*) hak cipta tidak pernah memberikan perlindungan pada ide itu sendiri.²⁴¹

Perlindungan hukum terhadap sebuah karya cipta manusia baik itu di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra menurut penulis

²⁴⁰ *Loc Cit.*

²⁴¹ Margareth Barret, *Intellectual Property: Patent, Trademark, Copyright*, Smith's Review, Emanuel Law Outlines, inc, 1991, hal 134. Lihat Budi Santoso, *Dekonstruksi Hak Cipta*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 2006, hal 8.

sangat diperlukan, mengingat bahwa hasil kreatifitas tersebut membutuhkan suatu kecerdasan intelektual, membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Sehingga si pencipta harus dihargai serta dihormati atas setiap hasil kreatifitasnya, dan orang lain harus menghargai dan menghormati suatu karya cipta orang lain dengan tidak melakukan penjiplakan atau mengaku bahwa karya cipta orang lain itu sebagai karya ciptanya.

B. PENDAPAT SENIMAN TARI DI YOGYAKARTA TERHADAP PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA SENI TARI DI DALAM UNDANG – UNDANG HAK CIPTA No 19 Tahun 2002

B.1. Pengertian dan Orosinilitas Tari Menurut Seniman Tari Di Yogyakarta

Penulis mengambil Yogyakarta sebagai tempat penelitian karena Yogyakarta merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang begitu terkenal dengan berbagai macam jenis keseniannya yang begitu berkembang dengan baik, karena sangat berkembangnya kesenian di sana sehingga mampu memajukan sektor kesenian di tataran dunia internasional disamping sektor pariwisatanya. Kota Yogyakarta juga banyak menghasilkan berbagai macam seniman kreatif dan berbakat yang mampu mengharumkan nama Yogyakarta di tingkat internasional. Sebagai kota seni, di sana (Yogyakarta) seni tari tumbuh serta berkembang dengan baik dan terjaga kelestariannya,

banyak sanggar – sanggar tari yang didirikan dalam rangka melestarikan seni tari tersebut, baik seni tari tradisional maupun seni kreasi baru atau kontemporer. Bahkan terdapat juga sekolah menengah di Yogyakarta yang khusus memberikan pelajaran tentang seni, sekolah tersebut biasa disebut dengan SMKI (Sekolah Menengah Karawitan Indonesia), bahkan juga berdiri universitas dan institut yang mempelajari tentang seni, misalnya Institut Seni Indonesia (selanjutnya disingkat ISI), Universitas Gajah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta (selanjutnya disingkat UNY) yang juga membuka fakultas seni, di kedua perguruan tinggi negeri tersebut (ISI dan UNY) juga membuka program studi tentang seni pertunjukan yang di dalamnya termasuk seni tari.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan seniman tari atau koreografer di Yogyakarta, maka berikut ini akan dipaparkan pengertian tari menurut pendapat beberapa seniman tari di Yogyakarta yang berhasil penulis wawancarai.

Menurut Sugita²⁴² Tari merupakan gerakan yang berirama dan bermakna yang dilakukan oleh manusia. Di dalam penciptaan sebuah tari menurutnya memerlukan proses improvisasi dan penghayatan secara mendalam, karena dalam penciptaan suatu tarian biasanya ingin menceritakan atas sesuatu hal yang ia lihat dan rasakan di dalam

²⁴²**Sugita** adalah seniman tari atau koreografer Yogyakarta, pengelola LPK Tari Satya Laksita Didik Nini Thowok, LPK ini merupakan salah satu sanggar tari yang banyak menghasilkan tari kreasi baru. **Sugita** telah banyak menciptakan tarian sebagai hasil kreasinya, diantaranya Tari Kelinci.

batinnya yang kemudian diwujudkan dalam bentuk gerak (gerak yang dimaksud adalah gerak tubuh) yang mempunyai makna dan menceritakan tentang sesuatu hal yang ia rasakan, menurutnya di dalam penciptaan suatu tarian biasanya juga menceritakan tentang sesuatu hal yang dilihat dan dirasakan oleh seorang pencipta tari (koreografer).²⁴³ Sugita menambahkan bahwa setiap gerak di dalam suatu tari mengandung watak tertentu, artinya bahwa setiap gerak yang diungkapkan oleh seorang pencipta tari atau koreografer lewat tariannya yang dibawakan oleh seorang penari pastilah menimbulkan kesan tertentu kepada penontonnya. Menurutnya seorang pencipta tari atau koreografer ingin menampilkan gerakan tari yang menggambarkan menangis atau bersedih, maka diwujudkan dalam bentuk gerak maknawi yang berupa gerakan tangannya menutup muka serta mengecilkan badannya.²⁴⁴

Sedangkan Siti Sutiya²⁴⁵ (Bu Sas, sapaan akrab beliau) mendefinisikan tari suatu gerak yang berirama sebagai suatu ekspresi manusia yang tertuang dalam gerak tubuh yang mengandung maksud

²⁴³Wawancara dengan **Sugita** pada hari Senin tanggal 2 Maret 2008 jam 10.30 WIB di ruang latihan tari sanggar LPK Tari Satya Laksita Didik Nini Thowok, JL Raya Godean Yogyakarta.

²⁴⁴Sugita, *Ibid.*

²⁴⁵**Siti Sutiya** adalah istri dari **KRT. Sasmito Mardowo** yang merupakan abdi dalem Keraton Yogyakarta dan juga seorang seniman tari yang telah banyak menciptakan tari yang dipersembahkan kepada Sultan, tari ciptaannya antara lain Tari Bedhoyo Amurwo Bumi, Tari Jaka Tarub dan lain sebagainya.. Bu Sas (panggilan akrab Siti Sutiya) merupakan Pemilik dan Pengelola Yayasan Pamulangan Beksa Sasmito Mardowo. Yayasan ini merupakan sanggar tari yang melestarikan tari tradisional klasik yang bersala dari Kraton Yogyakarta.

tertentu dalam gerak tersebut sebagai perwujudan dari sesuatu yang dilihat dan dirasakan oleh seorang pencipta tari.²⁴⁶

Tari menurut Sutopo Tedjo Baskoro²⁴⁷ merupakan suatu ekspresi manusia yang diwujudkan dalam gerak dan mempunyai nilai dan makna tertentu. Tari sendiri menurut Sutopo merupakan salah satu bagian dari cabang kesenian disamping seni rupa, seni sastra dan musik.²⁴⁸ Hal senada juga diungkapkan oleh MM. Ngatini²⁴⁹ bahwa tari merupakan wujud ekspresi gerak tubuh yang indah dan memiliki maksud tertentu.²⁵⁰

Tari menurut pendapat Ni Nyoman Seriati²⁵¹ merupakan ekspresi manusia yang diwujudkan dalam gerakan tubuh, yang dilakukan oleh penari dengan berbagai macam komposisi atau jumlah penarinya yang diiringi dengan musik. Kuswarsantya²⁵² menyebutkan bahwa tari merupakan ekspresi jiwa yang diungkapkan dalam bentuk

²⁴⁶Wawancara dengan **Siti Sutiyah** pada hari Senin tanggal 2 Maret 2009 jam 15.20 WIB, di rumah beliau di Dalem Pujokusuman Yogyakarta.

²⁴⁷**Sutopo Tedjo Baskoro** adalah pengelola Padepokan Seni Bagong Kussudiardja. Sutopo pernah menciptakan dan menkreasikan tari bersama Alm. Bagong Kussudiardja, diantaranya adalah tari Kembar Badui.

²⁴⁸Wawancara dengan **Sutopo Tedjo Baskoro** pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2009 jam 10.00 WIB di Padepokan Seni Bagong Kussudiardja. Kasihan Bantul.

²⁴⁹**MM. Ngatini** adalah penari dan juga pencipta tari anak – anak di Yogyakarta. Beliau bersama dengan pak Sutopo sebagai pengelola Padepokan Seni Bagong Kussudiardja.

²⁵⁰Wawancara dengan **MM. Ngatini** pada hari senin tanggal 23 Februari 2009 jam 11.00 WIB di Padepokan Seni Bagong Kussudiardja. Kasihan Bantul

²⁵¹Wawancara dengan **Ni Nyoman Seriati** pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2009 jam 12.45 WIB, **Ni Nyoman Seriati** adalah Ketua Jurusan Seni tari pada Universitas Negeri Yogyakarta, beliau juga seorang penari dan pencipta tari.

²⁵²**Kuswarsantya, MHum** adalah dosen seni tari di Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau adalah salah satu abdi dalem Keraton Yogyakarta dengan nama **KRT Condrowaseso**, disamping sebagai dosen beliau juga aktif dalam bidang kesenian terutama seni tari. **Kuswarsantya, MHum** juga sebagai pengelola sanggar tari Irama Citra yang merupakan sanggar tari tradisonal klasik Keraton Yogyakarta.

gerak yang diiringi dengan musik, baik musik tradisional (gamelan) maupun musik modern, gerak tersebut merupakan ekspresi jiwa dari sang pencipta tari tentang sesuatu hal yang ia lihat dan rasakan. Tari merupakan bahasa universal yang bisa dipahami secara simbolis oleh semua kalangan, tari bisa dikatakan sebagai wujud pencerminan masyarakat pendukungnya.²⁵³

Y. Sumandiyo Hadi²⁵⁴ mendefinisikan tari sebagai ekspresi gerak manusia yang diungkapkan lewat gerak yang indah dan baik yang mempunyai maksud – maksud tertentu, menurut beliau tari merupakan suatu ekspresi manusia yang terwujud dalam gerak tubuh yang indah, bahwa keindahan tari tidak hanya keselarasan gerakan – gerakan badan dengan iringan musik gamelan saja, tetapi seluruh ekspresi itu harus mengandung maksud – maksud isi tari yang dibawakan.²⁵⁵ Tari menurut Jiyu Wijayanti²⁵⁶ dan Supriyanti²⁵⁷ merupakan ekspresi jiwa seseorang yang diwujudkan melalui gerak tubuh dengan maksud tertentu yang diiringi dengan suatu musik.²⁵⁸

²⁵³Wawancara dengan **Kuswarsantya, MHum** pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2009 jam 11.00 WIB di rumah beliau yang beralamat di Kadipaten Kidul (KP) I No 355 Taman sari Yogyakarta.

²⁵⁴**Y Sumandiyo Hadi** adalah Guru Besar pada jurusan tari di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, beliau juga seorang seniman tari di Yogyakarta, beliau juga pernah mencipta suatu tari.

²⁵⁵Wawancara dengan **Y Sumandiyo Hadi** pada Selasa tanggal 3 Maret 2009 jam 17.00 WIB.

²⁵⁶**Jiyu Wijayanti** adalah Ketua Jurusan Seni tari pada Institut Seni Indonesia Yogyakarta, beliau juga seorang penari dan pencipta tari, salah satu ciptaannya adalah tari NRTTA NIRBAYA yang pernah dipentaskan Petilasan Candi Boko Yogyakarta.

²⁵⁷**Supriyanti** adalah dosen seni tari di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Beliau merupakan penari dan seniman tari di Yogyakarta.

²⁵⁸Wawancara dengan **Jiyu Wijayanti** pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2009 jam 09.15 WIB dan **Supriyanti** pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2009 jam 10.00 WIB di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Jalan Parangtritis Yogyakarta.

Menurut KRT Juwanjono Suryo Bronto²⁵⁹ bahwa tari adalah gerak tubuh yang merupakan hasil dari pemaknaan dan rasa yang mendalam tentang sesuatu hal yang dirasakan oleh seorang pencipta tari.²⁶⁰ Sedangkan menurut Widaru Krefiyanto²⁶¹ tari merupakan ekspresi gerak tubuh manusia yang bermakna dan mempunyai nilai estetika (keindahan).²⁶²

Sehingga dari berbagai pendapat seniman tari di Yogyakarta yang telah mendefinisikan tentang pengertian tari, maka dapat penulis simpulkan bahwa tari merupakan ekspresi jiwa manusia yang diwujudkan dalam bentuk gerakan tubuh dengan diiringi suatu irama musik, yang di dalam proses penciptaannya (penciptaan tari) mengandung unsur makna dan rasa yang mendalam dari seorang pencipta tari atau seniman tari.

Tari sebagai suatu cabang kesenian pada dasarnya substansi pokoknya merupakan gerak dan ritme, gerak dalam pandangan John Martin merupakan pengalaman fisik yang paling elementer dari kehidupan manusia. Gerak tidak hanya terdapat pada denyutan – denyutan di seluruh tubuh manusia untuk tetap dapat memungkinkan

²⁵⁹ **KRT Juwanjono Suryo Bronto** adalah seniman tari dan penari disamping itu juga beliau juga memimpin dan pengelola sanggar tari Suryo Kencono, salah satu karya cipta tarinya adalah tari Ketoprak Tari, tari ***Bedhoyo Saptu Aji*** merupakan tarian yang beliau ciptakan bersama istrinya Ibu **Siti Kadaryati** yang maksud penciptaannya adalah dipersembahkan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X.

²⁶⁰ Wawancara dengan **KRT Juwanjono Suryo Bronto** pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2009 jam 19.25 WIB di sanggar tari Suryo Kencono.

²⁶¹ **Widaru Krefiyanto** adalah putra dari **KRT Juwanjono Suryo Bronto**, Mas Kref (panggilan akrab) adalah penari di Yogyakarta yang biasa menampilkan tari tradisional Klasik Keraton Yogyakarta dan sering menjuarai dalam Festival Tari di Yogyakarta.

²⁶² Wawancara dengan **Widaru Krefiyanto** pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2009 jam 20.25 WIB di sanggar tari Suryo Kencono.

manusia hidup, tetapi gerak juga terdapat pada ekspresi dari segala emosional manusia.²⁶³

Apabila diperinci ada beberapa elemen – elemen komposisi tari yang harus diketahui, yaitu; gerak tari, desain lantai atau *floor design*, desain atas atau *air design*, desain musik, desain dramatik, dinamika, koreografi kelompok atau *group choreography*, tema tata rias dan kostum, pop tari, pementasan atau staging, tata lampu dan penyusunan acara.²⁶⁴

Berbicara tentang proses penciptaan suatu karya cipta sebuah tarian menurut Sugita terdapat 2 (dua) pembagian proses penciptaan suatu tari, yaitu gerak yang mengabdikan kepada musik dan musik yang mengabdikan kepada gerak. Untuk yang *pertama* yaitu gerak (gerakan tubuh dalam tari) yang mengabdikan kepada musik maksudnya bahwa suatu gerakan tari baru ada setelah adanya penciptaan suatu musik, sedangkan yang *kedua* musik yang mengabdikan kepada gerak maksudnya bahwa suatu tari ada terlebih dahulu sedangkan musik menyusul atau ada setelah tari selesai dibuat.²⁶⁵ Ditambahkan oleh Sugita bahwa tetap suatu karya cipta tari tersebut kepemilikannya ada pada si pencipta tari tersebut.

²⁶³ John Martin, *The Modern Dance*, New York: Dance Horizons, Inc, 1965, hal 8.

²⁶⁴ Jiyu Wijayanti, *Op Cit*.

²⁶⁵ Sugita, *Op Cit*, menurut Sugita karena tari merupakan tergolong suatu seni pertunjukan yang tidak bisa berdiri sendiri, maka ia membutuhkan bantuan dari bidang yang lainnya, misalnya musik, kostum, tata lampu. Maka tari harus berdampingan dengan bidang lainnya itu sebagai pendukung tanpa mengurangi peran dari masing – masing bidang tersebut, artinya dalam setiap kali pertunjukan disebutkan siapa – siapa yang mendukungnya. Dalam contohnya Sugita menjelaskan bahwa tarian Api sebagai pencipta atau koreografernya adalah tuan A dengan komposer musik tuan B dan tata lampu dan kostum nyonya C.

Menurut pendapat beberapa seniman tari/pencipta tari atau koreografer Yogyakarta, bahwa letak orisinalitas suatu penciptaan tari adalah pada gerakannya (gerakan sebuah tari). Karena menurut mereka (pencipta tari atau koreografer) gerakan dalam suatu tari adalah yang membedakan suatu tarian dengan tarian yang lainnya, karena di dalam gerakan itu tercermin dan terkandung suatu maksud dan makna dari penciptaan tari itu. Meskipun demikian menurut mereka terkadang ada gerakan di dalam suatu tari yang merujuk kepada tari yang sudah ada sebelumnya, namun mereka kreasi sesuai dengan kondisi zaman sekarang.

Berbeda dengan beberapa seniman tari lainnya, Kuswarsantya berpendapat bahwa letak orisinalitas suatu penciptaan tari dapat dipahami dari 2 (dua) sisi, *pertama* konsep ide gagasannya, *kedua* pada visualisasinya. Hal ini yang merupakan dimensi yang paling penting untuk menyatakan bahwa suatu tari dikatakan sebagai karya orisinal atau tidak. Menurutnya bahwa tari yang paling orisinal adalah Tari Modern Kontemporer atau Tari Kreasi Baru, karena tari tersebut memang belum pernah ada, artinya bahwa suatu gerakan di dalam tari itu merupakan ide dari si pencipta yang diekspresikan dalam wujud gerak, sedangkan tari tradisional klasik sifatnya hanyalah gubahan atau merupakan susunan ulang, karena materi – materinya sudah ada sejak Hamengku Buwono I. Untuk tari tradisional kerakyatan menurut Kuswarsantya terdapat 2 (dua) hal, yang *pertama* bahwa tari

tradisional kerakyatan yang orisinil itu berupa bentuk tari yang mengandung makna religius, dan yang *kedua* tari kerakyatan yang merupakan tiruan dari tari klasik Kraton yang tidak sempurna.²⁶⁶

Berkaitan dengan suatu orisinalitas suatu ciptaan, Budi Santoso berpendapat bahwa orisinalitas bukanlah sebuah kebaharuan (*novelty*) atau keaslian. Di dalam menentukan apakah suatu karya itu orisinal atau tidak menurutnya dapat dilihat dengan 10 (sepuluh) indikator, yaitu:²⁶⁷

1. Kapan karya cipta dianggap orisinal tidak diperlukan kebaharuan, dapat dimodifikasi, yang penting orisinal,
2. Dianggap orisinalitas tidak dibutuhkan perbedaan yang besar antara ciptaan yang dibuat dengan ciptaan sebelumnya,
3. Yang dimaksud orisinalitas dalam hak cipta adalah orisinal dalam ekspresi ide, bukan orisinal pada ide,
4. Orisinal bila karya tersebut murni berasal dari pencipta bukan melakukan copy dari ciptaan terdahulu,
5. Bukan orisinal bila memuat banyak informasi yang sudah menjadi *public domain*,
6. Muncul dari hasil kreatifitas intelektual pencipta, bukan hanya menjiplak,
7. Terdapat korelasi langsung antara konsep yang ada pada pikiran pencipta, dengan ciptaan yang dihasilkan,

²⁶⁶Kuswarsantya, *Loc Cit.*

²⁶⁷Budi Santoso, Catatan Kuliah Hukum Hak Cipta, pada Kelas HET-HKI Beasiswa Unggulan Diknas Magister Hukum Undip Semarang, tanggal 27 Mei 2008.

8. Secara kuantitas, kontribusi yang diberikan pencipta;
 - a) Tidak sekedar variasi yang membawa daya pembeda
 - b) Terlalu minim kreatifitasnya
 - c) Harus mempunyai variasi yang membawa daya pembeda
 - d) Harus merupakan sentuhan yang serius dari pencipta
9. Orisinalitas itu berkaitan dengan bagaimana caranya ciptaan itu dibuat,
10. Harus ada *skill*, *judgement*, usaha/upaya yang dituangkan dalam ciptaan tersebut.

B.2. Pendapat Seniman Tari Di Yogyakarta Terhadap Pengaturan Perlindungan Hak Cipta Seni Tari Di Dalam Undang – Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku. Hak cipta tersebut melekat pada diri seseorang pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga lahirlah dari hak cipta tersebut hak – hak ekonomi (*economic rights*) dan hak – hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi merupakan hak untuk mengeksploitasi yaitu hak untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan, sedangkan hak moral merupakan hak yang berisi

larangan untuk melakukan perubahan terhadap: isi ciptaan, judul ciptaan, nama pencipta, dan ciptaan itu sendiri.

Pada prinsipnya bahwa tujuan hukum hak cipta adalah menyalurkan kreatifitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas. Namun, kenyataannya di Indonesia kreasi para seniman secara hukum belum dihargai sebagaimana mestinya oleh masyarakat maupun kalangan seniman itu sendiri. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain UUHC 2002 sebagai sebuah institusi hukum dirasakan belum mampu melindungi kepentingan hukum para seniman. Atau boleh jadi seniman itu sendiri merasa tidak "membutuhkan" perlindungan HKI. Dalam hal ini tampaknya sang seniman lebih memandang keberadaan HKI hanya dari aspek kepentingan moralitas dirinya ketimbang keuntungan ekonomis.

Sebagaimana telah penulis sebutkan pada pembahasan terdahulu, bahwa ada 7 (tujuh) indikasi atau faktor yang dilindungi di dalam UUHC 2002 yaitu berkaitan dengan: Objek dan Subjek Perlindungan Hak Cipta, Lingkup Hak Cipta, Jangka Waktu Perlindungan, Hak yang terdapat di dalam Hak Cipta, Pengecualian di dalam Hak Cipta, Pengalihan Hak Cipta, Pendaftaran Hak Cipta. Maka di dalam penulis melakukan pembahasan tentang bagaimana pendapat seniman tari di Yogyakarta berkaitan dengan adanya pengaturan perlindungan terhadap karya cipta seni tari di dalam UUHC 2002. Namun di dalam pembahasan kali ini point – point pertanyaan

yang penulis ajukan kepada para seniman tari di Yogyakarta adalah hal – hal yang berkaitan dengan: adanya hak eksklusif di dalam hak cipta (berkaitan adanya hak moral dan hak ekonomi), berkaitan dengan jangka waktu perlindungan hak cipta, berkaitan dengan pendaftaran hak cipta dan pengalihan hak cipta, serta pengecualian – pengecualian yang diatur oleh hak cipta.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap beberapa seniman tari di Yogyakarta, maka berikut ini akan dipaparkan pendapat beberapa seniman tari di Yogyakarta yang berhasil penulis wawancarai berkaitan dengan permasalahan tentang adanya pengaturan perlindungan terhadap karya cipta seni tari di dalam UUHC 2002 adalah sebagai berikut:

1. Tari sebagai Objek Perlindungan Hak Cipta

Menurut Sugita, bahwa dimasukkannya karya cipta seni tari ke dalam UUHC 2002 baik itu yang termasuk ke dalam objek perlindungan Pasal 10 dan 12 menurutnya adalah suatu hal yang sangat bagus. Karena menurutnya dengan diakuinya dan dilindunginya karya cipta seni tari dari seorang seniman tari oleh UUHC 2002, maka berarti ada penghargaan dan penghormatan terhadap karya cipta seorang seniman di Indonesia. Sugita berpendapat bahwa sudah selayaknya bahwa suatu karya cipta seorang seniman itu diakui keberadaannya dan ia sepakat jika karya ciptanya dilindungi di dalam UUHC 2002. Menurut Sugita dengan diakuinya karya cipta seni tari tersebut, maka seorang seniman merasa di 'wongke', menurutnya hal ini juga terkait dengan kepentingan ahli waris atau anak cucu dari si pencipta.²⁶⁸

Hal yang sama juga disampaikan oleh Siti Sutiyah bahwa dengan diakui dan dilindunginya setiap karya cipta seni tari, maka seorang seniman tari akan merasa aman dan nyaman

²⁶⁸Sugita, *Loc Cit.*

dalam menghasilkan karya – karyanya.²⁶⁹ Y Sumandyo Hadi berpendapat bahwa perlindungan terhadap karya cipta seni tari yang diatur di dalam UUHC 2002 memang sangat diperlukan oleh seorang seniman apalagi menurutnya di era globalisasi seperti sekarang ini, bahwa perlindungan terhadap karya cipta tari baik itu yang merupakan sebagai warisan budaya dan yang merupakan hasil kreatifitas seniman tari yang sekarang atau biasa disebut dengan tari kreasi baru, menurutnya memang sudah sepantasnyalah seorang seniman untuk diberikan perlindungan dan penghargaan terhadap setiap hasil karya cipta mereka.²⁷⁰

Sutopo Tedjo Baskoro dan MM Ngatini berpendapat bahwa dengan dimasukkannya karya cipta seni tari ke dalam UUHC 2002, merupakan suatu jaminan dan perlindungan bagi seorang seniman tari untuk selalu berkarya.²⁷¹ Sedangkan bagi Jiyu Wijayanti dan Supriyanti bahwa dilindunginya karya cipta seni tari di dalam UUHC 2002 merupakan suatu penghormatan bagi seniman tari, dan menurutnya dengan adanya suatu perlindungan hukum atas karya mereka maka akan terjaminlah hak – hak mereka atas karya ciptanya.²⁷²

Menurut KRT Juwanjono Suryo Bronto dan Widaru Krefiyanto bahwa dengan dimasukkannya karya cipta seni tari di dalam UUHC 2002 merupakan wujud penghargaan dan penghormatan atas karya cipta seorang seniman, menurut mereka dengan adanya perlindungan tersebut maka konsekuensinya orang lain harus menghargai dan menghormati karya orang lain dan tidak boleh menjiplak atau meniru bahkan mengaku karya orang lain sebagai karya miliknya.²⁷³ Ni Nyoman Seriati menambahkan bahwa pada intinya setiap orang harus menghormati dan menghargai karya cipta orang lain, dan memang perlu diberikan perlindungan dan penghormatan terhadap karya cipta orang lain.²⁷⁴

Kuswarsantya berpendapat bahwa dengan diberikannya sebuah perlindungan hukum terhadap karya cipta seni tari yang diatur di dalam UUHC 2002 adalah sebagai suatu

²⁶⁹Siti Sutiyah, *Loc Cit.*

²⁷⁰Y Sumandiyo Hadi, *Loc Cit.*

²⁷¹Sutopo dan MM Ngatini, *Loc Cit.*

²⁷²Jiyu Wijayanti dan Supriyanti, *Loc Cit.*

²⁷³KRT Juwanjono Suryo Bronto dan Widaru Krefiyanto, *Loc Cit.*

²⁷⁴Ni Nyoman Seriati, *Loc Cit.*

penghormatan dan penghargaan terhadap karya cipta seorang seniman.²⁷⁵

Penghargaan dan penghormatan terhadap setiap hasil karya cipta seseorang (manusia) merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan oleh orang lain bahkan oleh Negara, mengingat bahwa setiap hasil kreatifitas seseorang itu pastinya memerlukan sebuah pengorbanan yang yang tidaklah sedikit, baik itu berupa pikiran, tenaga dan biaya. Sehingga wajar ketika seorang pencipta ingin dihargai dan dihormati atas wujud/hasil kreatifitasnya itu. Begitu juga dengan seorang seniman tari, sebagai seorang pencipta tari maka mereka (seniman tari) juga ingin dihargai dan diakui atas setiap hasil karyanya itu di masyarakat. Dengan adanya penghargaan dan penghormatan atas hasil kreatifitasnya itu, maka setiap hak – hak yang melekat pada karya itu sudah barang tentu akan tercipta adanya suatu perlindungan terhadap setiap karya cipta yang telah dihasilkan oleh seorang seniman tari. Dengan adanya penghargaan dan penghormatan dari orang serta dengan adanya perlindungan dan pengakuan atas sebuah karya cipta oleh undang – undang, maka seorang pencipta (seniman tari) akan merasa nyaman dan tenang dalam berkarya dan mengembangkan karyanya itu di dalam masyarakat.

²⁷⁵Kuswarsantya, *Loc Cit.*

Sehingga dari pemaparan di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa pada prinsipnya seniman tari di Yogyakarta setuju atau sepakat dengan adanya perlindungan karya cipta seni tari yang diatur di dalam UUHC 2002, karena bagi mereka bahwa dengan diatur dan dilindunginya karya cipta seni tari tersebut adalah dalam rangka penghormatan dan penghargaan atas karya cipta mereka dan diakuinya eksistensi mereka sebagai seorang seniman.

2. Hak Eksklusif di dalam Hak Cipta

Sugita berpendapat bahwa dengan adanya hak eksklusif yang isinya berkaitan dengan hak untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu karya cipta mereka yang diwujudkan dalam bentuk apapun bagi seorang seniman tari atau pencipta tari adalah sangat diperlukan, karena menurutnya bahwa hak eksklusif ini berkaitan dengan adanya penghargaan dan penghormatan terhadap karya cipta seseorang. Sugita menjelaskan dengan analogi seorang pahlawan, menurutnya bahwa seorang pahlawan yang meninggal dalam medan pertempuran maka seorang pahlawan dihargai karena jasa – jasanya, begitu juga dengan seorang seniman. Dalam berkarya seorang seniman juga memerlukan adanya penghargaan dan penghormatan oleh orang lain, baginya banyak atau sedikitnya hasil karya seorang seniman harus tetap dihargai dan dihormati oleh orang lain, dengan dihargai dan dihormatinya karya cipta seorang seniman oleh orang lain maka sudah merasa di '*wongke*' atau diakui keberadaannya oleh orang lain.²⁷⁶

Menurut Sugita berkaitan dengan adanya hak moral dan hak ekonomi di dalam suatu karya cipta, dalam hal ini adalah karya cipta seni tari maka seorang seniman juga memerlukan hak – hak tersebut. Dijelaskan olehnya, jika hal ini dikaitkan dengan sebuah profesi maka sudah barang tentu bahwa penghormatan dan penghargaan mutlak diperlukan. Disebutkan oleh Sugita bahwa hak moral dan hak ekonomi dalam perkembangannya juga diperlukan untuk kelangsungan anak cucu atau

²⁷⁶Sugita, *Loc Cit.*

keturunannya. Berkaitan dengan adanya hak moral, bagi Sugita hak tersebut merupakan sebuah *prestise* atau rasa kebanggaan bagi seorang seniman tari dalam statusnya di masyarakat.

Sugita berpendapat pada prinsipnya ia merasa senang dan bangga ketika karya ciptanya dihargai secara moral oleh orang lain, artinya bahwa jika karya ciptanya itu akan dipentaskan oleh orang lain hendaknya disebutkan siapa penciptanya, hal ini dilakukan dalam rangka menghargai karya orang lain. Dan jika di dalam UUHC 2002 disebutkan juga adanya hak ekonomi, maka ia sepakat dengan adanya hak ekonomi itu sebagai salah satu penghargaan seorang seniman tari dalam dimensi ekonominya.

Sedangkan menurut Siti Sutiyah bahwa dengan adanya hak eksklusif yang berkaitan dengan pengumuman dan perbanyakan yang diatur di dalam UUHC 2002 menurutnya lebih memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap karya cipta seorang seniman, terutama seniman tari atau pencipta tari. Dan ia sepakat dengan adanya hak tersebut jika diterapkan di dalam karya cipta seni tari. Siti Sutiyah juga sepakat dengan adanya hak ekonomi dan hak moral yang diatur di dalam UUHC 2002, hal ini lebih memberikan jaminan perlindungan terhadap seniman tari atau pencipta tari dalam berkarya di bidang seni tari.²⁷⁷

Sutopo Tedjo Baskoro dan MM Ngatini berpendapat bahwa diberikannya hak eksklusif terhadap pencipta tari dalam sebuah karyanya adalah merupakan suatu penghargaan dan penghormatan kepada seorang seniman, bagi mereka sudah diakui dan dihargai atas karya seni tari mereka oleh masyarakat saja sudah cukup apalagi ada hak yang diberikan oleh undang – undang kepada seorang seniman (dalam hal ini adalah seniman tari) untuk melakukan pengumuman dan perbanyakan atas suatu karya ciptanya, seorang seniman tari tentunya merasa senang dan nyaman dengan adanya hak mereka yang dilindungi. Bagi Sutopo dan MM Ngatini hak ekonomi dan hak moral yang diberikan oleh undang – undang sudah merupakan lebih dari cukup, bagi mereka yang penting adalah berkarya dan karya mereka dihargai dan diakui keberadaannya oleh orang lain saja sudah merupakan suatu kebanggaan.²⁷⁸

²⁷⁷Siti Sutiyah, *Loc Cit.*

²⁷⁸Sutopo dan MM Ngatini, *Loc Cit.*

Sedangkan menurut Y Sumandiyo Hadi keberadaan hak eksklusif yang ditentukan di dalam Undang – undang hak cipta jika memang hal itu berguna dan memang dapat digunakan untuk kepentingan bagi seorang pencipta tari, maka ia sepakat dengan adanya hak tersebut sepanjang untuk kepentingan atau memang dirasa menguntungkan si pencipta tari. Menurut pak Mandy (panggilan akrab Y Sumandiyo Hadi) hak moral dan hak ekonomi yang diatur di dalam UUHC 2002 dan juga berlaku untuk seorang seniman tari, maka ia sepakat dengan adanya kedua hak tersebut mengingat dalam berkarya seorang seniman juga membutuhkan adanya pengakuan dan penghormatan oleh orang lain.²⁷⁹

Menurut Ni Nyoman Seriati, bahwa hak eksklusif yang berkaitan dengan hak untuk melakukan dan memperbanyak atas sebuah karya cipta yang diatur oleh undang – undang dalam hal ini adalah UUHC 2002 menurutnya sangat penting bagi seniman tari atau pencipta tari. Ni Nyoman Seriati menjelaskan bahwa memang sudah sepantasnya seorang seniman diberikan penghargaan dan penghormatan untuk mengelola atau menggunakan karyanya itu untuk kepentingannya sendiri.²⁸⁰

KRT Juwanjono Suryo Bronto dan Widaru Krefiyanto menjelaskan bahwa dengan diberikannya hak eksklusif bagi seorang seniman tari atau pencipta tari dalam hal untuk melakukan pengumuman dan memperbanyak suatu karya cipta mereka (dalam hal ini adalah karya cipta seni tari) merupakan hak yang memang sudah sepantasnya dimiliki oleh seorang seniman dalam memanfaatkan dan atau menggunakan karya cipta mereka untuk kepentingan si pencipta. Berkaitan dengan adanya hak moral dan hak ekonomi yang diatur di dalam hak cipta menurut mereka (seniman tari) memang sudah sewajarnya ada, hal ini berkaitan dengan kelangsungan seorang seniman tari atau pencipta tari dan sebagai wujud penghormatan terhadap karya dan kreatifitas dari seorang seniman tari atau pencipta tari.²⁸¹

Jiyu Wijayanti dan Supriyanti juga berpendapat sama dengan beberapa seniman tari lainnya , bahwa hak eksklusif yang disebutkan di dalam UUHC 2002 bagi seorang seniman tari merupakan hak yang sudah sewajarnya diberikan, karena bagi seniman tari atau pencipta tari dengan adanya hak tersebut (hak eksklusif) mereka (seniman tari) bisa memanfaatkan dan

²⁷⁹Y Sumandyo Hadi, *Loc Cit.*

²⁸⁰Ni Nyoman Seriati, *Loc Cit.*

²⁸¹KRT Juwanjono Suryo Bronto dan Widaru Krefiyanto, *Loc Cit.*

menggunakan karya ciptanya itu dengan baik. Dan dengan adanya hak moral dan hak ekonomi bagi seorang seniman tari atau pencipta tari maka orang yang akan menggunakan atau memanfaatkan suatu karya cipta tari miliknya, maka ia harus meminta izin kepada seniman tari tersebut.²⁸²

Kuswarsantya menambahkan bahwa keberadaan hak eksklusif yang disebutkan di dalam UUHC 2002, menurutnya bahwa hak itu sangat perlu bagi seorang seniman tari atau pencipta tari dalam rangka memberikan perlindungan terhadap karya ciptanya. Baginya keberadaan hak eksklusif terhadap karya cipta merupakan suatu bentuk perlindungan di era global seperti sekarang ini yang sudah memasuki industrialisasi budaya (penjelasan pemanfaatan karya cipta baik yang kontemporer maupun tradisional secara ekonomi). Karena dengan adanya hak eksklusif ini seorang seniman tari akan merasa aman dan nyaman dalam berkarya dan terus meningkatkan karya cipta seninya. Bagi Kuswarsantya dengan di dukung hak ekonomi dan hak moral, maka seorang seniman tari merasa lebih terlindungi hak – haknya, artinya bahwa setiap karya dari seorang seniman tari sudah ada ketentuan atau rambu – rambunya pada saat karya mereka itu dipentaskan atau digunakan oleh orang lain untuk kepentingan tertentu.²⁸³

Kuswarsantya berpendapat bahwa untuk hak eksklusif itu hendaknya tidak diterapkan secara saklek atau kaku, karena dapat berdampak pada keberlangsungan dari eksistensi sebuah karya cipta seni tari itu sendiri, artinya harus dilakukan identifikasi terhadap objek perlindungan itu sendiri. Maksudnya bahwa jangan sampai dengan adanya hak eksklusif tersebut menjadi tidak maju dan berkembangnya eksistensi sebuah karya cipta seni tari di dalam masyarakat, menurutnya hal ini berkaitan dengan eksistensi seni tari tradisional. Sehingga perlu diadakan sistem hak eksklusif yang seimbang di dalam penerapannya bagi seni tari tradisional mengingat kultur komunal yang berlaku di dalam pendukung seni tari tradisi.

Karya cipta sebagai wujud kreatifitas seorang seniman (tari) yang di dalam perkembangannya membutuhkan suatu perlindungan hukum, maka adalah wajar ketika seorang

²⁸² Jiyu Wijayanti dan Supriyanti, *Loc Cit.*

²⁸³ Kuswarsantya, *Loc Cit.*

pencipta (tari) menginginkan adanya penghargaan dan pengakuan terhadap munculnya hak – hak yang timbul atas suatu karya cipta yang telah dihasilkannya. Hak – hak yang timbul atas sebuah karya yang dihasilkan oleh seorang seniman tari itu biasanya berupa hak eksklusif yaitu hak untuk melakukan “monopoli” atas karya ciptanya itu. Hak ini berupa hak untuk melakukan pengumuman dan perbanyakan atas karya cipta seni (tari) yang telah diciptakannya itu. Sehingga adalah wajar ketika seorang pencipta (tari) bisa memanfaatkan dan atau menggunakan hak – hak yang timbul dari setiap hasil karyanya itu untuk kepentingan apapun demi kemaslahatan dan mengembangkan karyanya itu sendiri.

Hak eksklusif yang diberikan oleh undang – undang ini dimaksudkan agar orang lain yang akan memanfaatkan atau menggunakan karya cipta seseorang yang bukan merupakan karya ciptanya sendiri hendaknya melalui prosedur, artinya setiap orang yang akan menggunakan atau memanfaatkan untuk kepentingan apapun itu bentuknya hendaklah meminta izin dari yang mencipta. Hal ini dilakukan mengingat bahwa di dalam suatu karya cipta itu melekat adanya suatu hak atas sebuah ciptaan yang telah dihasilkan, sehingga setiap orang harus menghormati adanya hak yang timbul dari karya cipta itu.

Sehingga dari pemaparan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa bagi seorang seniman tari atau pencipta tari hak eksklusif yang berisikan hak untuk mengumumkan dan melakukan perbanyakan terhadap karya cipta seni tari mereka adalah sangat diperlukan untuk lebih menjamin keberlangsungan dan memberikan perlindungan terhadap karya cipta mereka. Mereka juga sepakat dan setuju adanya hak ekonomi dan hak moral yang diberikan oleh UUHC 2002, karena bagi mereka hak – hak tersebut memberikan perlindungan dan penjaminan terhadap hasil karya seniman tari dari pemanfaatan oleh orang lain.

3. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Menurut Sugita bahwa jangka waktu perlindungan karya cipta yang diatur di dalam UUHC 2002 sudah sangat tepat, di dalam memberikan penjelasan tentang adanya jangka waktu ini, kembali Sugita menjelaskan dengan analogi seorang pahlawan. Bahwa seorang pahlawan dikenang oleh masyarakat karena jasa – jasanya, begitu juga dengan seorang seniman tari. Baginya sebuah karya dari seorang seniman tari juga merupakan suatu perjuangan, perjuangan dalam arti membuat suatu yang sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada dalam konteks berkreasi di bidang seni. Bahkan secara ekstrim dijelaskan oleh Sugita, bahwa batas waktu penghargaan seseorang di hargai atas jasa – jasa dan karyanya adalah seharusnya tidak terbatas, batasnya adalah ketika orang – orang sudah tidak menghargai orang lain.²⁸⁴

Sutopo Tedjo Baskoro dan MM Ngatini berpendapat bahwa mereka setuju – setuju saja dengan adanya jangka waktu perlindungan yang diberikan oleh UUHC 2002. Menurut mereka bahwa sudah dilindungi saja mereka sudah bersyukur, apalagi diberikannya jangka waktu yang selama itu. Menurut kedua

²⁸⁴Sugita, *Loc Cit.*

seniman tari itu, yang penting baginya adalah dalam berkarya seorang seniman menginginkan adanya perlindungan terhadap karya ciptanya, berapapun lamanya jangka waktu perlindungan tersebut bagi mereka setuju – setuju saja.²⁸⁵

Sedangkan menurut Y Sumandiyo Hadi berapapun lamanya jangka waktu perlindungan terhadap karya cipta seni tari yang di atur di dalam UUHC 2002 adalah tidak begitu dipersoalkan. Asalkan bagi seorang seniman tari jangka waktu itu memang berguna dan memang dibutuhkan untuk keperluan seorang seniman tari dalam berkarya.²⁸⁶

Berkaitan dengan adanya jangka waktu perlindungan terhadap karya cipta seni tari yang diatur di dalam UUHC 2002 menurut Ni Nyoman Seriati memang dibutuhkan, baginya berapapun lamanya jangka waktu perlindungan itu yang penting bisa bermanfaat bagi diri seorang seniman tari untuk terus berkarya dan mengembangkan profesinya sebagai seorang seniman tari.²⁸⁷ Hal ini juga diungkapkan oleh Jiyu Wijayanti dan Supriyanti, pada prinsipnya mereka tidak mempersoalkan berapa lamanya jangka waktu perlindungan terhadap karya cipta seni tari mereka, yang penting lanjut Jiyu dan Supriyanti bahwa mereka bisa menggunakan dan memanfaatkan karya cipta mereka itu secara maksimal.²⁸⁸

KRT Juwanjono Suryo Bronto dan Widaru Krefiyanto berpendapat bahwa berapapun lamanya jangka waktu perlindungan terhadap karya cipta seni tari yang mereka hasilkan tidak menjadi masalah, yang penting apa yang menjadi hak – hak dari seorang seniman tari atau pencipta tari untuk mempergunakan karya ciptanya itu tidak dilanggar oleh orang lain.²⁸⁹

Sedangkan menurut Kuswarsantya, terkait dengan adanya jangka waktu perlindungan terhadap karya cipta seni tari yang dtentukan di dalam UUHC 2002 menurut pendapatnya bahwa sebaiknya untuk karya cipta seni tari yang kontemporer atau kreasi baru jangka waktu perlindungannya hendaknya jangan selama seperti yang disebutkan oleh UUHC 2002, karena sifatnya hanya temporer atau sesaat belaka dan menurutnya bahwa tari kreasi baru atau kontemporer itu bersifat dinamis.

²⁸⁵Sutopo dan MM Ngatini, *Loc Cit.*

²⁸⁶Y Sumandyo Hadi, *Loc Cit.*

²⁸⁷Ni Nyoman Seriati, *Loc Cit.*

²⁸⁸Jiyu Wijayanti dan Supriyanti, *Loc Cit.*

²⁸⁹KRT Juwanjono Suryo Bronto dan Widaru Krefiyanto, *Loc Cit.*

Sedangkan untuk tari Tradisional Klasik Kraton dan tari Tradisional Kerakyatan perlu dilindungi dalam jangka waktu yang lama, karena menurutnya sifat dari seni tari tradisional adalah langgeng dan tidak temporer bahkan sampai sekarang ini seni tari tradisional tersebut tetap dilestarikan oleh masyarakat pendukungnya sehingga adalah wajar ketika seni tari tradisional tersebut jangka waktu perlindungannya lama.²⁹⁰

Jangka waktu perlindungan terhadap suatu karya cipta yang telah dihasilkan oleh seorang pencipta (tari) atau seorang seniman tari diberikan dalam rangka untuk melindungi terhadap sebuah karya cipta yang telah berlangsung lama atau dengan kata lain bahwa suatu karya cipta itu sudah berlangsung dalam waktu tertentu dimana seorang penciptanya telah meninggal dunia. Jangka waktu ini memberikan batasan sampai sejauh mana atau sampai dengan berapa tahun lamanya seorang pencipta atau ahli warsinya tersebut bisa “memanfaatkan” atau menggunakan karya cipta itu sebagai suatu hak yang bersifat eksklusif. Diberikannya jangka waktu ini dimaksudkan bahwa setelah selesainya tenggang waktu pemanfaatan secara eksklusif oleh seorang pencipta atas karya ciptanya, maka diharapkan bahwa setiap orang bisa menggunakan atau melestarikan sebuah karya cipta itu untuk kepentingan karya cipta (tari) itu sendiri.

Dari pemaparan di atas, maka dapatlah penulis buat suatu kesimpulan bahwa pada prinsipnya seniman tari di Yogyakarta

²⁹⁰Kuswarsantya, *Loc Cit.*

setuju dan sepakat dengan adanya jangka waktu perlindungan terhadap karya cipta seni tari, hal ini berkaitan dengan adanya konsep kepemilikan hak moral dan hak ekonomi yang diatur di dalam UUHC 2002. Berapa lamanya jangka waktu perlindungan tersebut mereka tidak mempermasalahkannya, asalkan hak – hak mereka tidak dilanggar oleh orang lain.

4. Pembatasan di dalam Hak Cipta

Pembatasan yang diatur di dalam UUHC 2002 sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 14 sampai dengan pasal 18, menurut Sugita bahwa pada prinsipnya setuju dengan adanya pembatasan itu. Karena bagi Sugita yang namanya seni juga memiliki dimensi sosial, sehingga pada saat karya ciptanya digunakan oleh orang lain yang peruntukannya untuk pendidikan, dan hal – hal yang telah ditentukan di dalam UUHC 2002, menurutnya hal itu bisa digunakan untuk pelestarian dan pengembangan bagi sebuah seni tari itu sendiri.²⁹¹

Menurut Siti Sutiyah bahwa dengan adanya pembatasan tentang penggunaan suatu hak cipta yang diatur di dalam UUHC 2002, dia sangat setuju karena menurutnya dengan adanya pembatasan yang telah ditetapkan di dalam UUHC 2002 yaitu adanya penggunaan yang wajar untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengembangan terhadap karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, bagi Siti Sutiyah pembatasan ini adalah sebagai upaya untuk pelestarian dan pengembangan terhadap karya ciptanya itu sehingga bisa dipelajari dan diketahui oleh orang lain. Menurut Siti Sutiyah dia akan merasa sangat bangga kalau karya ciptanya itu dipelajari dan dikembangkan oleh orang lain untuk kemajuan seni tari itu sendiri.²⁹²

Sutopo Tedjo Baskoro dan MM Ngatini juga berpendapat sama, menurut mereka bahwa dengan diaturnya tentang adanya penggunaan yang wajar atau penggunaan karya cipta seorang seniman yang dipergunakan atau dimanfaatkan oleh orang lain untuk kepentingan – kepentingan pendidikan,

²⁹¹Sugita, *Loc Cit.*

²⁹²Siti Sutiyah, *Loc Cit.*

penelitian dan penggunaan yang lain yang berdimensi sosial kependidikan adalah sangat baik. Artinya seorang seniman akan merasa bangga dan senang ketika digunakannya karya cipta mereka untuk kepentingan – kepentingan tersebut, mereka merasa adanya pengakuan dari orang lain terhadap karya ciptanya itu.²⁹³

Sedangkan menurut Y Sumandiyo Hadi bahwa pembatasan terhadap pemanfaatan atas karya cipta seorang seniman yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan secara wajar terhadap penggunaan suatu karya cipta dia setuju dan sepakat dengan ketentuan itu. Menurut Sumandyo bahwa penggunaan karya cipta seseorang yang digunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan ilmu pengetahuan adalah sangat bagus untuk perkembangan dan kemajuan ilmu itu sendiri, artinya tambah beliau bahwa dengan semakin dikembangkannya sebuah ilmu itu ke dalam masyarakat maka suatu ilmu itu akan selalu tumbuh dan hidup di masyarakat. Begitu juga dengan karya cipta seni tari, semakin banyak orang mempelajari dan memanfaatkan sebuah karya cipta seni tari maka semakin berkembanglah seni tari itu karena ada pengakuan dan penghargaan oleh masyarakat.²⁹⁴

Ni Nyoman Seriati²⁹⁵, Jiyu Wijayanti dan Supriyanti²⁹⁶ juga berpendapat sama dengan seniman tari yang lain, bagi mereka bahwa untuk sebuah kemajuan dan perkembangan serta eksistensi sebuah ilmu pengetahuan, seni dan sastra adalah mutlak adanya proses belajar dan pembelajaran yang dapat memajukan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Begitu juga dengan penggunaan karya cipta seni tari oleh orang lain yang dilakukan secara wajar seperti yang disebutkan di dalam UUHC 2002. Penggunaan secara wajar tersebut pada prinsipnya adalah untuk perkembangan dan kemajuan seni tari itu sendiri di dalam masyarakat, karena semakin banyak yang mempelajari suatu karya cipta seni tari sebagai hasil karya orang lain. Maka dengan sendirinya seni tari itu akan selalu hidup dan berkembang di dalam masyarakat, sehingga eksistensi dan pelestarian terhadap seni tari itu akan selalu hidup di dalam masyarakat.

KRT Juwanjono Suryo Bronto dan Widaru Krefiyanto berpendapat bahwa mereka setuju dengan aturan yang

²⁹³Sutopo dan MM Ngatini, *Loc Cit.*

²⁹⁴Y Sumandyo Hadi, *Loc Cit.*

²⁹⁵Ni Nyoman Seriati, *Loc Cit.*

²⁹⁶Jiyu Wijayanti dan Supriyanti, *Loc Cit.*

memberikan pengecualian atau pembatasan terhadap penggunaan sebuah karya cipta untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan yang telah ditentukan di dalam UUHC 2002. Karena menurut mereka dengan dipelajari dan diteliti serta dikembangkannya suatu karya cipta mereka adalah sebuah penghargaan dan suatu kebanggaan tersendiri, sebab dengan dipelajari dan dikembangkan oleh orang lain berarti eksistensi karya cipta tari mereka dikenal dan diakui keberadaannya oleh orang lain.²⁹⁷

Sedangkan menurut Kuswarsantya bahwa dengan diadakannya pembatasan terhadap penggunaan karya cipta untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengembangan adalah sangat fair sekali dan sepakat dengan adanya ketentuan itu. Menurut Kuswarsantya dengan diadakannya pengembangan, penelitian dan digunakan untuk pendidikan oleh orang lain berarti ada pengakuan dan penghargaan terhadap seorang seniman, dan dengan diadakannya pengembangan serta penelitian berarti ada sebuah kebanggaan tersendiri bagi seorang seniman yang menghasilkan karya cipta tersebut, artinya berarti ada proses penghargaan dan pengakuan karya cipta seorang seniman tersebut oleh orang lain. Sehingga dengan diadakannya pengembangan dan penelitian serta pendidikan itu, berarti ada upaya oleh orang lain untuk memajukan dan mengembangkan suatu karya cipta itu dalam hal ini adalah pengembangan dan memajukan seni tari.²⁹⁸

Pembatasan atau adanya pengecualian – pengecualian terhadap suatu karya cipta yang wujudnya penggunaan – penggunaan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap pemanfaatan sebuah karya cipta yang tindakannya berupa penggunaan karya cipta untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengembangan adalah sangat wajar dan memang dibenarkan oleh undang – undang. Hal ini dilakukan mengingat kegiatan yang dilakukan tersebut bersifat *non profit*.

²⁹⁷KRT Juwanjono Suryo Bronto dan Widaru Krefiyanto, *Loc Cit*.

²⁹⁸Kuswarsantya, *Loc Cit*.

Menurut penulis, tindakan tersebut dilakukan dalam rangka mengembangkan dan melestarikan serta untuk lebih meningkatkan dan memajukan sebuah karya cipta itu sendiri. Begitu juga dengan karya cipta seni tari, dengan diadakannya penelitian dan pengembangan serta diajarkan di sekolah – sekolah dilakukan dalam rangka untuk melestarikan dan mengembangkan, memajukan serta meningkatkan eksistensi suatu karya cipta seni tari itu sendiri. Karena dengan terus dipelajari dan dikembangkan di masyarakat, maka kegiatan masyarakat dalam berkesenian akan terus lestari dan berkembang.

Dari pemaparan di atas, maka dapatlah penulis buat suatu kesimpulan bahwa pada prinsipnya seniman tari di Yogyakarta setuju dan sepakat dengan adanya pembatasan terhadap karya cipta yang diatur oleh UUHC 2002, karena bagi seniman tari di Yogyakarta proses pendidikan, penelitian dan pengembangan oleh orang lain adalah suatu proses penghargaan dan pengakuan serta pelestarian atas karya cipta seni tari itu. Hal tersebut juga merupakan sebuah kebanggaan dan rasa kepuasan tersendiri dari seorang seniman jika karya mereka dipelajari oleh orang lain, dan menurut mereka hal itu merupakan suatu bentuk kebanggaan dan bentuk pengakuan terhadap hasil karya mereka.

Sehubungan dengan adanya pengaturan perlindungan terhadap karya cipta seni tari yang di atur di dalam UUHC 2002, pada umumnya seniman tari di Yogyakarta sepakat atau setuju terhadap adanya pengaturan perlindungan karya cipta seni tari yang diatur di dalam UUHC 2002. Mengingat dari beberapa hal yang ditentukan di dalam UUHC 2002 yang berkaitan dengan perlindungan terhadap karya cipta seni tari pada umumnya seniman tari menyetujui dan sepakat jika karya cipta mereka itu diberikan perlindungan hukum, sehingga dengan diatur dan diberikannya perlindungan terhadap karya cipta seni tari mereka itu, maka sebuah karya cipta seorang seniman tari atau pencipta tari ternyata terkandung hak cipta ternyata bisa memberikan jaminan perlindungan dan penghargaan atas karya cipta mereka.

Menurut Kuswarsantya, bahwa di dalam melihat konsep hak cipta yang berkaitan dengan hak cipta atas karya cipta seni tari harus dilihat dalam 2 (dua) aspek; *pertama* berkaitan dengan suatu seni tari tradisional, baik itu adalah tari Tradisional Klasik Kraton maupun tari Tradisional Kerakyatan haruslah dilihat dari konteks dan sistem yang ada di dalam 2 (dua) seni tersebut yang masih bersifat tradisional dan komunal. Artinya di dalam seni tari Tradisional Klasik Kraton yang prinsipnya bahwa penciptaan seni tari baik yang diciptakan oleh empu – empu terdahulu maupun oleh

abdi dalem Kraton merupakan sebuah wujud dedikasi seorang abdi dalem atau empu kepada seorang Raja, yang bagi mereka adalah sebuah penghargaan tersendiri dan sebagai wujud pengabdian seorang abdi dalem kepada Rajanya, dan mereka tidak pernah berpikiran untuk mendapatkan penghargaan atas karya cipta mereka.²⁹⁹

Kuswarsantya menambahkan bahwa karya cipta *empu tari* terdahulu dan *abdi dalem* Kraton biasanya mereka mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari Raja atas karya ciptanya yang berupa sebidang tanah atau bangunan lainnya serta adanya penghargaan dari Raja yang berupa status sosial. Sedangkan untuk tari Tradisional Kerakyatan yang sifatnya komunal dan dengan watak sederhana dan sikap menerima dari masyarakat tradisional tersebut, maka konsep hak cipta tidak bisa diterapkan secara utuh. Untuk seni tari Tradisional Kerakyatan, menurut Kuswarsantya masyarakat setempat sebagai pemilik karya cipta itu tidak pernah berpikiran tentang konsep penghargaan hak cipta, sebab dengan sifat kesederhanaan dan watak masyarakat desa yang *nrimo*. Menurut mereka ada suatu sikap dan rasa kebanggaan tersendiri jika karya seni mereka digunakan atau dipentaskan oleh orang lain.

²⁹⁹Kuswarsantya, *Loc Cit.*

Menurut Kuswarsantya bahwa pada masyarakat pemegang seni tradisional kerakyatan yang memegang prinsip komunal dan kurang begitu memperhatikan tentang apa itu hak cipta, ternyata karya seni mereka tersebut jika dipentaskan dan dipertontonkan untuk kepentingan pariwisata oleh pemerintah kabupaten dimana mereka bertempat tinggal juga sudah diberikan penghargaan berupa uang pembinaan dan pemberian seperangkat peralatan seni tari bahkan diberikan beasiswa kepada anak – anak mereka yang kurang begitu mampu. Bagi Kuswarsantya penghargaan tersebut juga dapat dipersamakan dengan pemberian hak ekonomi pada hak cipta namun dalam bentuk yang lain. Ditambahkan olehnya di dalam seni tari Tradisional Klasik Kraton sebenarnya wujud dari sebuah penghargaan karya cipta seni tari yang diciptakan oleh *empu tari* dan *abdi dalem* Kraton adalah adanya pemberian sebuah status dan hadiah berupa tanah dan rumah bagi mereka, dan menurut Kuswarsantya bahwa kedua wujud penghargaan itu baginya begitu sangat berarti dan sampai sekarang masih bisa di ingat oleh orang – orang.

Kedua, sedangkan untuk seni tari Kreasi Baru atau Kontemporer dengan sifat individualistiknya, maka ada kecenderungan suatu sikap dari seorang seniman tari atau pencipta tari untuk menerapkan sebuah sistem pengakuan dan penghargaan dari orang lain terhadap naskah dan wujud kreatifitas

karya cipta mereka. Artinya di dalam konteks seni tari Kreasi Baru atau Kontemporer ini ada suatu perubahan cara berfikir dan perubahan sikap dari seorang seniman tari atau pencipta tari terhadap karya cipta mereka, disini lanjut Kuswarsantya seniman tari atau pencipta tari sudah mulai memberikan perlindungan dan menerapkan sistem penghargaan terhadap karya cipta mereka untuk dihargai oleh orang lain.

Pada prinsipnya seniman tari di Yogyakarta sepakat untuk menerapkan adanya sistem hak cipta atas hasil karya mereka, namun tidak dipungkiri bahwa ada suatu kebiasaan yang berkembang di kalangan seniman tari itu sendiri bahwa mereka akan merasa bangga dan senang ketika suatu karya cipta mereka dipentaskan oleh orang lain untuk kepentingan apapun. Dan mereka (Seniman Tari Yogyakarta) tidak merasa dirugikan atas tindakan itu. Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa seniman tari di Yogyakarta dijelaskan bahwa suatu karya seni tari yang merupakan sebuah kesenian yang tidak begitu banyak diminati oleh masyarakat, dan seni tari itu diminati oleh orang – orang tertentu saja. Maka mereka beranggapan bahwa kalau mereka menerapkan sistem hak cipta dengan penuh, takutnya masyarakat peminat dan pencinta seni tari merasa susah untuk menyaksikan dan menikmati seni tari tersebut, sehingga menurut seniman tari mereka harus berhati – hati di dalam melaksanakan

ketentuan tentang hak cipta. Karena dengan alasan itulah mereka takut untuk menerapkan sistem hak cipta secara saklek atau penuh, demi lestari dan terus berkembangnya sebuah kesenian tari di masyarakat mereka membiarkan orang lain menggunakan karya mereka

Di kalangan seniman tari Yogyakarta sendiri proses penghargaan atas karya orang lain juga sudah dilaksanakan tanpa mereka melaksanakan ketentuan yang diatur di dalam UUHC 2002. Sebagai contohnya adalah bahwa di dalam proses penciptaan suatu tarian dari seorang seniman, maka mereka juga telah menyebutkan peran dari masing – masing orang yang membantu mereka. Misalnya seorang seniman tari pada saat mereka menciptakan suatu tarian, maka seorang seniman tari atau pencipta tari menyebutkan siapa – siapa saja orang yang terlibat di dalam proses penciptaannya itu karena bagi mereka seni tari merupakan seni pertunjukan yang harus membutuhkan bantuan dari orang lain untuk mewujudkannya. Sehingga disini bahwa suatu tari karya seniman tari atau pencipta tari pada saat diadakan suatu pementasan, mereka menyebutkan secara jelas siapa komposer musiknya, siapa penata panggung dan lampunya, dan pihak – pihak yang berhubungan dengan proses penciptaan tarinya. Namun menurut seniman tari di Yogyakarta bahwa hak cipta atas karya seni tari tersebut tetap berada atau milik si pencipta tari atau

seniman tari, namun mereka menyebutkan secara transparan siapa – siapa saja yang membantu mewujudkan karya cipta seni tari itu, karena seorang seniman tari atau pencipta tari itu sendiri tidak mungkin bisa melaksanakan sendiri dalam mewujudkan karya seni tari mereka mengingat tari merupakan seni pertunjukan.

Dari pemaparan di atas menurut penulis, sebenarnya bahwa sistem pengakuan dan penghargaan terhadap karya orang lain sudah diterapkan di kalangan seniman tari di Yogyakarta. Namun wujudnya adalah berbeda, tidak seperti yang ditentukan di dalam UUHC 2002. Sebagai tambahan, berdasarkan hasil wawancara dengan seniman tari di Yogyakarta pada intinya mereka ingin menerapkan sistem hak cipta seperti yang sudah dilaksanakan pada karya cipta musik, namun mereka menyadari masih rendah dan sedikitnya minat masyarakat luas terhadap seni tari membuat mereka kemudian untuk berpikir ulang untuk menerapkan hak cipta atas karya mereka secara saklek atau sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UUHC 2002. Berdasarkan hasil wawancara dengan seniman tari di Yogyakarta ternyata ada sebagian seniman tari yang sudah mulai menerapkan ketentuan tentang hak cipta seperti yang disebutkan di dalam UUHC 2002, misalnya berkaitan dengan ketentuan tentang hak ekonomi dan hak terkait seperti yang telah diatur di dalam UUHC 2002.

Namun tidak dipungkiri juga bahwa ternyata meskipun ada beberapa seniman tari³⁰⁰ yang berusaha menerapkan sistem hak cipta seperti yang telah ditentukan di dalam UUHC 2002, ternyata diantara mereka juga ada sebagian seniman tari³⁰¹ lain yang merasa tidak perlu menerapkan ketentuan – ketentuan yang telah disebutkan di dalam UUHC 2002. Sebagian seniman tari berpendapat bahwa mereka sangat senang dan merasa bangga jika karya cipta seni tari mereka digunakan oleh orang lain ataupun ditiru oleh orang lain, karena mereka merasa bangga karena hasil karyanya itu diakui oleh orang lain dan mereka juga merasa senang dan bangga jika hasil karya ciptanya itu dipelajari oleh orang lain. Karena mereka juga beranggapan bahwa seni tari yang telah mereka hasilkan tidak hanya berdimensi ekonomis semata, namun juga berdimensi sosial dan religius.³⁰²

Menurut pendapat seniman tari di Yogyakarta pada saat suatu karya cipta di bidang seni dan budaya ketika telah memasuki lingkup industrialisasi budaya³⁰³ maka ketiga seni tari ini, yaitu seni tari Tradisional Klasik Kraton, seni tari Tradisional Kerakyatan dan seni tari Kreasi Baru atau Kontemporer haruslah diterapkan sistem

³⁰⁰Seniman tari yang dimaksud adalah seniman tari yang beraliran seni tari Kreasi Baru atau tari Kontemporer.

³⁰¹Seniman tari yang dimaksud adalah seniman tari yang beraliran atau yang melestarikan seni tari Tradisional Klasik Kraton dan Kerakyatan.

³⁰²Hasil wawancara dengan seniman tari di Yogyakarta yang telah penulis rangkum dalam hasil wawancara dengan beberapa seniman tari yang telah penulis wawancarai.

³⁰³Industrialisasi Budaya adalah pemanfaatan seni dan budaya di dalam masyarakat untuk kepentingan atau tujuan ekonomis atau komersil, yang lingkungnya sudah memasuki ranah industri media dan pemanfaatan secara ekonomis.

hak cipta atau sistem penghargaan terhadap sebuah karya cipta seperti yang telah diatur di dalam UUHC 2002. Menurut Kuswarsantya dengan adanya penerapan hak cipta yang berhubungan dengan hak eksklusif, hak moral dan hak ekonomi bagi seorang seniman tari atau pencipta tari adalah mutlak diperlukan untuk melindungi hak – hak yang timbul atas suatu karya cipta mereka dari pemanfaatan secara ekonomis oleh orang lain dan perlindungan terhadap seni budaya yang ada di dalam suatu masyarakat tradisional yang dianggap sebagai suatu budaya oleh masyarakat tersebut.³⁰⁴

Seniman tari di Yogyakarta kembali menambahkan pendapatnya bahwa sebenarnya masyarakat sendiri juga berperan untuk mewujudkan adanya pengakuan terhadap sebuah karya cipta seni tari, dicontohkan oleh seniman tari di Yogyakarta mengapa pada saat adanya sebuah pertunjukan atau pementasan seni tari seorang pembawa acara tidak pernah menyebutkan siapa pencipta dari tari yang sedang dipentaskan.

Menurut penulis perlunya pengaturan terhadap perlindungan terhadap seni tari sebagai karya cipta seorang seniman tari pada prinsipnya merupakan sebuah wujud penghargaan terhadap seorang seniman tari, karena dengan kemampuan intelektual dan kreatifitasnya seorang seniman tari berhasil menciptakan suatu

³⁰⁴Hasil wawancara dengan seniman tari di Yogyakarta yang telah penulis rangkum dalam hasil wawancara dengan beberapa seniman tari yang telah penulis wawancarai.

tarian yang memiliki nilai estetis dan juga memiliki nilai ekonomis jika dimanfaatkan dengan baik.

Karya cipta seni tari sebagai hasil kreatifitas manusia dengan akal budinya tidak serta merta tercipta begitu saja, dengan tenaga dan biaya yang dikeluarkan, pada prinsipnya juga membutuhkan suatu adanya perlindungan dan penghargaan terhadap karya cipta mereka. Secara umum, berdasarkan teori, dibagi dalam 4 (empat) macam.³⁰⁵ *Pertama: Teori Reward*, yang menyatakan bahwa kepada para penemu dan pencipta diberikan suatu penghargaan dan pengakuan. *Kedua, Teori Insentif*, yang menyatakan bahwa insentif diberikan kepada para penemu dan pencipta yang telah berhasil melahirkan karya intelektualnya itu guna merangsang upaya atau kreatifitas menemukan dan mencipta lebih lanjut. *Ketiga, Teori Risk*, yang menyatakan bahwa pada dasarnya karya intelektual manusia itu bersifat rintisan, sehingga ada resiko oleh pihak lain untuk me-*refers* atau mengembangkan lebih lanjut dari karya intelektual tersebut. *Keempat, Teori Public Benefit*, atau *Teori Economic Growth Stimulus*, atau *Teori More Things Will Happens*, yang menyatakan bahwa karya intelektual manusia itu merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi.

³⁰⁵Rooseno Harjowidigdo, *Op Cit*, hal 34

C. UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH SENIMAN TARI DI YOGYAKARTA DALAM MELINDUNGI KARYA CIPTA SENI TARI MEREKA

C.1. Pengaturan Karya Cipta Seni Tari Menurut Undang – undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Hak cipta pada prinsipnya melindungi ekspresi dari ide atau gagasan, bukan memberikan perlindungan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keahlian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Hak cipta telah lahir begitu ciptaan selesai dibuat, akan tetapi karena sulit untuk menentukan kapan suatu ciptaan telah selesai dibuat, maka UUHC 2002 memberikan ketentuan bahwa pengakuan dan perlindungan atas suatu ciptaan setelah ciptaan tersebut untuk pertama kalinya dipublikasikan atau diumumkan.³⁰⁶

Pada prinsipnya setiap hasil kreatifitas intelektual seseorang harus dihargai dan dihormati oleh orang lain, sehingga dalam perkembangannya untuk mewujudkan adanya penghargaan dan penghormatan itu dibutuhkan adanya sebuah aturan hukum untuk melindunginya. Sebab sebuah hasil karya cipta seseorang tersebut tentunya di dalam proses pembuatan dan penciptaannya itu

³⁰⁶Budi Santoso, *Op Cit*, hal 82.

membutuhkan jerih payah serta menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran yang tidak sedikit, sehingga diperlukan adanya suatu perlindungan hukum terhadap karya cipta itu.

Rasionalisasi bagi perlindungan hak cipta tidaklah sama dengan paten dan secara historis pertimbangan pemberian imbalan yang lebih besar telah diberikan atas hak – hak yang melekat pada artis – artis dan seniman yang kreatif untuk menerima upah secara wajar atas karya – karyanya daripada untuk memberikan insentif.³⁰⁷

Oleh karena itu suatu perlindungan terhadap sebuah karya cipta mutlak diperlukan oleh si pencipta, perlindungan diperlukan karena untuk mencegah adanya peniruan, penjiplakan dan komersialisasi oleh orang lain tanpa ijin si pencipta sehingga hal tersebut bisa merugikan kepentingan si pencipta. Sehingga diperlukan suatu perlindungan terhadap karya cipta manusia itu secara legal, perlindungan tersebut ditentukan oleh UUHC 2002.

Konvensi Bern merupakan konvensi internasional yang memberikan perlindungan terhadap karya sastra, ciptaan seni, konvensi ini ditandatangani di Jenewa tanggal 6 September 1952 dan kemudian diperbaharui di Perancis pada tahun 1971. Sebagaimana diketahui bahwa Konvensi Bern ini dibuat atas dasar tiga prinsip utama, yaitu yaitu *National Treatment* atau prinsip

³⁰⁷ Cita Citrawinda Priapantja, *Op Cit*, hal 73.

Assimilation, prinsip *Automatic Protection*, dan prinsip *Independence of Protection*.³⁰⁸

Prinsip *Automatic Protection* menyebutkan bahwa perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis tanpa didasarkan pada formalitas tertentu, seperti halnya pendaftaran ciptaan ataupun penggunaan *copyright notice*. Prinsip inilah yang mendasari perundangan hak cipta di berbagai negara di penjuru dunia yang pada umumnya memberikan pengakuan bahwa hak cipta muncul secara otomatis setelah selesainya karya dibuat dalam bentuk tertentu (*tangible form*), tanpa diperlukan adanya tindakan seperti halnya pendaftaran.³⁰⁹

Konvensi Bern sangat berpengaruh dalam pengaturan prinsip dasar hak cipta di banyak negara di dunia, yang memberikan pengakuan *Automatic Protection* tanpa diperlukan tindakan formalitas tertentu, seperti halnya pendaftaran ciptaan. Ketentuan tentang prinsip *Automatic Protection* ini berlaku juga di dalam ketentuan Undang – undang hak cipta yang diberlakukan di Indonesia.

UUHC 2002 yang merupakan suatu produk hukum yang melindungi semua hasil kreatifitas manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang berada di Indonesia pada prinsipnya menganut 2 (dua) sistem hukum, yaitu mengakui hak

³⁰⁸Budi Santoso, *Op Cit*, hal 174.

³⁰⁹Budi Santoso, *Loc Cit*.

cipta yang muncul secara otomatis setelah karya cipta itu telah selesai di buat atau diwujudkan, tetapi sekaligus menyelenggarakan adanya suatu pendaftaran untuk memperoleh pengakuan suatu hak cipta.³¹⁰ Atau dengan kata lain bahwa suatu hasil kreatifitas manusia memperoleh perlindungan hukum melalui 2 (dua) cara, yaitu secara otomatis dan tidak secara otomatis. Secara otomatis maksudnya adalah bahwa tidak dibutuhkannya formalitas tertentu untuk memperoleh perlindungan hukumnya, sedangkan yang tidak secara otomatis artinya dibutuhkan adanya perbuatan untuk memperoleh perlindungan hukumnya, yaitu harus memenuhi formalitas tertentu seperti halnya permohonan pendaftaran atau registrasi.

Di dalam UUHC 2002, pasal yang mengatur tentang adanya ketentuan tentang pendaftaran suatu karya cipta terdapat di dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 44. Adapun yang bertugas menyelenggarakan sebuah ciptaan adalah Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, ketentuan ini disebutkan di dalam Pasal 35 ayat (1) UUHC 2002. Diadakannya sistem pendaftaran ciptaan yang diatur di dalam UUHC 2002 dimaksudkan untuk memberikan kemudahan pembuktian jika terjadi sengketa mengenai hak cipta dikemudian hari di pengadilan.

³¹⁰Lihat Budi Santoso dalam *Dekonstruksi Hak Cipta*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 2006, hal 8.

Pada prinsipnya hak cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi dalam hal terjadi sengketa di pengadilan mengenai ciptaan yang terdaftar dan yang tidak terdaftar, dan apabila pihak – pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian di persidangan

Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaran hak cipta dilindungi, ketentuan tentang tidak mutlakny suatu pendaftaran suatu ciptaan terkandung di dalam Pasal 35 ayat (4) yang berbunyi: *"Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta"*. Hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu dalam pembuktiannya.

Menurut Budi Santoso, bahwa konsep dasar pengakuan hak dalam hak cipta yang otomatis tanpa digantungkan pada formalitas tertentu, seperti halnya pendaftaran ciptaan, merupakan ide dasar pengakuan hak cipta yang berlaku secara formal hampir di seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia yang dituangkan secara formal dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUHC 2002. Dengan demikian pembuktian kepemilikan hak cipta seharusnya dapat dibuktikan dengan segala macam alat bukti yang dapat dilakukan

oleh pencipta.³¹¹ Berikut ini adalah bunyi Pasal 2 ayat (1) UUHC 2002; *"Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku"*.

Adapun sistem pendaftaran hak cipta menurut perundang – undangan Hak Cipta Indonesia yaitu Undang – undang No 19 tahun 2002 disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak cipta.³¹² Sikap pasif inilah yang membuktikan bahwa UUHC 2002 Indonesia menganut sistem pendafatarn deklaratif.³¹³

Sistem pendaftaran yang dilakukan terhadap hak cipta sendiri dikenal dengan 2 (dua) sistem yaitu, sistem *Stelsel Deklaratif* dan *Stelsel Konstitutif*. Stelsel Konstitutif letak titik beratnya ada tidaknya hak cipta tergantung pada pendaftarannya, jika

³¹¹Budi Santoso, *Op Cit*, hal 14.

³¹²Republik Indonesia, tentang hak Cipta, Penjelasan umum berdasarkan UU No 6 Tahun 1982 jo UU No 7 tahun 1987. Dengan sikap pasif ini bukan berarti diperkenankan untuk mendaftarkan hak cipta orang lain yang sudah didaftarkan terlebih dahulu, jika kantor Hak Cipta menemukan hal semacam itu, pendaftaran hak cipta itu tetap ditolak. Dengan system deklaratif, tidaklah menjadi keharusan juridis pengakuan ada tidak tidaknya hak cipta itu melalui pendafataran. Tanpa didaftarkanpun hak cipta itu tetap diakui secara juridis, namun kelak jika ada yang menuntut kebalikannya, pembuktian secara faktual menjadi syarat mutlak. Dalam keadaan seperti ini sertifikat hak cipta yang telah diterbitkan dapat saja dibatalkan.

³¹³*Loc Cit*.

didaftarkan (dengan sistem konstitutif) hak cipta itu diakui keberadaannya secara *de jure* dan *de facto* sedangkan pada stelsel deklaratif titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan, sampai orang dapat membuktikan sebaliknya. Dengan rumusan lain, pada sistem deklaratif sekalipun hak cipta itu didaftarkan undang – undang hanya mengakui seolah – olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara *de jure* harus dibuktikan lagi, jika ada orang lain yang menyangkal hak tersebut.³¹⁴

Hak cipta timbul secara otomatis³¹⁵ setelah ide pencipta dituangkan dalam suatu karya cipta yang berwujud, misalnya suatu tarian. Jika kita mendasarkan pada ketentuan ini maka pendaftaran tidak merupakan bukti kepemilikan suatu hak cipta, pendaftaran hak cipta akan bermanfaat untuk membuktikan kebenaran pihak yang dianggap sebagai pencipta yang sebenarnya apabila terjadi sengketa kasus di pengadilan. Hal ini berarti bahwa pendaftaran yang dilakukan oleh pencipta dijadikan dasar pembuktian untuk menentukan kebenaran pencipta dan bukan sebagai dasar kepemilikan pencipta yang bersangkutan.

Bukti surat pendaftaran ciptaan yang berfungsi layaknya sertifikat hak cipta apabila diteliti asal muasal nya ternyata merupakan implementasi dari ketentuan hukum positif (*ius*

³¹⁴O.K. Saidin, *Op Cit*, hal 89.

³¹⁵Lihat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUHC 2002

constitutum) dari Undang – undang No 6 Tahun 1982, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dalam UUHC 2002 tersebut tercantum beberapa pasal yang mengatur mengenai pendaftaran ciptaan pada pemerintah yang diakhiri dengan diterbitkannya bukti berupa sertifikat hak cipta pada pemohon. Pendaftaran ciptaan pada pemerintah tersebut di Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang yang pada awal digagasnya konsep tersebut ditujukan sebagai cara untuk memperoleh alat bukti kepemilikan apabila terjadi sengketa kepemilikan hak di pengadilan di kemudian hari.³¹⁶

Namun demikian dalam perkembangannya tidak disadari bahwa eksistensi pendaftaran ciptaan pada pemerintah tersebut memberikan peluang untuk disalahgunakan oleh pihak – pihak tertentu yang beritikad buruk. Perkembangan yang tidak menggembirakan sebagai akibat timbulnya sengketa kepemilikan hak sebagai akses pendaftaran ciptaan menimbulkan kesan terjadinya dualisme konsep pengakuan hak dalam hak cipta, yaitu konsep dasarnya perlindungan hukum yang otomatis tanpa pendaftaran, tetapi juga diselenggarakan pendaftaran ciptaan secara salah satu cara memperoleh bukti kepemilikan hak. Bukti kepemilikan sertifikat hak cipta yang diterbitkan pemerintah tidak

³¹⁶Budi Santoso, *Op Cit*, hal 14.

jarang menimbulkan kesan di masyarakat merupakan alat bukti yang amat kuat seperti halnya bukti sertifikat hak atas tanah.³¹⁷

Berkaitan dengan adanya kesan dualisme konsep pengakuan hak cipta yang ditentukan di dalam UUHC 2002, maka penulis sepakat dengan konsep pendaftaran dengan sistem pendaftaran terbatas yang diajukan oleh Budi Santoso yaitu tetap mempertahankan eksistensi pendaftaran ciptaan tetapi juga dilakukan perubahan pada beberapa hal, perubahan tersebut berkisar pada hal – hal seperti berikut:³¹⁸

- a. Dibuatnya kriteria yang jelas tentang ragam ciptaan yang tidak dapat didaftarkan.
- b. Penegasan bahwa pendaftaran ciptaan bukan dalam rangka perolehan alat bukti kepemilikan hak tetapi lebih didasarkan pada kebutuhan pendaftaran.
- c. Tanda bukti pendaftaran yang diterbitkan bukan berupa sertifikat hak cipta, sebagaimana yang diterbitkan selama ini, tetapi lebih berupa surat keterangan atau tanda bukti pendaftaran dsb. Hal ini untuk menghindarkan kesan sertifikat hak cipta sama dengan sertifikat hak milik atas tanah yang diterbitkan pemerintah melalui BPN, yang merupakan bukti yang amat kuat tentang bukti kepemilikan hak.

³¹⁷ *Loc Cit.*

³¹⁸ Lihat Budi Santoso dalam *Dekonstruksi Hak Cipta*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 2002, hal 195.

d. Pengaturan ciptaan yang dilindungi hak cipta sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 12 UUHC 2002 sebaiknya diubah dengan memberikan kriteria yang bersifat umum, bukan menyebutkan satu persatu secara limitatif. Sehingga mampu menampung ciptaan lain yang tidak atau belum disebut dalam Pasal tersebut. Selain itu juga akan lebih fleksibel menghadapi perubahan keadaan yang memungkinkan munculnya ciptaan baru yang membutuhkan perlindungan hak cipta.

Ditambahkan oleh Budi Santoso bahwa dengan dibuatnya kriteria ciptaan yang tidak dapat didaftarkan atau ditolak permohonan pendaftarannya, maka pendaftaran ciptaan dilakukan secara terbatas, artinya sistem pendaftaran ciptaan tetap dilakukan akan tetapi terdapat kriteria tertentu yang dicantumkan dalam UUHC 2002 tentang hal – hal yang tidak dapat didaftarkan. Sebagaimana juga dikenal dalam sistem pendaftaran merek, dikenal adanya hal – hal yang tidak dapat didaftarkan dan hal – hal yang akan ditolak pendaftarannya oleh kantor merek.

Sebagaimana telah diketahui bahwa tari merupakan sebuah hasil kreatifitas manusia di bidang seni, dan tari sebagai hasil kreatifitas manusia itu eksistensinya dilindungi oleh UUHC 2002. Perlindungan terhadap sebuah hasil kreatifitas manusia di bidang seni dalam bentuk penciptaan suatu tari di dalam UUHC 2002

keberadaannya di lindungi di dalam Pasal 10 dan Pasal 12 UUHC 2002. Suatu penciptaan tari yang termasuk ke dalam kategori Pasal 10 UUHC 2002 ada 2 (dua) kategori; *pertama* adalah suatu tarian tradisional kerakyatan yang biasanya tidak diketahui siapa penciptanya dan termasuk sebagai *folklore* yang hidup dan berkembang di dalam suatu masyarakat tertentu dan telah berlangsung sangat lama dan dianggap sebagai sebuah seni kebudayaan bersama masyarakat tersebut. Begitu juga dengan tari Klasik Kraton yang jangka waktu kepemilikannya sudah memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUHC 2002 maka bentuk perlindungannya masuk ke dalam Pasal 10 UUHC 2002. *Kedua* adalah tari Klasik Kraton dan tari Kreasi Baru atau Kontemporer yang jangka waktu kepemilikannya belum memenuhi Pasal 29 ayat (1) UUHC 2002, maka bentuk perlindungannya masuk ke dalam Pasal 12 UUHC 2002.

Karya cipta seni tari yang merupakan suatu hasil kreatifitas manusia yang perlindungannya diatur di dalam UUHC 2002, maka secara otomatis bahwa ketentuan – ketentuan yang diatur di dalam UUHC 2002 juga diberlakukan terhadap karya cipta seni tari itu sendiri. Artinya bahwa prinsip yang terkandung di dalam UUHC 2002 yang berkaitan dengan prinsip *Automatic Protection* juga berlaku terhadap suatu karya cipta seni tari yang telah dihasilkan oleh seorang seniman tari atau pencipta tari.

Berarti pada saat seniman tari atau pencipta tari telah selesai menciptakan sebuah karya cipta seni tari dan telah berwujud nyata sehingga dapat dilihat, didengar oleh orang lain maka secara otomatis maka sebuah karya cipta seni tari itu telah dilindungi oleh UUHC 2002. Karena pada prinsipnya hak cipta memberikan ketentuan bahwa pengakuan dan perlindungan atas suatu ciptaan setelah ciptaan tersebut untuk pertama kalinya dipublikasikan atau diumumkan.

Bagaimana upaya perlindungan terhadap sebuah karya cipta seni tari tersebut dilakukan, maka menurut pendapat penulis hendaknya kita kembali kepada ketentuan yang telah diatur di dalam UUHC 2002, yang pada prinsipnya menganut menganut 2 (dua) sistem hukum, yaitu mengakui hak cipta yang muncul secara otomatis setelah karya cipta itu telah selesai di buat atau diwujudkan, tetapi sekaligus menyelenggarakan adanya suatu pendaftaran untuk memperoleh pengakuan suatu hak cipta. Atau dengan kata lain bahwa suatu hasil kreatifitas manusia memperoleh perlindungan hukum melalui 2 (dua) cara, yaitu secara otomatis dan tidak secara otomatis. Secara otomatis maksudnya adalah bahwa tidak dibutuhkannya formalitas tertentu untuk memperoleh perlindungan hukumnya, sedangkan yang tidak secara otomatis artinya dibutuhkan adanya perbuatan untuk memperoleh

perlindungan hukumnya, yaitu harus memenuhi formalitas tertentu seperti halnya permohonan pendaftaran atau registrasi.

C.2. Upaya Perlindungan Karya Cipta Seni Tari di Kalangan Seniman Tari di Yogyakarta

Setiap hasil kreatifitas intelektual seseorang pada prinsipnya harus dihargai dan dihormati oleh orang lain, sehingga dalam perkembangannya untuk mewujudkan adanya penghargaan dan penghormatan itu dibutuhkan adanya sebuah aturan hukum untuk melindunginya. Sebab sebuah hasil karya cipta seseorang tersebut tentunya di dalam proses pembuatan dan penciptaannya itu membutuhkan jerih payah serta menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran yang tidak sedikit, sehingga diperlukan adanya suatu perlindungan hukum terhadap karya cipta itu.

Hasil kreatifitas seniman tari yang berwujud karya cipta tari juga merupakan sebuah kreatifitas intelektual yang harus kita hormati dan hargai keberadaannya di masyarakat. Wujud nyata karya cipta seorang seniman tari atau pencipta tari yang berupa karya cipta seni tari keberadaannya juga terlindungi di dalam UUHC 2002. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa UUHC 2002 pada prinsipnya menganut 2 (dua) sistem perlindungan hukum, yaitu mengakui hak cipta yang muncul secara otomatis setelah karya cipta itu telah selesai di buat atau diwujudkan, tetapi sekaligus menyelenggarakan adanya suatu pendaftaran untuk

memperoleh pengakuan suatu hak cipta.³¹⁹ Atau dengan kata lain bahwa suatu hasil kreatifitas manusia memperoleh perlindungan hukum melalui 2 (dua) cara, yaitu secara otomatis dan tidak secara otomatis. Secara otomatis maksudnya adalah bahwa tidak dibutuhkannya formalitas tertentu untuk memperoleh perlindungan hukumnya, sedangkan yang tidak secara otomatis artinya dibutuhkan adanya perbuatan untuk memperoleh perlindungan hukumnya, yaitu harus memenuhi formalitas tertentu seperti halnya permohonan pendaftaran atau registrasi.

Bagaimanakah upaya perlindungan karya cipta seni tari yang dilakukan oleh seniman tari atau pencipta tari di Yogyakarta dalam rangka melindungi karya cipta mereka yang merupakan hasil intelektualitasnya untuk menghindari adanya tindakan dari pihak – pihak lain dan orang – orang yang menjiplak atau meniru serta menggunakan dan memanfaatkannya untuk kepentingan komersial secara tidak sah atau illegal dan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada mereka. Berikut ini akan dipaparkan upaya – upaya yang dilakukan oleh beberapa seniman tari atau pencipta tari di Yogyakarta yang telah penulis wawancara.

Upaya perlindungan karya cipta seni tari yang telah dilakukan oleh Sugita dalam rangka melindungi karya cipta seni tari sebagai hasil kreatifitasnya adalah masih berupa upaya dokumentasi terhadap karya cipta seni tarinya. Adapun wujud dokumentasi yang dilakukan oleh Sugita saat ini adalah masih berupa pendeskripsian

³¹⁹Lihat Budi Santoso dalam *Dekonstruksi Hak Cipta*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 2006, hal 8.

atau penulisan karya cipta seni tarinya itu ke dalam suatu tulisan atau deskripsi tari yang isinya berupa pola lantai, hitungan gerak dan iringan musik yang dituliskan di dalam buku dengan menyebutkan nama tariannya, unsur – unsur tari yang diciptakannya. Selain upaya pendokumentasian dengan deskripsi tari, Sugita juga melakukan upaya pendokumentasian karya cipta seni tarinya itu ke dalam bentuk *compact disk* (cd), upaya ini dilakukan setelah karya cipta tari yang diciptakannya itu selesai dibuatnya dan dipentaskan.

Kemudian Sugita mendokumentasikannya ke dalam bentuk *compact disk* (cd). Hal ini dilakukan untuk menjaga dan melindungi karya ciptanya. Meskipun di dalam sebuah penciptaan suatu tari ada ketentuan tentang adanya pencatatan dengan suatu pencatatan notasi laban³²⁰, namun Sugita tidak pernah melakukan pencatatan laban karena dirasakan sangat susah, sedangkan bagi seorang seniman yang dibutuhkan adalah kemudahan untuk selalu berkarya. Dan Sugita belum pernah mendaftarkan seni tari sebagai hasil karya ciptanya itu ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut Dirjend HKI) sebagai upaya perlindungan terhadap karya cipta seni tarinya.

Sedangkan upaya perlindungan karya cipta seni tari yang dilakukan oleh Siti Sutiyah adalah mendokumentasikannya dalam bentuk kaset dan *compact disk* (cd) selain itu juga Siti Sutiyah juga mendeskripsikan karya cipta seni tarinya itu ke dalam bentuk deskripsi tari yang dituliskan ke dalam bentuk buku yang berisi pola lantai, gerakan tari, iringan musik dan hitungan gerak, pencatatan ini dilakukan sebagai upaya dokumentasi terhadap karya cipta tarinya itu. Siti Sutiyahpun belum pernah melakukan upaya pendaftaran karya cipta seni tarinya itu ke Dirjend HKI.³²¹

Adapun upaya perlindungan terhadap karya cipta seni tarinya yang selama ini telah diciptakan, upaya yang dilakukan oleh Y Sumandiyo Hadi adalah sekedar mendokumentasikannya ke dalam deskripsi tari yang menuliskan tentang hitungan gerak, pola lantai dan iringan, dan didokumentasikan dalam bentuk *compact disk* (cd). Pak Mandyo juga belum pernah mendaftarkan karya cipta seni tarinya itu ke Dirjend HKI untuk didaftarkan sebagai upaya perlindungan.³²²

Sutopo Tedjo Baskoro dan MM Ngatini juga belum pernah mendaftarkan hasil karya cipta tari yang dibuat atau dihasilkannya

³²⁰Laban adalah pencatatan terhadap suatu karya cipta tari yang berisikan deskripsi dari tari, yang isinya berupa gambar gerakan tari, unsur – unsur tari, dan iringan musik tari.

³²¹Siti Sutiyah, *Loc Cit.*

³²²Y Sumandiyo Hadi, *Loc Cit.*

itu ke Dirjend HKI, Sutopo dan MM Ngatini pernah akan melakukan pendaftaran hak cipta karya seni tarinya namun ternyata terkendala dengan prosedur birokrasi yang lama dan susah selain itu juga biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pendaftaran itupun tidak sedikit. Sehingga mereka berdua tidak jadi mendaftarkan karya cipta mereka itu, karena bagi mereka lebih baik terus berkarya untuk seni daripada memikirkan sesuatu yang susah dan menghambat kemajuan seni tari. Sehingga upaya yang dilakukan oleh Sutopo dan MM Ngatini pada prinsipnya sama dengan seniman tari Yogyakarta lainnya yaitu mendokumentasikan karya ciptanya itu ke dalam bentuk kaset dan dalam bentuk *compact disk* (cd). Di samping itu juga mereka melakukan upaya pencatatan tari karya ciptanya itu ke dalam bentuk deskripsi tari yang dituliskan atau dicatatkan ke dalam buku, yang pada intinya menjelaskan unsur – unsur tari, hitungan gerak, iringan musik.³²³

Hal yang sama juga dilakukan oleh Ni Nyoman Seriati³²⁴, Jiyu Wijayanti dan Supriyanti³²⁵, upaya perlindungan terhadap karya cipta seni tari ketiga seniman tari tersebut diwujudkan dalam bentuk dokumentasi yaitu dalam bentuk *compact disk* (cd) dan upaya penulisan deskripsi tari. Mereka bertiga ini belum pernah mendaftarkan seni tari hasil karya cipta mereka itu ke Dirjend HKI.

KRT Juwanjono Suryo Bronto dan Widaru Krefiyanto juga belum pernah mendaftarkan seni tari hasil karya cipta mereka ke Dirjend HKI. Adapun upaya yang mereka lakukan dalam rangka melindungi karya ciptanya masih berupa upaya dokumentasi terhadap setiap hasil karya cipta seni tarinya ke dalam bentuk kaset dan dalam bentuk *compact disk* (cd) dan melakukan upaya pencatatan tari karya ciptanya itu ke dalam bentuk deskripsi tari.³²⁶

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Kuswarsantya dalam rangka melakukan perlindungan terhadap karya cipta seni tarinya untuk saat ini adalah dengan upaya melakukan dokumentasi dalam bentuk kaset dan dalam bentuk *compact disk* (cd) selain itu juga Kuswarsantya melakukan upaya pencatatan tari karya ciptanya itu ke dalam bentuk deskripsi tari. Kuswarsantya menambahkan bahwa selama ini upaya yang dilakukan untuk melindungi seni tari hasil karya ciptanya itu ia melakukan upaya perlindungan dengan mendokumentasikan karya ciptanya itu ke Taman Budaya di Yogyakarta. Dia belum pernah melakukan upaya pendaftaran karya

³²³Sutopo dan MM Ngatini, *Loc Cit.*

³²⁴Ni Nyoman Seriati, *Loc Cit.*

³²⁵Jiyu Wijayanti dan Suptiyanti, *Loc Cit.*

³²⁶KRT Yuanjono Suryo Bronto dan Widaru Krefiyanto, *Loc Cit.*

cipta seni tarinya itu ke Dirjend HKI, karena ternyata biaya yang dikeluarkan untuk pendaftaran tersebut ternyata tidak sedikit.³²⁷

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa upaya perlindungan terhadap karya cipta seni tari yang dihasilkan oleh seniman tari atau pencipta tari di Yogyakarta dilakukan dengan upaya pendokumentasian terhadap karya ciptanya itu dalam bentuk kaset, dalam bentuk *compact disk* (cd) dan melakukan pencatatan tari karya ciptanya itu ke dalam bentuk deskripsi tari. Seniman tari di Yogyakarta belum pernah melakukan pendaftaran terhadap karya cipta seni tarinya itu ke Dirjend HKI, karena menurut mereka biaya yang dikeluarkan ternyata tidak sedikit, selain itu juga bagi mereka ternyata sistem pendaftaran yang harus dilakukan ternyata susah.

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan seniman tari di Yogyakarta, mereka (seniman tari Yogyakarta) menyatakan bahwa UUHC 2002 sendiri belum pernah disosialisasikan di kalangan seniman tari di Yogyakarta. Sehingga mereka sangat sulit untuk mengakses dan mengerti apa maksud dan tujuan dari UUHC 2002, namun secara prinsip mereka memang menginginkan adanya perlindungan terhadap semua karya cipta seni tari mereka. Dan seniman tari di Yogyakarta juga menginginkan suatu pemahaman yang lengkap tentang maksud dan tujuan dari UUHC 2002 itu sendiri untuk melindungi karya cipta seni tari karya mereka.

³²⁷Kuswarsantya, *Loc Cit.*

Berkaitan dengan belum dilaksanakan sosialisasi di kalangan seniman tari Yogyakarta dan belum didaftarkan karya cipta seni tari oleh seniman tari, maka penulis sepakat dengan teori Menurut Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa bekerjanya suatu hukum itu tidak bisa dilepaskan dari sesuatu sistem hukum yang terdiri dari tiga unsur³²⁸ yaitu substansi, stuktur, dan budaya hukum, dari ketiga unsur tersebut yang paling menentukan dalam sistem hukum akan berjalan atau tidaknya adalah budaya hukumnya dan budaya masyarakatnya mencakup tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap hukum, juga tentang peranannya dalam hukum juga peranan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan hukum merupakan hak dari individu yang harus ditegakkan.

Menurut Friedman bahwa bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Menurut Lawrence M. Friedman bahwa peraturan – peraturan hukum bisa tegak tergantung pada budaya hukum dan budaya masyarakat tergantung pada budaya masyarakat anggota – anggotanya, yang dipengaruhi oleh tradisi, latar belakang pendidikan, lingkungan budaya, posisi atau kedudukan dan kepentingan ekonomi. Budaya masyarakat disini adalah keseluruhan dari sikap – sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai yang ada dalam masyarakat akan menentukan bagaimana hukum itu berlaku dalam masyarakat dan hukum yang

³²⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* New York. Russel Foundation, 1978, hal. 218-230.

benar-benar diterima dan diperlukan oleh masyarakat ataupun oleh komunitas tertentu sangat ditentukan oleh budaya masyarakat komunitasnya.

Substansi hukum menurut Lawrence M Friedman adalah peraturan – peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan – perbuatan serta hubungan – hubungan hukum, sedangkan komponen struktur merupakan institusi – institusi yang telah ditetapkan oleh substansi ketentuan hukum untuk melaksanakan, menegakkan, mempertahankan, dan menerapkan ketentuan – ketentuan hukum tersebut. Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan – ketentuan formalnya, yaitu memperlihatkan bagaimana pengadilan, perbuatan hukum, dan lain – lain badan serta proses hukum itu barjalan dan dijalankan. Struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh peraturan – peraturan hukum itu dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Sedangkan budaya hukum mengacu kepada bagian – bagian dari budaya pada umumnya yang berupa kebiasaan, pendapat, cara – cara berperilaku dan berpikir yang mendukung atau menghindari hukum. Atau dengan kata lain, budaya hukum merupakan sikap dan nilai – nilai dari individu – individu dan kelompok – kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan –

kepentingan (*interest*) yang kemudian diproses menjadi tuntutan – tuntutan (*demands*) berkaitan dengan hukum. Kepentingan dan tuntutan tersebut merupakan kekuatan sosial yang sangat menentukan berjalan atau tidaknya sistem hukum.³²⁹

Sehingga dapat dianalisa bahwa struktur hukum berkaitan dengan UUHC 2002 tidak berjalan secara maksimal, hal ini disebabkan karena seniman tari sebagai subjek hukum hak cipta (dalam hal ini adalah seniman tari Yogyakarta) belum mengerti benar tentang adanya hak cipta yang diatur di dalam UUHC 2002. Bagaimana suatu substansi hukum itu bisa dimengerti oleh subjek hukum hak cipta, jika sosialisasi hak cipta di kalangan seniman tari Yogyakarta itu sendiri belum pernah dilakukan oleh pemerintah. Selain itu juga berkaitan dengan budaya hukum di kalangan seniman tari sendiri ada suatu sikap dan tindakan di kalangan seniman tari Yogyakarta yang menginginkan adanya suatu perlindungan hukum terhadap karya cipta mereka. Namun jika proses dan sistem perlindungannya membutuhkan biaya dan waktu yang lama, maka menurut pendapat mereka bahwa lebih baik terus berkarya untuk kemajuan dan perkembangan sebuah seni tari daripada menghabiskan waktu dan tenaga serta biaya yang tidak

³²⁹Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Prespective New York*. Russel Foundation, 1978, hal. 15 dalam Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2005, hal 151.

begitu murah untuk melakukan pendaftaran terhadap karya cipta mereka di bidang seni tari.³³⁰

Menurut penulis, untuk saat ini upaya perlindungan yang dilakukan oleh seniman tari di Yogyakarta merupakan sebuah perlindungan non hukum terhadap karya cipta seni tari mereka, artinya di kalangan seniman tari di Yogyakarta telah melakukan perlindungan terhadap karya cipta seni tarinya melalui upaya pendokumentasian terhadap karya ciptanya ke dalam bentuk deskripsi tari yang dilakukan dengan cara melakukan pencatatan ke dalam bentuk tulisan dengan menuliskan pola lantai, hitungan gerak dan iringan musik atau bisa dikatakan seperti notasi partitur pada sebuah musik atau lagu. Disamping itu juga seniman tari di Yogyakarta melakukan upaya dokumentasi dalam bentuk kaset yang berisi suatu iringan musik dan dalam bentuk *compact disk* (cd) yang berisi visualisasi gerakan tari dan musik iringannya.

Seniman tari di Yogyakarta yang pada umumnya belum melakukan perlindungan hukum terhadap seni tari karya ciptanya seperti yang sudah ditentukan oleh UUHC 2002, yaitu dengan melakukan pendaftaran seni tari karya cipta mereka ke Direktorat Jendral HKI. Menurut penulis meskipun mereka (seniman tari Yogyakarta) tidak melakukan upaya perlindungan hukum terhadap seni tari karya ciptanya, namun hendaknya para seniman tari di

³³⁰ Hasil wawancara dengan seniman tari di Yogyakarta yang telah penulis rangkum dalam hasil wawancara dengan beberapa seniman tari yang telah penulis wawancarai

Yogyakarta setelah melakukan upaya pendokumentasian karya ciptanya ke dalam bentuk deskripsi tari dengan menuliskannya ke dalam bentuk tulisan di dalam sebuah buku yang berisi bentuk gerakan, iringan musik dan hitungan gerak, pola lantai, dan mendokumentasikan ke dalam bentuk kaset atau *compact disk* (cd) yang berisi visualisasi gerakan tari dan musik iringannya. Kemudian hendaknya mereka melakukan suatu cara yang disarankan oleh Budi Santoso yaitu dengan cara membungkus dokumentasi karya ciptanya itu kemudian mengirimkannya ke kantor pos dengan nama dan alamat yang menerima adalah si pencipta itu sendiri. Karena dengan cara seperti ini, maka si pencipta bisa membuktikan bahwa dialah orang yang pertama kali menciptakan suatu karya cipta seni tari itu. Hal ini dibuktikan dengan tanggal pengiriman yang tertera dan di tulis atau di cap oleh pihak kantor pos di kertas pembungkus yang berisi dokumentasi karya ciptanya itu.

Kemudian bukti pendokumentasian terhadap karya cipta seniman tari yang telah di bungkus dan di kirimkan lewat kantor pos itu harus selalu disimpan dan dijaga agar tetap selalu tertutup dan terlindungi, sehingga bisa dijadikan sebagai bukti kepemilikan dan bukti bahwa seniman tari itu sebagai pencipta suatu tarian itu yang pertama kali, meskipun tidak dilakukan upaya pendaftaran seperti yang diatur di dalam UUHC 2002.

Meskipun tidak dilakukan suatu upaya pendaftaran terhadap karya cipta seni tari yang di ciptakan oleh seniman tari Yogyakarta, menurut penulis upaya pendokumentasian yang selama ini sudah dilakukan oleh seniman tari di Yogyakarta merupakan suatu wujud upaya perlindungan terhadap karya ciptanya. Upaya pendaftaran karya cipta seseorang yang ditentukan di dalam UUHC 2002 bukanlah suatu bentuk pengakuan bukti kepemilikan suatu hak cipta, pendaftaran hak cipta akan bermanfaat untuk membuktikan kebenaran pihak yang dianggap sebagai pencipta yang sebenarnya apabila terjadi sengketa di pengadilan.

Selain itu sebagai dasar untuk memperjelas bahwa pendaftaran suatu karya cipta bukanlah suatu keharusan disebutkan di dalam Pasal 35 ayat (4) yang menyatakan bahwa: *“ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta”*. Jadi pendaftaran suatu ciptaan bukanlah merupakan suatu wujud pengakuan atas kepemilikan suatu ciptaan, hal ini ditegaskan di dalam Pasal 36 UUHC 2002 yang menentukan *“pandaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan”*.

Upaya pendokumentasian yang saat ini telah dilakukan oleh seniman tari di Yogyakarta merupakan salah satu wujud upaya

perlindungan terhadap karya cipta seni tari yang telah mereka hasilkan, karya cipta seni tari merupakan wujud kreatifitas dan merupakan hasil karya intelektual dari seorang seniman tari dalam upaya memajukan dan terus mengembangkan seni tari di masyarakat. Di samping itu bahwa UUHC 2002 mengakui dan melindungi wujud nyata dari suatu ide dan gagasan dari seseorang yang diwujudkan dalam bentuk suatu ciptaan. Jadi karya cipta seni tari dari seorang seniman tari yang telah diwujudkan secara nyata dalam bentuk gerakan tari adalah dilindungi oleh UUHC 2002.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis tuliskan pada bab terdahulu, maka dapatlah dibuat suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Karya cipta seni tari yang terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu seni tari Klasik Kraton, seni tari Tradisional Kerakyatan dan seni tari Kreasi Baru atau Kontemporer pada prinsipnya adalah dilindungi keberadaannya di dalam Undang – undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Adapun wujud pengaturannya terakomodir di dalam beberapa pasal yang terdapat di dalam Undang – undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut; *pertama* untuk seni tari Klasik Kraton wujud perlindungannya terdapat di dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 31 ayat (1) point a dan pasal 12 serta Pasal 29, *kedua* untuk seni tari Tradisional Kerakyatan wujud perlindungannya terdapat di dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (3), *ketiga* untuk seni tari Kreasi Baru atau Kontemporer wujud perlindungannya terdapat di dalam Pasal 12 dan Pasal 29. Ketentuan yang berlaku di dalam Undang – undang Hak Cipta ini berlaku juga terhadap ketiga wujud karya cipta seni tari ini.

2. Pendapat seniman tari Yogyakarta sehubungan dengan adanya pengaturan tentang perlindungan karya cipta seni tari yang di atur di dalam UUHC 2002, maka seniman tari di Yogyakarta berpendapat bahwa sangat perlu diberikan adanya sebuah perlindungan terhadap karya cipta seni tari mereka, karena pada prinsipnya mereka berpendapat bahwa penghargaan dan penghormatan terhadap sebuah kreatifitas dan karya intelektualitas seorang seniman yang menggeluti bidang seni juga perlu dihargai dan dihormati keberadaannya di masyarakat.
3. Upaya yang dilakukan oleh seniman tari di Yogyakarta dalam rangka melindungi karya cipta seni tari mereka adalah melakukan pendokumentasian terhadap karya ciptanya itu ke dalam bentuk; pendeskripsian atau penulisan karya cipta seni tarinya itu ke dalam suatu tulisan atau deskripsi tari yang isinya berupa pola lantai, hitungan gerak dan iringan musik yang dituliskan di dalam buku dengan menyebutkan nama tariannya, unsur – unsur tari, mendokumentasikannya dalam bentuk kaset dan *compact disk* (cd), proses ini dilakukan setiap kali karya cipta tari yang diciptakannya itu telah selesai dicipta dan dipentaskan.

B. SARAN

Adapun saran yang penulis dapat berikan berkaitan dengan permasalahan yang telah penulis bahas di atas, maka dapatlah diberikan saran sebagai berikut:

1. Seniman tari di Yogyakarta hendaknya melakukan pertemuan bersama diantara sesama seniman tari untuk membahas tentang hal – hal yang berkaitan dengan adanya hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh UUHC 2002 sehingga mereka memiliki kesamaan visi dan misi dalam rangka memberikan perlindungan terhadap karya cipta seni tari yang telah mereka ciptakan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu wujud kesadaran dan upaya dari seniman tari di Yogyakarta untuk bisa melaksanakan ketentuan yang diatur oleh UUHC 2002.
2. Perlu segera dilakukan upaya sosialisasi tentang UUHC 2002 di kalangan seniman tari di Yogyakarta, mengingat seniman tari sebagai salah satu subjek UUHC 2002 belum mengerti dan memahami tentang hak cipta. Upaya sosialisasi ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan pengertian dan pemahaman tentang arti pentingnya hak – hak yang timbul atas karya cipta yang dihasilkan oleh seorang pencipta tari atau seniman tari, sehingga mereka bisa menggunakan dan memanfaatkan karya cipta seni tarinya itu baik secara ekonomis maupun secara moral.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Admadipurwa, Purwadmadi, *Joget mBagong; di sebalik tarian Bagong Kussudiardja*, Yayasan Bagong Kussudiardja, Yogyakarta, 2007.
- Audah, Husain, *Hak Cipta Dan Karya Cipta Musik*, PT Pustaka Litera Antar Nusa, Jakarta, 2004.
- Andriana Krisnawati dan Gazalba Saleh, *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Utama, Jakarta, 1996.
- Bandem, I Made, *Kekhasan Penelitian Bidang Seni*, Ekspresi, Yogyakarta: Jurnal Institut Seni Indonesia Penciptaan Seni Ke Aras Hak Intelektual, Yogyakarta, 2005.
-, *"Tari Sebagai sebuah Simbol Masyarakat Bali"*, Jurnal Seni ISI Yogyakarta, edisi perdana, Yogyakarta, 1991.
- Budi Agus Riswandi dan M Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Damian, Edy, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, UU Hak Cipta 1997, dan Perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitan*, Alumni, Bandung, 1999.
- Danandjaya, James, *Perlindungan Hukum terhadap Folklore di Indonesia*, Pustaka Gramedia, Jakarta, 2002.
- Djumhana, Muhammad, *Perkembangan Doktri dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Earl W. Kinter dan Jack Lahr, *An Intellectual Property Law Primer*, New York: Clark Broadman, 1983.
- Friedman, Lawrence M. , *The Legal System : A Social Science Prespective New York*. Russel Foundation, 1978.

- Garha, Oho, *Seni Tari III*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1979.
- Giddens, Anthony, *Teori Srtukturasi untuk Analisis Sosial*, Terjemahan Adi Loka Sujono, Pedati, Pasuruan, 2003.
- Hadi, Sutrisno *Metodologi Research* (Jilid I), Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1983.
- Hadikusumo, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Hakim, Ahmad, *Peranan Folklore Terhadap Etika Lingkungan*, Jurnal Jaringan Pendidikan dan Kebudayaan Bimasuci, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah, 1996.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Humardani, Gendhon, *'Sang Gladiator', Arsitek Kehidupan Seni Tradisi Modern*, Yayasan Mahavhira, Yogyakarta, 2000.
- Hanna, Judith Lynne, *Tari dan Ilmu Sosial Sebuah Titian Eskalasivisi*. Terj. Ben Suharto. Agaligo, Yogyakarta, 1985.
- Harjowidigdo, Rooseno, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman*. Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), Jakarta, 2005.
- Hartoko, Dick, *Manusia dan Seni*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1984.
- HOZUMI, Tamotsu, *ASIAN Copyright Handbook Buku Panduan Hak Cipta Asia*, Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi), Jakarta, 2006.
- Hutauruk, M. , *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta: Erlangga, 2000.
- Jened, Rahni, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs*, Yuridika Pres Fak. Hukum Unair Surabaya, Surabaya 2001.
- Joyce William Patry, Marshall Leaffer & Peter Taszi, *Copyright Law Casebook Series*, New York: Fourth Edition, Matthew Bender & Company Incorporated, 1998.

- Johnson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Terjemahan Robert M. Z. Lawang, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
-, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat*, Tiara Wacana Yogyakarta, Yogyakarta, 2006.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep – konsep hukum Dalam Pembangunan*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2006.
- Landsey, Tim dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Penerbit Alumni, Bandung, 2006.
- Loghlan, Patricia, *Intellectual Property: Creative and Marketing Rights*, LBC Information Services, Australia, 1998.
- Hartono, Sunaryati *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1982.
- M Djelantik, AA, *Estetika: Sebuah Pengantar*, Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia, Bandung, 1999.
- Mertokusumo, Sudikno *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Moleong, Lexy J. , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004.
- Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto. *Teori-teori Kebudayaan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Murgiyanto, Sal. , *Seni MenataTari*, Dewan Kesenian, Jakarta, 1983.

- Naning, Ramdlon, *Perihal Hak Cipta Indonesia Tinjauan Terhadap Auteurswet 1912 dan Undang – undang Hak Cipta 1982*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Nawawi, H. Hadari, Tanpa Tahun, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2003.
- Poerwadarminta, WJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. 2002.
- Prasetyo, Joko Tri, *Ilmu Budaya Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Priapantja Citrawinda, Cita, *Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan*, badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Penerbit: Alumni, Bandung, 1958.
-, *Ilmu Hukum* , PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung: Tanpa Tahun.
-, *Sisi – sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Kompas, Yakarta, 2003.
-, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.
- Raharjo, Trisno, *Kebijakan Legislatif Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dengan Sarana Penal*, Pensil Komunika, Yogyakarta, 2006.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Terjemahan Alimandan, Rajawali Press, Jakarta, 1992.
- Rosidi, Ajip, *Undang – undang Hak Cipta 1982 , Pandangan seorang Awam*, Djambatan, Jakarta, 1980.
- Sabine, G.H, *History of Political Theory*, Henry Hold and Company, New York, 1954 diterjemahkan: Drs. Spewarno, *Teori – teori Politik I*, Penerbit Bina Cipta, 1977.
- Saidin, H.OK. , *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2004.
- Santoso, Budi, *Dekonstruksi Hak Cipta*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

-, *Pengantar HKI*, Pustaka Magister, Semarang, 2008.
- Sardjono, Agus, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, PT Alumni, Bandung, 2003.
- Sedyawati, Edy, *Pertumbuhan Seni Pertunjukan*, Sinar harapan, Jakarta, 1998.
-, *KelIndonesiaan Dalam Budaya*, Wedatama Widya Sastra, Jakarta, 2008.
-, *Tari: Tinjauan dari Brbagai Segi*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1984.
- Soedarsono, (ed), *Pengantar Apresiasi Seni*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992.
-, *Tari – Tarian Indonesia Pengembangan Kebudayaan*, Direktorat Jenderal Kebudayaan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1977.
-, *Djawa Bali Dua Pusat Perkembangan Drama Tari Tradisional di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta 1972.
-, *Seni Pertunjukan Indonesia Di Era Globalisasi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Soemitro, Hanitiyo Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Soerjono S dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985.
- Sp, Soedarso, *Trilogi Seni: Penciptaan Eksistensi dan Kegunaan Seni*, Badan Penerbit Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta, 2006.
-, *Sejarah Perkembangan Seni Rupa Modern*, CV Delapan puluh Enterprise bekerjasama dengan Badan Penerbit ISI Yogyakarta, Jakarta, 2000.
- Sri Rochana Widyastutieningrum dan R.M. Pramutomo, *Penulisan Kritik Tari*, ISI Press Surakarta, Surakarta, 2007.

- Sumandiyo Hadi, Y. , *Sosiologi Tari, Sebuah telaah kritis yang mengulas tari dari zaman ke zaman: primitif, tradisional, modern hingga kontemporer*, Pustaka, Yogyakarta, 2005.
- Sumardjo, Jacob dkk, *Seni Pertunjukan Indonesia*, STSI Press, Bandung, 2001.
- Susilowati, Etty Kontrak Alih Teknologi pada Industri Manufaktur, Genta Press, Yogyakarta, 2007.
- Umar Purba, Achmad Zen, *Hak Kayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2005.
- Valsala G. Kutty, P.V. , *National Experiences With The Protection of Expressions of Folklore/Traditional Cultural Expressions: India, Indonesia and Philipines*, 2001.
- van Peursen, C.A, *Strategi Kebudayaan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1988.
- Widaryanto, F.X. , *Kritik Tari: gaya, struktur, dan makna*, Penerbit Kelir, Bandung, 2005.

Makalah dan Karya Ilmiah

- A.M. Hermin, Kusmayati. *Makna tari Dalam Upacara di Indonesi*, Pidato Ilmiah pada Dies Natalis VI Institut Seni Indonesia, Yogyakarta. 1989/1990.
- Agus Triyana, *Hak Milik Intelektual dalam Pandangan Hukum Islam*, dalam Jurnal Hukum No. 17 Vol 8 Juni 2001
- Arifni Netrirosa, *Tari Kelompok "Berubah"*, <http://library.usu.ac.id>. (diakses tanggal 16 Desember 2008).
- Andinta Erlinayanti, Jurnal Pemuda Indonesia : *Hak Cipta Karya Seni Milik Siapa?*, www.google.com (diakses tanggal 16 Desember 2008).
- Budi Santoso, Hand Out Mata Kuliah Hak Cipta: Pengenalan Royalty Ciptaan Lagu/Musik, Magister Hukum Undip Kelas HET-HKI, tahun 2008.
- Edi Sedyawati, *Upaya Perlindungan Hukum (HKI) Terhadap Produk Kerajinan Nasional yang Menjadi Warisan Budaya*,

disampaikan dalam Seminar Pekan Kerajinan Nasional, Semarang 18 Oktober 2002.

Emawati Junus, "*Aspek Hukum Di Bidang Hak Cipta : Perlindungan Hukum HKI, Taditional Knowledge, Folklore*", disajikan pada PROSIDING Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis. MA RI bekerja sama dengan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004.

Etty Susilowati, "*Bunga Rampai Hak Kekayaan Inetelektual*", Sentra Pendidikan Manajemen HKI Undip Semarang, 2005.

FX. Soebiyanto, *Perencanaan Riset dan Strateginya (Kursus Penyelenggaraan Metodologi Penelitian bagi Dosen)*, Undip, 1980.

Helly Minarti, Mencari Tari Modern/ Kontemporer Indonesia www.google.com (diakses tanggal 16 Desember 2008).

Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor Fidusia*, Jurnal.unikom, 2004.

I Gusti Bagus Sugriwa, "*Dasar – dasar Kesenian Bali*", *Budaya*, 6/VI, Juni 1975.

Musrihah, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta, Magister Ilmu Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2000.

S.P, Soedarsono, *Seni dan Keindahan*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Yogyakarta, ISI Yogyakarta, 30 Mei 1998.

Salman Luthan, "*Delik – delik hak Cipta*", Makalah Diskusi Dosen Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 1989.

Soediro Satoto, *Seni Sebagai Fokus Budaya*, makalah dalam Kongres Kebudayaan V Tahun Kebudayaan V Tahun 2002.

Tim Lembaga Research Kebudayaan Nasional (LRKN) LIPI, *Kapita Selekta Manifestasi Budaya Indonesia*, Jakarta: LRKN LIPI, 1984.

Thoga Hutagalung, Disertasi: *Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Filsafat Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945*, Universitas Padjajaran, 1995,

Toto ST Radik, *Seni, Proses Kreatif, dan Sikap Senima*, artikel rumahdunia.net, tanggal 21 Mei 2005

Peraturan Perundang – undangan

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Depdikbud, UUD '45-P4-GBHN-Tap – tap MPR 1983, Bahan Penataran dan Referensi Peraturan, 1984.

Undang – undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disingkat MPR) No. 11/MPR/1978 tentang Ekaprasetya Pancakarsa

Website

[www. Google.com](http://www.Google.com)

[www. Hukumonline.com](http://www.Hukumonline.com)

[http//www.senirupa.net/mod.php/mod=publisher&op=viewarticle&cid=6
&artid=116.](http://www.senirupa.net/mod.php/mod=publisher&op=viewarticle&cid=6&artid=116)

